IAIN KUDUS PRESS
Prof. Dr. Ihsan, M.Ag.
Pendidikan Moderasi Beragama
Model Madrasah Pesantren

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA MODEL MADRASAH PESANTREN

Selamat dan Sukses

Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.

Atas diraihnya Gelar Guru Besar
Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Wakil Rektor III IAIN Kudus

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA MODEL MADRASAH PESANTREN

Prof. Dr. H. Ihsan, M. Ag.

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA
MODEL MADRASAH PESANTREN

Cetakan Pertama, Maret 2022
ISBN: 978-623-99717-0-0
xviii + 148 hlm; 17.6x25 cm

Penulis: Prof. Dr. H. Ihsan, M. Ag.
Editor: Aat Hidayat, M. Pd. I
Tata Letak Isi: Yaumis Salam
Penata Sampul: Yaumis Salam

Diterbitkan oleh:

IAIN Kudus Press
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Bae Kudus
Jawa Tengah 59322
Email: penerbit@iainkudus.ac.id

PRAKATA

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَا بِاللهِ شَهِيْدًا. اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. وَقد قَالَ الله تعَالَى: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا. اَمَّا بَعْدُ

Tiada untaian kata pembuka yang pantas penulis ucapkan kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya, teriring shalawat dan salam semoga senantiasa tersemat pada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, teriring doa semoga rahmat, hidayah dan I'anah serta barakah Allah selalu mengiringi semua langkah kita. Aamiin

Alhamdulillah wassyukru lillah, atas perkenan Allah, telah hadir sebuah buku kecil dan sederhana dengan judul "**Pendidikan Moderasi Beragama Model Madrasah Pesantren"** yang mencoba mengupas tentang hakikat pendidikan moderasi beragama dan akar genealoginya di tengah dinamika madrasah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah establish dan memiliki kontribusi nyata lahirnya generasi bangsa Indonesia.

Bagaimanakah pendidikan moderasi beragama dalam konteks madrasah pesantren di Indonesia? Inilah yang menjadi fokus dalam buku ini. Buku ini lahir dari kegelisahan penulis tentang beberapa pertanyaan atas realitas yang masih menggelayut dalam kehidupan

bangsa ini. Ada apa dengan bangsa ini? Mengapa daya tarik NKRI "memudar"? Mengapa semangat formalisasi agama semakin memikat? Tidak mudah menjawab sederet pertanyaan ini karena masalahnya membentang dari yang prinsip sampai yang teknis, mulai ideologi sampai teknologi, mulai fenomena lokal sampai tantangan global.

Secara internal, setidak ada tiga kepentingan besar yang berkembang di Indonesia, yaitu; *pertama*, kepentingan nasionalis yang kini berkuasa dan memiliki tujuan untuk mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasilanya; *Kedua*, kepentingan liberal yang senantiasa memperjuangkan kebebasan dan persamaan hak, menolak pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama, di dalamnya terdapat paham kapitalis dan paham sekuler yang memiliki tujuan akhir kebebasan, menguasai segala lini birokrasi agar berkesempatan untuk menguasai pengelolaan sumber daya alam tanpa mau ambil pusing terhadap ideologi ataupun hukum negara, terhadap bentuk negara maupun sistem pemerintahannya; dan *ketiga*, kepentingan faham radikal, baik yang senderung ke kanan maupun kiri yang bertujuan untuk mengganti hukum negara atau ideologi, mengganti sistem pemerintahan dan mengganti bentuk negaranya.

Dalam kerangka itu, tulisan ini berangkat dari kerangka teoretik moderasi beragama yang secara historis pernah dilakukan oleh para penyebar Islam awal, terutama di tanah Jawa yang dikenal dengan istilah Walisongo. Fokus kajian ini pada interpretasi nilai-nilai sejarah Sunan Kudus yang memiliki nilai luhur ajaran, *local wisdom* maupun bangunan arsitektur Menara Kudus yang sarat makna kedamaian dan toleransi. Artinya, moderasi beragama tidak hanya dilakukan oleh *stakeholder* keagamaan pada masa kini. Namun telah lama dilakukan oleh para Wali di Jawa, khususnya Sunan Kudus pada kisaran abad ke-13 hingga 16 Masehi. Hal inilah yang membuat Islam di Nusantara atau Indonesia bersifat moderat, toleran dan membumi di dalam budaya masyarakat.

Sayangnya, pandangan moderat ini belum diamini semua kalangan karena adanya virus radikalisme. Bahkan di kalangan pelajar pun sudah ada yang terpapar. Virus radikalisme dalam pendidikan

telah menyebabkan sekian prosen pelajar kita tidak lagi mencintai dasar negara Pancasila. Bagi mereka, Pancasila dianggap sebagai dasar negara kafir yang tidak sesuai Islam. Beberapa temuan survei telah membuka mata dan menjadi *warning* bagi masa depan moderasi beragama di dunia Pendidikan Islam dan bangsa ini secara keseluruhan.

Pada saat bersamaan, moderasi beragama juga ingin menghindarkan umat Islam dari ekstrim kiri. Yakni pola keislaman yang menggunakan paradigma liberalisme, sekularisme dan pluralisme guna mendekati Islam. Liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai ukuran utama dalam beragama. Kebebasan ini terutama terletak pada superioritas akal dalam menafsiri wahyu. Sedangkan sekularisme mengembangkan prinsip pemisahan agama dan negara, satu hal yang bertentangan dengan cakupan syariah Islam yang tidak hanya mengatur kehidupan personal tetapi sosial. Sementara itu pluralisme mengembangkan prinsip kesamaratаan agama-agama (*wahdatul adyan*), sedangkan tiap agama memiliki teologi dan hukum yang berbeda. Demikian pula Islam moderat mengembangkan penghargaan terhadap pluralitas (fakta kemajemukan).

Sejarah telah membuktikan bahwa konsistensi pesantren terhadap *manhaj al-fikr* Walisongo telah menjadikannya mampu bertahan dari segala deraan dan tantangan zaman. Pesantren dapat bertahan dengan tegar ketika sistem pendidikan yang lain sibuk mengurusi politik dan birokrasi. Demikian pula, pesantren juga tetap hidup dengan moderasi dan toleransinya ketika muncul lembaga Islam lain yang justru mengarahkan peserta didiknya untuk tidak toleran terhadap ummat lain. Sebagai penerus ajaran pesantren, Madrasah telah menawarkan model pendidikan yang berkomitmen untuk melahirkan manusia yang utuh; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya; kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

Madrasah Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki basis nilai pesantren, maka eksistensi Madrasah satu sisi tumbuh dan berkembang dengan dinamika kemajuannya dalam merespon modernisasi dan disisi lain tetap eksis dan memiliki ketahanan karakter,

visi dan orientasi serta jatidiri sebagai lembaga pendidikan Islam yang indigenous di tengah masyarakat Indonesia. Madrasah Pesantren (MP), Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP) dan Masrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP) sebagai jabaran dari Madrasah pesantren secara variatif membumikan moderasi beragama dengan basis nilai, pengajran dan kultur madrasah pesantren yang terintegrasi dalam Kurikulum (intra kurikuler, ektra kurikuler, co kurikuler) dan *hidden curriculum* mereka sehingga lahirlah pribadi yang taat beragama, cerdas dan cinta tanah air.

Model Madrasah Pesantren bisa disebut sebagai *Education Portrait of Islam* karena dilakukan dengan empat pendekatan, yakni: *Institutional Identity, Teaching Materials/References to Javanese, Activity Assence*, dan Kontra radikalisme. Pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan itu terbukti telah meneguhkan bahwa apa yang dilakukan Madrasah Pesantren dengan tiga (3) modelingnya, telah menorehkan keberhasilan melabuhkan moderasi beragama di Bumi Nusantara. Setidaknya ada tujuh bukti yang dapat diajukan sebagai dalil keberhasilan tersebut, yakni: Kiai yang moderat, Literasi Moderat yang mengakar pada khasanah keilmuan pesantren, Habitus dan Tradisi yang Moderat serta Penerimaan Azas Tunggal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Harga mati.

Sebagai kata pungkas, Penulis mengucapkan berjuta laksa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersajinya buku ini di hadapan bapak dan ibu serta para pembaca, tentu dengan kesadaran bahwa karya ini masih jauh panggang dari api, setumpuk kelemahan dan kekurangsempurnaan di sana sini. Oleh karenanya, harus saya sampaikan permohan maaf dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini.

Kudus, 12 Maret 2022

Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag

PROLOG

Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, MA.

STRUKTUR KEBERAGAMAAN MODERASI BERAGAMA

Setiap agama selalu diturunkan untuk kepentingan umat manusia dalam keseharian mereka. Pelaksanaan ajaran agama ini merupakan pergeseran wujud ajaran agama yang semula merupakan wahyu ketuhanan kemudian berubah menjadi perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan konkret. Perubahan dan pergeseran dalam pelaksanaan ajaran ini memerlukan suatu proses yang dilakukan oleh umat manusia dalam keseharian kehidupan dan konteks yang melatarbelakanginya. Proses operasionalisasi praktik ajaran agama ini berisi sejumlah unsur, baik yang merupakan pergeseran materi ajaran agama itu sendiri, kondisi dan karakter pemeluk agama yang melakukan, latarbelakang sosiokultural di sekitarnya dan akhirnya perubahan ruang waktu yang melatarbelakanginya. Unsur-unsur operasionalisasi pelaksanaan ajaran ini selalu mengalami dinamika dan perubahan sehingga berpeluang tumbuh variasi dan tipologi pola perilaku yang tidak terbatas jumlahnya.

Dalam agama Islam, proses pelaksanaan ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah SWT juga mengalami karakter seperti diuraikan di atas. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara agama yang merupakan wahyu dengan pelaksanaan ajaran agama yang merupakan keberagamaan umat Islam. Al-Qur'an dan sunnah sebagai wahyu pasti tidak terpengaruh dan tidak mengalami perubahan namun keberagamaan umat Islam berkembang dan berubah sejalan dengan karakter orang beriman dan situasi kondisi yang melatarbelakanginya. Varian dan tipologi keberagamaan ini meliputi bukan hanya materi keberagamaan sebagai perilaku orang beriman semata tetapi juga

tipologi bentuk perilaku dan muatan operasionalisasi pelaksanaan ajaran agama. Variasi keberagamaan ini dapat dilihat dan diperhatikan dalam *sirah sahabiyah* atau dalam pemikiran dan keberagamaan umat Islam selanjutnya. Benih variasi pola dan tipologi perilaku keberagamaan sudah dapat diperhatikan dalam perbedaan perilaku sahabat Rasulullah SAW ketika meyikapi peristiwa *Isra' Mi'raj.* Perbedaan sikap dan perilaku juga tampak di dalam diri Abu Bakar as Shidiq dan Umar Bin Khattab ketika keduanya menyikapi butir-butir Perjanjian Hudaibiyah yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW dan Suhail Ibn Amr al-Quraisy. Variasi dan pola perilaku semakin nampak berbeda di dalam diri Ali Ibn Abi Thalib dan Muawiyyah Ibn Abi Sofyan ketika keduanya bersikap terhadap persoalan kematian Khalifah Utsman Ibn Affan. Sampel variasi dan keragaman keberagamaan menjadi sangat jelas ditampilkan oleh Sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas ketika berseberangan dengan Abdulllah Ibn Wahab ar-Rasibi tentang batas antara iman dan kafir.

Analisis terhadap laporan sejarah keberagamaan umat Islam tersebut di atas dapat dilakukan dengan pendekatan metodologi yang sesuai dengan struktur epistemologi Ilmu Islam. Dalam variasi pola perilaku keberagamaan *Sirah Sahabiyah* tersebut di atas dapat ditemukan universalitas tentang proses dan operasionalisasi praktik ajaran agama Islam yang semula merupakan wahyu transendental menjadi perilaku kehidupan konkret umat manusia yang bersifat empiris. Analisis epistemologi ini akan berujung pada rumusan *grand concept* dan *grand theory* yang bersifat universal bukan hanya untuk komunitas Sahabat Rasulullah SAW yang sempat mengikuti bimbingan kenabian namun juga untuk semua umat Islam yang melaksanakan ajaran agama Islam. Cakupan *grand concept* dan *grand theory* ini meliputi keseluruhan isi dan muatan keberagamaan dalam segala bidang kehidupan umat Islam menurut ajaran al-Qur'an dan sunnah. Salah satu komponen penting dalam cakupan metodologi ini adalah fenomena pergeseran ajaran agama dan operasionalisasinya menjadi perilaku orang beriman sebagai kehidupan konkret mereka.

Pergeseran dan operasionalisasi praktik ajaran tersebut selalu merupakan sebuah proses yang berubah, bergeser bahkan memiliki dinamika dan variasi dalam bebagai bentuknya. Keragaman fenomena tersebut senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan faktor-faktor dan unsur yang mempengaruhinya. Meskipun demikian, muatan unsur dalam proses keberagamaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua komponen dasar. Unsur pertama adalah komponen esensial yang sifatnya universal tidak mengalami perubahan dan pergeseran meskipun dilaksanakan dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Komponen kedua, merupakan unsur-unsur operasional yang sifatnya teknis dilaksanakan dan dilakukan sebagai respons terhadap perubahan ruang waktu dan situasi kondisi sosiokultural yang melatarbelakanginya. Terminologi yang dipakai di dalam proses operasionalisasi ini adalah *kaifiat* atau teknik dalam beragama yang merupakan produk teknologi perilaku menurut Teori Praktik yang mendasarinya.

Sebagai sebuah jarak perubahan, proses pelaksanaan ajaran agama dalam keberagamaan orang beriman merupakan ruang proses perilaku yang dapat diformulasikan sebagai sebuah jarak kegiatan. Di dalam jarak kegiatan keagamaan tersebut, selalu terdapat pilihan-pilihan variasi pola dan tipologi beragama yang merupakan teknik operasional di dalam melaksanakan ajaran agama. Materi variasi tersebut merupakan pilihan mulai dari yang paling sederhana sampai paling komplek, paling mudah dan paling sukar, paling longgar memenuhi ketentuan sampai dengan yang paling ketat, mulai dari konsekuensi paling ringan sampai dengan yang paling berat, mulai yang paling dekat sampai dengan yang paling jauh dan berbagai dinamika variasi pelaksanaan operasional ajaran agama. Karakter umum yang harus disebutkan adalah sifat dari jarak kegiatan ini hanya dalam ruang lingkup teknik beragama dan bukan menyentuh esensi atau pokok ajaran agama yang sifatnya tidak berubah.

Rumusan moderasi beragama sangat terkait dengan peluang pilihan variasi opsi pola dan tipologi perilaku di dalam jarak proses

kegiatan operasional beragama tersebut. Kriteria dasar moderasi hanyalah kesediaan untuk menentukan pilihan varian-varian pola perilaku di dalam pilihan opsi tersebut yang paling relevan dan responsif terhadap situasi dan kondisi praktik pelaksanaan yang dihadapi. Dalam rumusan ini, moderasi beragama sering dirumuskan sebagai pilihan yang paling ber*maslahat* untuk kepentingan umat secara umum dan tetap memperhatikan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, moderasi beragama sering dirumuskan sebagai sikap *tawasud, tawazun* dan *tasamuh.* Logika praktik *tawasud* diukur dari jarak yang seimbang antara dua ujung yang berlebihan. Sedangkan logika praktik *tawazun* diukur dari ke*maslahatan* yang seimbang antara dua pilihan operasional teknis yang dimungkinkan oleh teknik beragama. Pada akhirnya, logika praktik *tasamuh* didasarkan pada kesediaan dan keterbukaan sikap dan perilaku umat Islam untuk menentukan pilihan teknis operasional yang sebenarnya keseluruhannya merupakan *kaifiat* beragama.

Pada akhirnya, sejarah umat Islam hanya merupakan rangkaian tipologi varian menentukan pilihan teknis operasional dalam melaksanakan al-Qur'an dan Hadits. Generasi penerus Sahabat, berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak selalu sama dengan kehidupan konkret sahabat Rasulullah SAW. Perubahan dan perbedaan konteks keberagamaan tersebut hampir mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan, baik yang merupakan ibadah *mahdhah* atau ibadah *ghairu mahdhah.* Peluang variasi pola dan tipologi perilaku dapat diperhatikan bukan hanya di dalam pemikiran keagamaan semata namun juga di dalam kehidupan konkret mereka baik bersifat politik, ekonomi, sosial bahkan budaya. Logika praktik dinamika tersebut dalam perkembangan selanjutnya mengendap menjadi komunitas dan kelompok keberagamaan baik yang menggunakan terminologi *mazhab, aliran pemikiran* atau bahkan kelompok pemikiran sosial-politik. Sepanjang sejarah umat Islam tersebut terdapat jumlah tidak terbatas pilihan-pilihan variasi teknik operasional beragama yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya sampai dalam kehidupan modern.

Silsilah pewarisan pola dan perilaku beragama tersebut memang bersumber dari praktik Rasulullah SAW dan Sahabat, baik di dalam Sunnah atau dalam *Sirah Nabawiyah* dan *Sirah Sahabiyah.* Salah satu silsilah keberagamaan tersebut dapat diperhatikan sebagai sebuah rangkaian teknik pemilahan dan pemilihan pilihan pola dan perilaku beragama yang memenuhi logika praktik moderasi sebagai dirumuskan di atas. *Nasab* keberagamaan tersebut dapat dirunut dari pola keberagamaan *khulafaurrasyidin* sampai pada Hasan al-Basri kemudian Mazhab Empat, rumusan Ilmu Kalam menurut Asy'ari dan Maturidi yang kemudian diramu dengan pandangan Tasawuf al-Ghazali. Silsilah keberagamaan tersebut akhirnya sampai ke Indonesia yang kemudian menumbuhkan pola keberagamaan tersendiri yang relevan dengan situasi sosio-kultural Kepulauan Nusantara yang kemudian dibahasakan dengan terminologi Islam Nusantara. Dalam perkembangan selanjutnya, keberagamaan tersebut kemudian dirawat dan dilestarikan oleh umat Islam baik dalam bentuk kegiatan perorangan atau kelembagaan. Apabila diukur dari logika praktik moderasi beragama seperti diuraikan di atas, maka pewarisan kegiatan tersebut dapat dijumpai di dalam lingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh para *kiai* yang kemudian disebut dengan Pesantren. Sudah barang pasti, terdapat penataan lanjut kegiatan penyelenggaraan sehingga semakin efektif melaksanakan ajaran agama Islam, semakin responsif terhadap situasi kondisi yang dihadapi dan pada akhirnya mampu melakukan penguatan capaian *rahmatan lil alamin* menurut Teori Praktik Indonesia. Pada akhirnya, teori praktik tersebut perlu mempertimbangkan kehadiran Indonesia sebagai sebuah sistem politik kenegaraan yang ditandai Pilar Kebangsaan. Unsur kebangsaan tersebut sepenuhnya dapat diposisikan dalam rumusan moderasi beragama yang dilakukan menurut kriteria tersebut di atas.

Pemenuhan teori praktik moderasi beragama dalam keindonesiaan ini harus dimulai dari kriteria antara agama dan keberagamaan. Agama adalah wahyu ketuhanan yang sepenuhnya

universal tidak mengalami perubahan atau pergantian. Akan tetapi keberagamaan berbeda meskipun terkait dengan kriteria agama tersebut. Keberagamaan adalah praktik ajaran agama di dalam al-Qur'an dan sunnah dalam situasi dan kondisi yang berpeluang untuk berubah dan berbeda serta memiliki kriteria khusus ruang waktu yang melatarbelakanginya. Menurut teori praktik di atas unsur ini adalah peluang pilihan dari sejumlah variasi pola pelaksanaan yang merupakan pilihan teknis operasional. Oleh karena itu, apabila moderasi beragama dilakukan dengan standar teori praktik di atas maka keberagamaan umat Islam sepenuhnya dapat memenuhi kriteria agama sebagai wahyu ketuhanan di dalam al-Qur'an dan sunnah, namun pada saat yang sama mampu memberikan jawaban dan respons terhadap keindonesiaan seperti dirumuskan di dalam Pilar Kebangsaan. Sudah barang pasti, masih diperlukan rumusan teknis operasional bahkan mungkin dalam bentuk modul diklat dan pembelajaran untuk mencapai tujuan ini.

Kudus, 12 Maret 2022

Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, MA.

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA MODEL MADRASAH PESANTREN

BAB I
PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, nilai kemanusiaan, memberi rasa aman, menganjurkan perdamaian, menentang penindasan, kesewenang-wenangan dan segala bentuk ketidakadilan.[1] Untuk melaksanakan semua ini tidak cukup hanya dengan himbauan moral belaka, akan tetapi butuh tindakan nyata. Ketika keadilan, kebenaran, harga diri, dan nilai-nilai kemanusiaan tercerabut dari realitas sosial, maka Islam akan segera turun mengangkat bendera perang. Tindakan ini dalam konsepsi Islam disebut *Jihad* [2], tapi dalam literatur barat disebut *Holy War.*[3]

Kata jihad ini penting untuk disinggung dan ditempatkan pada proporsinya agar tidak dimaknai secara kaku dengan mengangkat senjata. Sebab fakta sejarah mengatakan bahwa selama tiga belas tahun di Makkah Nabi dan pengikutnya selalu menganjurkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Akan tetapi, selama itu pula mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil; dihina, disiksa, dipinggirkan, dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Dalam kondisi seperti ini beliau sadar bahwa konfrontasi fisik bukanlah jalan keluar yang baik. Untuk menata sebuah peradaban,

---

[1]Mahmūd Shalṭūt, *Min Taujihāt al-Islam,* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), 36

[2]Kata 'Jihād' dalam literatur ke-Islaman mengandung dua makna; esoteris (batin) dan eksoteris (lahir). Yang pertama menunjuk kan serangkaian perlawanan melawan sesuatu yang tidak nampak secara fisik, seperti melawan hawa nafsu. Dalam konteks ini, bahhasa yang sering dipakai adalah *mujahadah*. Sedang makna eksoteris menunjuk pada serangkaian perlawanan kepada musuh yang kasat mata, seperti melawan orang kafir, munafik dan orang-orang murtad. Muhammad Ali al-Ṣābūni, *Tafsir Āyāt Ahkām,* (Makkah: Mathba'ah Muhammad 'Ali, tt), 95

[3]Karen Amstrong, *Muhammad: A Western Attemp to Understand Islam,* (London: Gollanez Ltd, 1992), 165.

yang diperlukan bukanlah kekuatan senjata, tapi penataan sistem nilai. Oleh karena itu, yang dilakukan Nabi adalah berhijrah.[4] Perjalanan hijrah bukanlah sekedar sebuh proyek perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi menyiratkan sebuah pandangan ontologis, yakni proses terbentuknya sebuah komunitas muslim dari tradisi pagan ke tradisi tauhid.

Ketika komunitas muslim makin lama makin bertambah, maka persinggungannya dengan faktor politis tidak bisa di tawar. Berbagai kesepakatan politik dengan klan madinah mulai dilakukan. Dan sebagai hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk sebuah komunitas bersama yang disebut dengan *'Ummah'*.[5]

Pembentukan komunitas bersama (Ummah) di Madinah bukanlah sesuatu yang lahir secara mengalir, tetapi melalui sejumlah perjuangan yang dihiasi oleh hiruk-pikuk pengorbanan. Legalitas perang hanya diperbolehkan Ketika diserang dalam dalam rangka menghentikan ketidakadilan, sebagaimana terjadi selama tiga belas tahun di Makkah dan hendak dilanjutkan kembali ketika mereka sudah pindah di Madinah. Atas dasar inilah Allah mengijinkan Perang.[6] Motif yang hampir sama juga dilakukan oleh Yahudi Madinah. Mereka bersekongkol dengan kaum pagan dan mengkhianati apa yang disebut dengan 'peace of agreement'.[7]

Dalam konteks perjanjian damai inilah Indonesia hadir, sebagaimana keputusan Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 tahun 2015. Jauh sebelum itu, Muktamar NU ke-11 tahun 1935 memberikan status hukum negara Hindia Belanda dengan "negara Islam". Meskipun saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Penjajahan Belanda, tetapi

---

[4]Keputusan berhijrah ini pada akhirnya diakui oleh pengamat barat sebagai tindakan cerdas Muhammad. Ia meningggalkan situasi sempit untuk mentransformasi peradaban arabia ke seluruh dunia. Karen Amstrong, *Muhhamad: A Western…,*164

[5]Ira M. lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 39.

[6]Lammens, SJ, *Islam: Belief And Institutions,* (London: Methuen Co, Ltd, 1979), 24

[7]Dawam Raharjo, "Ensklopedi al-Qur'an: Madinah", dalam: *Jurnal Ulumul Qur'an,* no V, th. 1993, 54.

dalam sejarahnya Indonesia pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam dan orang Islam dapat secara bebas menjalankan syari'at keagamaannya. Atas nalar ini pula, Konferensi Nasional Alim Ulama NU di Cipanas pada 1954 dan kemudian dikukuhkan oleh Keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia sebagai *waliy al-amri al-dlarûri bi al-syawkah* (pemegang pemerintahan secara de facto dengan kekuasaan penuh). Sebaliknya, terhadap Kartosuwiryo yang menggagas Negara Islam Indonesia (NII), Ulama NU memberikan hukum bughat, pemberontakan kepada negara yang sah.[8]

Dengan cara pandang diatas, maka bentuk Indonesia yang sudah disepakati dengan pilar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 merupakan local wisdom umat muslim Indonesia.[9] Indonesia dengan empat pilarnya merupakan produk yang sangat cerdas dari founding father's Indonesia dalam merespon pluralitas bangsa. Sampai titik ini harusnya disadari bahwa "kesepakatan" itu tidak menghilangkan perbedaan filosofis tentang tuhan dan agama. Tetap saja ada ada perbedaan penafsiran tentang Tuhan itu sendiri: *God, Emptiness, Suchness, the One, Nature, the Many.* Ada perbedaan pemahaman mengenai apa yang diwahyukan oleh Tuhan tentang Tuhan dan tentang diri kita dalam hubungan kita tentang harmoni dan dis-harmoni dengan Tuhan tersebut. Ada perbedaan penafsiran tentang cara apa yang harus kita ikuti untuk mengubah (pandangan kita) dari pemusatan-diri secara fatal menuju pemusatan-kepada Tuhan secara bebas. Tetapi diskurus dan cara-cara agama seperti itu kadang-kadang bisa saling melengkapi, dan pada batas tertentu, melengkapi beberapa aspek yang belum maju dari yang lain, tetapi pada saat yang sama juga bisa saling mengganggu dan melenyapkan.

[8]K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan; Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan* (Jakarta: Jakarta : Qultum Media, 2004), 207-208

[9]Muhammad Sawir, "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* Vol. 1, no. 1, 2016, 6.

Oleh karena itu, kehadiran pancasila merupakan titik pertemuan pluralitas Indonesia dengan sekian perbedaan yang ada. Pancasila dapat mengakomodasi seluruh varitas pencarian dan konvergensi agama-agama Nusantara, sehingga mengimplikasikan adanya sikap saling menghargai berbagai pandangan dunia (*wold-view*) dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut akar tercipta kerukunan inter dan antar umat beragama.[10]

Sayangnya, kerukunan umat beragama di Indonesia masih dalam tataran permukaan yang tipis, belum menyentuh kehidupan konkret bangsa, mudah terbelah dan memicu konflik. Tak menutup kemungkinan, kerukunan yang tampak hanya bersifat artifisial, yang sarat muatan ideologis dengan impian romantis-utopis masing-masing. Hal ini bisa terlihat dari fenomana yang terjadi di masyarakat dalam dekade terakhir: riuhnya perdebatan Kadrun-Cebong, HTI, FPI, dan wayang, bahkan tema terkini yang mendera kementerian agama adalah SE Menetri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara..

Kondisi itu tentu tidak kondusif bagi bangsa Indonesia menuju solidaritas dan persatuan yang kokoh. Dampaknya, mempersulit elemen bangsa dalam membangun komitmen yang solid, dalam menyikapi dan menyelesaikan beragam krisis dan persoalan yang sedang terjadi. Masing-masing berjalan dengan pandangan dan impiannya sendiri, dan bisa saja bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Sebagai misal, terjadi kurangnya kepedulian untuk menghentikan politik kekuasaan yang nyaris menjadi patron elit politik. Padahal, realitas ini merupakan salah satu akar utama terjadinya centang-perenang kehidupan dan krisis multi dimensi.

[10]Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam dan negara (politik) pada periode klasik, abad pertengahan, dan kontemporer, lihat Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990); W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Endinburgh: Endinburgh University Press, 1960); Qamaruddin Khan, *Political Consept in The Quran*, (Lahore: Islamic Book Foundation, 1982), Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (Cambrige: Cambrige University Press, 1961): Erwin I.J Rosenthal, *Islam in The Modern National State*, (Cambrige: Cambrige University Press).

Secara historis, dalam konteks Islam misalnya, kaum muslim telah mengalami sejarah panjang pergulatan hubungan Islam dan negara. Diskursus perihal relasi agama (Islam) dan negara telah lama menjadi perdebatan, tetapi tetap belum terpecahkan secara tuntas, bahkan cenderung mengalami *impasse* (kebuntuan). Secara bahasa, negara berarti organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan tertinggi yang sah, sehingga rakyat mentaatinya. Atau suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu, terorganisir oleh lembaga politik dan pemerintahan, berdaulat dan berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sementara, berdasarkan pendekatan teoritis, ada beberapa macam pengertian negara. Pertama, teori ketuhanan, yang menjelaskan negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Hal ini berpijak pada diutusnya Nabi Adam ke bumi oleh Allah untuk memulai hidup bersosial. Anak cucunya yang kini telah mencapai miliaran jumlahnya, hidup berkelompok dengan menempati area tertentu yang kemudian dinamakan negara.

Kedua, teori perjanjian, yang menyatakan bahwa negara terbentuk karena antarkelompok manusia yang tadinya hidup sendiri-sendiri, melakukan perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama. Teori ini mengarah pada tatanan kehidupan bersosial. Tinjauannya terletak pada sistem adanya perjanjian atau hasil kesepakatan bersama suatu kelompok yang mempunyai kesamaan visi dan misi.

Ketiga, melalui teori kekuasaan. Teori ini berpijak pada kekuasaan yang tercipta dan yang paling kuat. Keempat, teori kedaulatan, yang menjelaskan bahwa setelah asal usul negara menjadi jelas, maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa. (*Ilmu Negara, Umum dan Indonesia).*

Di alam modern, negara-bangsa (*nation-state*) merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari bangsa mana saja, termasuk Indonesia. Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan

konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian setiap bangsa dalam menghadapi pluralitas rakyatnya. Dalam kaitannya dengan agama (Islam), secara kategorial, ada tiga paradigma pemikiran politik Islam dalam melihat relasi agama dan negara, yakni:[11]

1. Paradigma integralistik.

Penganut paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan. Keduanya merupakan totalitas utuh yang tidak terpisah.[12]

Pada spektrum ini, beberapa kalangan muslim terutama kalangan fundamentalis beranggapan, bahwa *Islam* harus menjadi dasar negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial. Singkatnya, model ini merefleksikan adanya kecenderungan bertumpu pada aspek-aspek legal-formal idealisme Islam. Konsekuensinya, sistem politik modern menjadi *vis a vis* dengan ajaran-ajaran Islam.

---

[11]Ada beberapa versi tentang kategori ini. Abdurrahman Wahid menyebutnya responsi integratif, fakultatif, konfrontatif. Din Syamsuddin menamai integralistik, simbiotik, sekularistik. Masykuri Abdillah membagi kepada kelompok konservatif, modernis, dan sekuler. Sementara Bahtiar Effendi mengelompokkannya ke formal-idealistik dan substansial-realistik. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 57 ; Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal *Ulumul Qur`an*, hlm. 4-7. Abdurrahman Wahid, Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara, dalam *Kompas*, 5 Nopember 1998.

[12]Muhammad Yusuf Musa, *Nidham al-Hukm fiy al-Islam*, (Kairo: dar al-Kitab al-'Arabiy, 1963), 18 ; Abdul Baqi Surur, *Dawlah al-Qur`an*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1972), 80.

Model pandangan holistikal ini dianut oleh dua kelompok Islam, yaitu: [1] Islam tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi, praktik dan pemikiran politik Islam klasik, semisal Rasyid Ridla (1865-1935), dan [2] Islam fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan tradisi Nabi secara total, menolak sistem yang dibuat manusia. Seperti Khurshid Ahmad, Muhammad Asad, Muhammad Husayn Fadhlallah, Sayyid Quthb (1906-1966), Abu al-A'la Mawdudi (1903-1979), dan Hasan Turabi.[13]

2. Paradigma simbiosis-Mutualistik

Mazhab ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

Paradigma kedua memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa Al-Qur`an bukanlah buku ilmu politik. Karena istilah *dawlah* yang berarti negara, tidak dijumpai dalam Al-Qur`an. Memang, istilah

---

[13]Hasan Turabi, [1] "The Islamic State" dalam dalam *Voices of Resurgent Islam*, disunting oleh John L. Esposito, (New York: Oxford University Press, 1983); [2] "Islam, Democracy, the State, and the West", Middle East Policy 1, No. 3, 1992; [3] *al-Harâkah al-Islâmiyah fiy Sudan: al-Tathawwur wa al-Kasb wa al-Manhaj*, (Lahore: Iman, 1410/1990); [3] al-Shahwah al-Islamiyah wa al-Dawlah al-Quthriyyah fiy al-Wathan al-'Arabiy, dalam Sa'd al-Din Ibrahim (ed.), *al-Shahwah al-Islâmiyah wa Humum al-Wathan al-'Arabiy*, (Amman: Muntadza al-Fikr al-'Arabiy, 1988)..

dawlah ada, tapi bukan bermakna negara. Istilah ini dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekuasaan. Hanya dalam perjalanan waktu, makna harfiah ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

Sungguh pun demikian, penting dicatat bahwa pendapat kedua ini mengakui Al-Qur`an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis, yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip keadilan (*al-'adâlah*), kesamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran Islam (*islâmy*). Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad Husayn Haykal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Fazlurrahman (1919-1988).[14]

3. Paradigma sekularistik

Pandangan ketiga ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan simbiosis-mutualistik. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan kata lain, aliran ini

[14]Fazlur Rahman dengan keras mengkritik pandangan pertama integralistik. Ia mengatakan bahwa slogan "agama dan politik dalam Islam adalah tak terpisahkan" dipergunakan untuk menipu orang awam agar menerima bahwa alih-alih politik atau negara yang melayani tujuan jangka panjang Islam, Islam justru harus melayani tujuan-tujuan sesaat partai-partai politik. Lihat Muhammad Abduh, *Risâlah al-Tawhid*, (Kairo: Dar al-Manar, 1993), 55-60; Fazlurrahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 1401; Husayn Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1993); *Mudzakkirat fiy al-Siyâsah al-Mishriyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990), 78-88;

berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali-temali dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973),[15] Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963), kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).[16]

Ketiga paradigma tersebut, jika menilik data sejarah, maka menunjukkan bahwa pilhan mazhab pertama hanya akan menghasilkan cara berfikir fundamentalistik. Dalam studi gerakan Islam modern, mereka sering diistilahkan dengan fundamentalisme, revivalisme, Islamisme dan radikalisme, secara bergantian untuk maksud penyederhanaan (simplifikasi). Namun sebenarnya mereka memiliki karakteristik umum (*common characteristics*) dan keunikan (*peculiarities*) tersendiri, sebagaimana dalam riset Nazih Ayubi.

Tapi secara makro, gerakan reformis Islam dapat dibedakan menjadi [1] Modernisme yang diusung Muhammad 'Abduh dan Jamaluddin al-Afghani yang berpandangan bahwa Islam adalah sistem keyakinan yang sempurna, tetapi cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modern (modernitas); [2] Salafisme menekankan kepada sumber Islam yang otentik, skripturalis dan tradisionalis, seperti direpresentasikan oleh Wahhabiyah, Sanusiyyah, Mahdiyyah, Rashid Rida dan tokoh al-Ikhwan al-Muslimun awal, seperti Hasan al-Banna; [3]

---

[15]Thaha Husein, al-Fitnah al-Kubra, dalam *al-Majmu'ah al-Kamilah li Mu`allafat al-Duktur Thaha Husein*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1973), Juz IV, 227

[16]Muhammad Sa'id al-Asymawi, seorang hakim dan penulis Mesir terkemuka, menyatakan bahwa banyak di antara kegagalan masa lalu dalam sejarah Islam disebabkan oleh tercampur aduknya agama dan politik. Dengan berani dan tanpa ragu ia mengatakan, "Allah bermaksud menjadikan Islam sebagai sebuah agama, sementara orang-orang (*al-nas*) memahaminya bermakna politik. Dalam syari'at Islam, tidak ada sesuatu yang memaksa seseorang untuk mengikatkan agama ke dalam sebuah bentukan negara. Syari'ah tidak berhubungan dengan bentuk pemerintahan tertentu. Pemikiran politiknya dapat dibaca dalam Muhammad Sa'id al-Asymawi, *al-Islâm al-Siyâsiy*, (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992) ; *al-Khilâfah al-Islâmiyah*, (Kairo: Sina li al-Nayr, 1990).

Fundamentalisme, yang sebenarnya hampir sama dengan salafisme, namun kurang simpatik terhadap fikih. Mereka lebih meyakini bahwa Islam adalah agama, dunia, dan negara (*din, dunya, dawlah*) secara bersamaan. Dari sini kemudian muncul neo-fundamentalisme Islam yang lebih radikal dan militan, sebagaimana ditunjukkan *Takfir wa al-Hijrah, al-Jihad,* dan *Jama'at al-Fanniyyah al-'Askariyyah* (*Technical Military Academy*).

Sementara Olivier Roy membedakan antara fundamentalisme Islam tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional (ulama) dicirikan oleh oligarki klerikal (*clerical oligarchy*) sebagaimana ditunjukkan oleh Syi'ah. Islam Syî'ah memberikan otoritas sangat besar kepada ulama untuk menafsirkan doktrin agama. Tafsir mereka pun bersifat absolut. Sedangkan fundamentalisme modern dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam ditafsirkan sebagai ideologi yang diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalisme, liberalisme atau sosialisme. Mereka tidak dipimpin ulama, tetapi "intelektual sekuler" yang secara terbuka mengklaim sebagai pemikir religius. Mereka berpendapat bahwa karena semua pengetahuan itu bersifat *ilahi* dan religius: maka ahli kimia, teknik, insinyur, ekonomi, ahli hukum, adalah ulama.

Kaum fundamentalisme modern inilah yang sering dikatakan sebagai radikalisme Islam karena lahir sebagai reaksi munculnya nasionalisme sekular. Jika salafisme mendapatkan inspirasi dari ide-ide normatif Islam, dan modernisme berusaha untuk menggabungkan unsur-unsur Islam dan Barat, maka radikalisme Islam menggambarkan sistesis kreatif salafisme dan modernisme.

Sebagai ikhtiar keluar dari jebakan fundamentasme tersebut, maka muncullah gagasan moderasi beragama. Moderasi Beragama telah menjadi salah satu isu utama di dalam kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Menteri Agama

RI (2014-2019), Lukman Hakim Saifuddin yang menggunakan tema ini sebagai strategi untuk moderasi kehidupan beragama. Berbeda dengan strategi deradikalisasi dan *counter-radicalism*, moderasi beragama lebih mengedepankan langkah positif dengan memoderasikan pandangan dan paham keagamaan, terutama umat muslim di Indonesia.

Istilah moderasi, merujuk pada paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang artinya sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim.

Sementara dalam Bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyyah*;[17] orangnya disebut *wasith*. Kata *wasith* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yakni "wasit" yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di dalam pertandingan.[18] Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan "segala yang baik sesuai objeknya". Dalam sebuah Hadits disebutkan:

خَيْرُ ٱلْأُمُوْرِ أَوْسَاطُهَا

Artinya: "Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat."

---

[17]Ahmad Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),108

[18]Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kementrian agama RI, 2019).15-19.

Dalam Riwayat lain disebutkan:

وَخَيْرُ ٱلْأَعْمَالِ أَوْسَطُهَا وَدِيْنُ اللهِ بَيْنَ الْقَاسِىْ وَالْغَالِىْ

Artinya: "Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih."

Islam, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi, mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut, dapat mengantarkan paham ini diterima mayoritas umat Islam di Indonesia. Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf Al-Qardawi, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama sebagai proses memoderasikan pemahaman keagamaan umat beragama agar tidak terjebak di dalam pemahaman yang ekstrim. Dalam hal ini, moderasi diartikan sebagai proses membuat pemahaman keagamaan moderat yang dicirikan dengan pemahaman "jalan tengah" (*middle way*), di antara berbagai titik ekstrim, baik ekstrim kanan maupun kiri. Moderatisme ini juga biasa disebut dengan istilah *wasathiyyah* (jalan tengah) yang merupakan ciri khas dari keberislaman di Indonesia. Seimbang artinya tidak berat sebelah di dalam menilai. Toleran terhadap sesuatu yang berbeda. Dan moderat di antara berbagai sikap ekstrim. Titik ekstrim yang dimaksud ialah paradigma konservatif-radikal (kanan) pada satu sisi, dan liberal (kiri) pada saat bersamaan.

Lantas bagaimanakah moderasi beragama dalam konteks madrasah dan pesantren di Indonesia? Inilah yang menjadi fokus

dalam tulisan ini. Dalam kerangka itu, tulisan ini berangkat dari kerangka teoritik moderasi beragama yang secara historis pernah dilakukan oleh para penyebar Islam awal, terutama di tanah Jawa yang dikenal dengan istilah Walisongo. Fokus kajian ini pada interpretasi nilai-nilai sejarah Sunan Kudus yang memiliki nilai luhur ajaran, *local wisdom* maupun bangunan arsitektur Menara Kudus yang sarat makna kedamaian dan toleransi. Artinya, moderasi beragama tidak hanya dilakukan oleh *stakeholder* keagamaan pada masa kini. Namun telah lama dilakukan oleh para Wali di Jawa, khususnya Sunan Kudus pada kisaran abad ke-13 hingga 16 Masehi. Hal inilah yang membuat Islam di Nusantara atau Indonesia bersifat moderat, toleran dan membumi di dalam budaya masyarakat.[19]

Sayangnya, pandangan moderat ini belum diamini semua kalangan karena adanya virus radikalisme. Bahkan di kalangan pelajar pun sudah ada yang terpapar. Virus radikalisme dalam pendidikan telah menyebabkan sekian pelajar kita tidak lagi mencintai dasar negara Pancasila. Bagi mereka, Pancasila dianggap sebagai dasar negara kafir yang tidak sesuai Islam. Mereka pun ada yang sepakat serta mendukung terorisme, dan radikalisme yang dilakukan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Temuan survei ini tentu menjadi *warning* bagi masa depan moderasi beragama di dunia Pendidikan Islam dan bangsa ini secara keseluruhan.

Pada saat bersamaan, moderasi beragama juga ingin menghindarkan umat Islam dari ekstrim kiri. Yakni pola keislaman yang menggunakan paradigma liberalisme, sekularisme dan pluralisme guna mendekati Islam. Liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai ukuran utama dalam beragama. Kebebasan ini terutama terletak pada superioritas akal dalam

---

[19]Ihsan, *Kudus Kiblat Bhinneka Tunggal Ika (Kudus,* FKUB, 2019), 129

menafsiri wahyu. Sedangkan sekularisme mengembangkan prinsip pemisahan agama dan negara, satu hal yang bertentangan dengan cakupan syariah Islam yang tidak hanya mengatur kehidupan personal tetapi sosial. Sementara itu pluralisme mengembangkan prinsip kesamarataan agama-agama (*wahdatul adyan*), sedangkan tiap agama memiliki teologi dan hukum yang berbeda. Demikian pula Islam moderat mengembangkan penghargaan terhadap pluralitas (fakta kemajemukan).

Selanjutnya, penguatan paham keislaman moderat harus dilakukan dalam satu tarikan napas dengan penguatan ideologi Pancasila. Demikian pula sebaliknya. Penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan dalam satu langkah dengan penguatan paham keislaman moderat. Dalam hal ini, praktik PAI di Madrasah-Pesantren di Pantura bisa ditempatkan sebagai potensi untuk menjadi *pilot project* bagi agenda pendidikan nasional yang sangat mendesak ini.

Dalam tulisan ini, corak Islam moderat dan proses moderasi beragama yang digali di lingkungan Madrasah-Pesantren (MP) mengambil interpretasi dan inspirasi dari pola keislaman dari strategi Walisongo. Tujuan kajian ini untuk memahami tipologi moderasi beragama berbasis *historical values* Walisongo dan Islam Nusantara pada Madrasah-Pesantren di Pantura Timur, Indonesia. Hal ini memiliki kontribusi pada pendidikan Islam yang moderat serta penanaman kedamaian dan toleransi generasi penerus bangsa. []

BAB II
PENDIDIKAN ISLAM DI TENGAH MODERASI BERAGAMA

A. Hakikat Pendidikan Islam

Esensi Pendidikan Islam acap kali didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membentuk manusia muslim berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena esensi pendidikan adalah perubahan.[1]Sebagaimana batasan yang diberikan oleh Musthofa dan Ally (1998),[2]pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal,peserta didik atau siswa –yang selanjutnya nanti Saya sebut murid– ke arah terbentuknya pribadi muslim.

Pendidikan sejatinya diharapkan menjadi institusi pembentuk manusia seutuhnya yang cerdas,berkarakter dan bermartabat. Dengan penekanan pada aspek "pewarisan", Zuharini, *et al.,* merumuskan definisi pendidikan Islam, adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan terjabarkan dalam Sunnah Rasul.[3]Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah bimbingan dari dan kepada seseorang agar berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Singkatnya, sebuah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin.

---

[1]Ihsan, Psikologi belajar (Tela'ah Pemikiran Imam Al Ghazali), (Semarang: NEED'S Press, 2012), 3

[2]Ahmad Musthofa dan Abdullah Ally, Sejarah Pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),

[3]Ihsan, Madrasah Berbasis Pesantren, (Jogjakarta: LkiS, 2020), 54

Muhtar Buchori, membedakan pengertian pendidikan Islam menjadi dua: (1)segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah murid. (2) Keseluruhan lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program dan kegiatan pendidikannya atas pandangan serta nilai-nilai Islam. Bila dicermati, dua pengertian tersebut merupakan satu kesatuan, yang pertama merujuk pada proses aktivitas atau kegiatan, sedang yang kedua merujuk pada lembaga di mana proses pendidikan itu berlangsung.

Sejatinya, konsepsi pendidikan Islam dibangun atas dasar metafisika, dimana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai subyek di muka bumi, berada dalam suatu rangkaian orientasi religius dan kerangka etis.Manusia adalah satu dari 3 hubungan piramida alam (*makrokosmos*/*al-'alam al-kabir),* manusia (*mikrokosmos/al-'alam as-saghir)* dan Allah sang pencipta (*metakosmos*).[4]Manusia berhak menjadi *khalifah* manakala mampu memahami, menerjemahkan dan menyatukan ketiganya dalam diri (*al-kawn al-jami'*), sehingga berpotensi menjadi manusia sempurna (*al-insan al-kamil*), baik secara *al-haqqiyah* dan *al-khalqiyyah*.[5]

Dengan cara berpikir ini, dunia pendidikan mesti berjalan seimbang. Tidak boleh ada pandangan yang menyatakan urusan

---

[4]Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought* [USA: State University of New York,1992], terjemahan Indonesia oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 71.

[5]Ibnu 'Arabi menyebut realitas serba mencakup manusia ini dalam bukunya *al-Kitab al-Jami'.* Kesempurnaan manusia disana merujuk kepada Adam yang eksistensinya merangkum keragaman hakikat yang tersebar di alam semesta. Ibnu 'Arabi menyatakan:

« ...فالعالم كله تفصيل آدموآدم هوالكتاب الجامع فهو للعالم كالروح من الجسد فالإنسان روح العالم والعالم الجسد»

Amatullah Armstrong menyatakan bahwa "*al-Kawn al-Ja>mi'* adalah ciptaan dan maujud serba meliputi. Manusia Paripurna adalah *al-kawn al-ja>mi'* karena dia menghimpun dalam dirinya segala sesuatu dalam Hakikat Ilahi dan segala sesuatu dalam kosmos. Dia adalah lokus manifestasi bagi Nama Serba meliputi (*al-ism al-jami'*), yakni Allah. Su'ad al-Hakim, *Al-Mu'jam as-Sufiy: al-Hikmat fi Hudud al-Kalimah* (Beirut: Dar an-Nadrah, tt.), 985-988; Amatullah Armstrong, *The Mystical Language of Islam* (Malaysia: AS Nordeen, 1995)

dunia tidak penting, karena dunia adalah ladang menuju akhirat.Ia merupakan tempat pengembaraan dan sarana menuju kepada Allah, bukan tempat untuk menetap dan bertempat tinggal.Keyakinan dan doktrin tauhid (ke-esaan Allah) seperti inilah yang mewarnai berbagai konsep dan praksis pendidikan Islam. Tauhid dalam pandangan Islam adalah landasan bagi seluruh perbuatan muslim, baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal. Kenyataan inilah yang menjadikan pendidikan Islam memiliki karakteristik khusus dibanding dengan pendidikan lain, karena pendidikan Islam bersumber ajaran yang transenden, yaitu wahyu. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang prosedur penyusunan konsepnya berdasarkan pengalaman dan spekulasi manusia. Meskipun demikian bukan berarti pendidikan Islam harus terpisah dari masyarakat, justru sebaliknya menyatu. Artinya pendidikan Islam harus menjadi bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi –terutama dari sudut implementasinya– harus berkembang dan sesuai dengan keadaan serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan esensi ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan li al-'alamin*.

Dalam pendidikan Islam, proses penghayatan sebenarnya terletak pada penerapan atas apa yang telah diajarkan dalam agama Islam itu sendiri, hal itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan Islam. Mempelajari kajian-kajian pendidikan Islam yang berbasis kesadaran Ketuhanan ini, belum tentu secara otomatis dapat menerapkannya. Pemahaman terhadap ajaran agama Islam tersebut sudah pasti baik dan sangat penting untuk dimiliki setiap murid. Namun pemahaman tersebut baru terjadi dalam pemikiran, belum tentu meresap ke dalam hati dan perasaan murid, oleh karena itu harus ada sebuah penanaman Ketahanan Ketuhanan kepada murid agar pendidikan Islam yang telah diajarkan guru dapat dipahami secara lebih maksimal.[6]Tentunya dengan pendidikan Islam yang

---

[6]Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).299

berbasis Ketahanan Ketuhanan tersebut, murid mampu menjaga diri dari perbuatan buruk, seperti melakukan kejahatan, kekejaman, dan kesewenang-wenangan.

Di sinilah letak pentingnya pendidikan Islam yang berbasis kesadaran Ketuhanan, yang realisasinya selain lebih mendekatkan diri kepada Allah, juga dapat menjaga, dan melindungi anak tidak jatuh dan menjadi manusia yang rendah serta hina. Pun mereka tidak akan tenggelam dalam perkataan maupun perbuatan keji. Penjagaan dan pembekalan seperti ini akan menjadikan anak "bersih" serta siap menerima kebaikan, berupa ucapan maupun perbuatan.

Menariknya, dengan pendidikan Islam berbasis Ketahanan Ketuhanan ini, mampu membantu anak untuk memahami dinamika dunia modern dengan keaneka ragamannya. Pada akhirnya, dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Satu hal yang sangat urgent dalam pendidikan Islam berbasis Ketahanan Ketuhanan, adalah bahwasannya murid nantinya akan memahami bahwa dalam kehidupan ini selalu ada campur tangan kehendak Tuhan. Jadi pengetahuan agama Islam akan benar-benar terpatri pada diri murid, sehingga murid mempunyai bekal agama yang cukup untuk terjun ke masyarakat kelak.

Pendidikan ketahanan ketuhanan adalah kemampuan seseorang untuk mengenal Tuhannya yang telah menciptakannya dari segumpal darah. Dengan mengenal Tuhannya, seseorang niscaya akan mengalami sukses dalam hidupnya bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Sebab ia akan mengawali segala sesuatu dengan nama (asma) Allah, menjalani sesuatu dengan perintah Allah, dan mengembalikan apa pun hasilnya kepada Allah.[7]

Dalam konteks pendidikan Islam, konsep Ketahanan Ketuhanan berusaha menjadikan murid lebih cerdas dalam beragama. Murid tidak

---

[7]Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 299

hanya menjalankan agama secara picik, eksklusif, dan fanatik buta. Tetapi mampu menghubungkan sesuatu yang bersifat lahiriah dengan ruh esensial dari setiap ajaran agama Islam. Dengan begitu, murid akan memahami ajaran Islam secara lengkap, baik wujud eksoteris maupun esoterisnya. Sebagai contoh: makna ajaran puasa untuk meningkatkan solidaritas teradap kaum duafa, tidak akan terlihat bila puasa hanya dipahami sebatas menahan lapar dan dahaga, tanpa memahami makna esensial dari ibadah puasa itusendiri.

B. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan yang hendak dicapai adalah lahirnya manusia yang utuh; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya; kognitif, afektif dan psikomotoriknya, sebagaimana ditemukan dalam teori *al-Ikhwan al-Safa*,[8] dan *al-Qabisi.*[9] Atau seperti yang diidealkan Imam Asy'ari, bahwa pendidikan mesti mengintegrasikan *tasdiq bi al-qalb, taqrir bi al-lisan wa 'amal bi al-arkan,*[10] atau seperti rumusan UNESCO *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.*

Pun secara konsepsi pendidikan Islam yang bertumpu pada dimensi etis-religius, dan menurut al-Ghazali menjadi ciri khas konsep pendidikan Islam, bukan berarti urusan dunia tidak penting. Tapi urusan dunia –dan segala kebahagiaannya– menjadi faktor suplementer guna mencapai kebahagiaan yang lebih utama dan abadi. Dan bertolak dari pengertian tersebut, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia sadar untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahannya, dan memperkaya diri dengan khazanah ilmu

[8]*Al-Ikhwan al-Safa* merumuskan tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkembangkan kepribadian Muslim yang mampu mengamalkan cita-citanya. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 226.

[9]Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad Illiful al-Qabisi merumuskan tujuan pendidikan adalah untuk mencapai makrifah ilmiah maupun amaliah. Lihat Muhammad Munir Sa'du al-Din, *al-Dirasah fi al-Tarikh al-Tarbiyah 'inda al-Muslimin,* (Beirut: al-Maqriniyah, 1995), 217.

[10]Abu> al-H{asan al-Ash'ari>, *al-Iba>nah 'an Us}u>l al-Diya>nah* (Kairo: Ida>rah al-Thibaah al-Muniriyah, tt), 32.

pengetahuan tanpa mengenal batas.Pula menyadari bahwa hakikat keseluruhan hidup dan kepemilikan ilmu pengetahuan, bersumber dari dan bermuara kepada Allah.[11]

Zakiah Daradjat memotret keutuhan tujuan pendidikan itu, sebagai *insan kamil*,[12] yaitu sosok manusia yang utuh jasmani dan rohani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Artinya pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat, serta senang mengamalkanajaran Islam, dapat mengambil manfaat dari alam semesta untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat. Dari rumusan tujuan yang masih bersifat umum, ideal dan abstrak ini selanjutnya Zakiyah Daradjat membagi tahapan dan tingkatan tujuan pendidikan menjadi: tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional.[13]

Pemahaman di atas mengimplikasikan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian materi untuk kepentingan manusia di dunia saja, seperti ideologi sekuler yang melandasi sistem dan praktik pendidikan di Barat. Dalam pandangan ideologi sekuler kehidupan di dunia, terpisah dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat.

---

[11]Muslih Usa (edt), Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan FFFakta (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 9

[12]Faktor-faktor kesempurnaan manusia tampak dalam (1) kejadian manusia dalam bentuk terbaik (*ahsanu taqwim*), (2) dicipta dengan kedua Tangan Allah (*khalaqtu bi yadayya*), sementara makhluk lain hanya dengan perintah "Kun" (jadilah!), (3) dicipta berdasarkan bentuk atau citra Allah (*ala surat Allah*), (4) ditiupkannya ru>h} Allah (*ruhullah*) kepadanya, serta (5) manusia merupakan puncak penciptaan dengan kesempurnaan yang semakin meningkat, semuanya itu telah menjadikannya makhluk yang paling representatif dan kualitatif mengemban tugas sebagai khalifah Allah (*khali>fatulla>h*), mewakili Allah pada tataran makhluk. Menyandang status sebagai khalifah Allah berarti bahwa hanya manusialah—dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya, atau dengan totalitasnya—yang dapat menguasai alam semesta, menjamin keharmonisan, dan sekaligus dalam pengertian sebaliknya, hanya manusialah yang mampu mengacaukan alam semesta.

[13]Ihsan,*Madrasah Berrbasis Pesantren*, 40

Hal ini berbeda dengan doktrin dan pandangan Islam yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, tujuan pendidikan Islam meniscayakan keterpaduan antara aspek jasmani dan rohani; antara kehidupan dunia dan akhirat (*li al-sa'adat al-darayn* – untuk kebahagiaan dunia dan akhirat); dan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif; dan antara kedudukannya sebagai *khalifah* Allah dan tugas sebagai hamba.

Bahkan, menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan Islam adalah tujuan hidup manusia itu sendiri.Tugas pendidikan adalah memelihara kehidupan manusia.Atas dasar pemahaman inilah, bagi Hasan Langgulung, kajian tentang pendidikan Islam harus melibatkan pemahaman tentang hakikat dan tujuan hidup manusia dalam pandangan Islam.

Dengan demikian hakikat dan tujuan pendidikan Islam, secara implisit bisa diketahui, bahwa konsep dasar sebagai acuan pembahasannya selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, dan berbagai pendapat ulama atau ahli pendidikan yang mendeduksi teks nas maupun hadis.

Atas dasar fakta tersebut, Zakiyah Daradjat, secara hirarkis menyebut landasan atau dasar pendidikan Islam adalah: Al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad*. *Ijtihad* sebagai landasan pendidikan Islam menjadi penting karena di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan konsep dan teori pendidikan yang bersifat operasional, hanya sekedar ide dan konsep dasar saja.Karena persoalan pendidikan selalu terkait dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat, maka dituntut lahirnya ide-ide cerdas untuk menyesuaikan dengan konteks agar pendidikan Islam selalu relevan dan kontekstual. Namun satu hal pasti, semua ide baru tersebut proses dan produknya harus tetap dalam bingkai sumber ajaran Islam.[14]

Sebagai objek kegiatan pendidikan Islam, maka berbagai rumusan tentang tujuan pendidikan Islam selalu diawali dengan kajian tentang hakikat atau fitrah manusia dalam perspektif Al-

---

[14]Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),19

Qur'an dan Hadis. Hal inilah yang kemudian membedakan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan yang dikem-bangkan dari filosofi dan kultur Barat yang sekuler. Dalam pandangan Islam manusia adalah entitas makhluk yang dikaruniai dengan berbagai potensi yang sempurna; jasmani dan rohani, jiwa dan akal, *nafs* dan *qolb*. Atas dasar keyakinan itulah maka konsep pendidikan Islam bersifat holistik–integral, dalam arti tidak dikotomis. Semua potensi yang ada pada manusia diposisikan sebagai kesatuan organis yang bersifat dinamis yang saling berinteraksi. Oleh karenanya, berbagai potensi kesempurnaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, harus mampu dirubah atau diwujudkan menjadi kesempurnaan aktual melalui kegiatan pendidikan.

Untuk sampai tahap holisttik-integral, semua civitas pendidikan tidak boleh memahami pendidikan hanya sebagai sebuah *wiridan* sistem yang berujung ijazah, akan tetapi mesti memperlakukan nilai tersebut sebagai sebuah "organisme" yang hidup, berkembang, dan mempengaruhi orang yang dihinggapi. Materi pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai pepatah suci yang hanya dihafalkan belaka, tapi benar-benar dipraktekkan dalam perilaku kongkrit. Pendidikan tidak dilaksanakan secara eksibisionistis atau minimalis.Pendidikan eksibisionistis menekankan pada sisi lahiriyah, status dan atribut pendidikan.Sementara pendidikan minimalis memiliki karakteristik utama sebagai identitas diri semata, *timbang ora*.

Dengan sinergitas komponen-komponen di atas, maka pendidikan akan menghasilkan *mutakharrijin* yang mampuber-relasi secara *intrapersonal*(hubungan antara diri sendiri), *interpersonal* (hubungan antara orang lain dengan lingkungan) dan *transpersonal* (hubungan dengan kekuatan tertinggi), sehingga layak disebut cerdas dan berkarakter.

C. Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang dikelola, dilaksanakan dan diperuntukkan bagi umat Islam, baik lembaga pendidikan Islam di luar sekolah dan di dalam sekolah. Merujuk pada bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, keberadaan lembaga atau institusi pendidikan Islam dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar: (1) sekolah Islam dan atau madrasah, (2) pesantren; dan (3) pendidikan nonformal.[15]

Madrasah atau Sekolah Islam adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar-mengajar[16] secara terpadu dan sistematis. Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa, ada guru, ada murid, ada jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, silabus, dan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran), ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.[17]

Sedangkan pesantren, menurut Ridlwan Nasir adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama.[18]Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan secara *indigenous* oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas), dan telah mengakar serta hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.[19]

[15]Ihsan, *Madrasah Berrbasis Pesantren*, 43

[16]W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 889.

[17]Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 35.

[18]Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80

[19]Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin,*Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Listafariska Putra, 2005), 5.

Adapun madrasahyang eksistensinya secara kelembagaan maupun sistem pembelajarannyatidak terikat pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional), dalam penyebutan sehari-hari –untuk membedakan dengan madrasah model pertama– lembaga ini menggunakan kata *diniyah* (secara harfiyah berarti keaagmaan). Lembaga inilah yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan Islam nonformal. Status kelembagaannnya, semuanya swasta. Dan secara struktural, madrasah jenis ini dikelola danatau dibawah pembinaan Departemen Agama.

Secara umum lembaga pendidikan Islam diformat dengan model dan gaya modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan tradisional atau konvensional sebelumnya. Bahkan, lembaga pendidikan Islam mencoba menawarkan bentuk sintesa baru yang mengkolaborasi antara tujuan pendidikan umum dengan tujuan pendidikan (agama) Islam yang sepadan.Bentuk sintesa ini kemudian diiringi dengan dukungan kualitas akademik, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sumber pendanaan yang kuat serta penciptaan lingkungan yang baik.

Dalam konteks buku ini, pembahasan mengenai sekolah Islam hanya uraian singkat. Sedangkan pembahasan terkait madrasah dan pesantren, akanlebih mendalam, sebagai berikut:

1. Madrasah

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya sekolah.Etimologis, kata madrasah berasal dari akar kata "*darasa*" yang berarti tempat duduk untuk belajar.Dalam perkembangannya kata madrasah tidak hanya diartikan sebagai sekolah namun juga meliputi pengertian perguruan (Perguruan Islam)[20].Istilah madrasah diambil dari akar kata *dars*, yang menunjuk pada mata pelajaran fikih; bentuk *verbal noun* (*masdar*) adalah *tadris* berarti

[20](Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2022)

mengajar fikih.Ulama fikih atau guru besar fikih disebut *mudarris,* dan kata *darasa* tanpa dilengkapi sebuah komplemen diartikan mengajarkan bidang studi fikih.

Madrasah atau Sekolah Islam adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar-mengajarsecara terpadu dan sistematis. Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa, ada guru, ada murid, ada jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, silabus, dan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran), ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.[21]

Dalam konteks Indonesia, Madrasah dan atau Sekolah Islam dewasa ini merupakan buah dari gagasan modernisasi Islam di Indonesia.Pembaruan pemikiran Islam dan pelaksanaan pendidikan Islam di tanah air tidak selalu sejalan lurus dengan cita-cita dan semangat ajaran Islam.Islam selain dipahami sebagai ajaran ritual dan sumber nilai, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia yang aktual, relevan dengan segala urusan manusia, termasuk di bidang pendidikan.[22]

Lahirnya madrasah dan sekolah-sekolah Islam telah menemukan momentumnya pada akhir abad ke-20. Meskipun pada awal abad tersebut, telah muncul beberapa model lembaga pendidikan Islam dengan format dan tampilan yang berbeda –untuk tidak mengatakan modern– dari karakteristik lembaga pendidikan Islam yang ada sebelumnya, misalnya lembaga pendidikan dibawah naungan organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'.[23]

Dalam bahasa operasionalnya, Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang

---

[21]Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Hara Wacana Yogya, 2001), 35

[22]Hujai A. Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 256-267

[23]Azumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2003), 71

berada di bawah naungan Kementerian Agama,[24]yang termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan ibtidaiyyah, tsanawiyyah, aliyah, muallimin, muallimat serta diniyyah. Dan dalam perkembangannnya, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tentang Madrasah Aliyah yang sekarang sudah dicabut, diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang intinya adalah satuan pendidikan formal di bawah Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam.

Dalam perkembangannnya, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tentang Madrasah Aliyah yang sekarang sudah dicabut, diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang intinya adalah satuan pendidikan formal di bawah Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam.

Sebagai subsistem pendidikan nasional, dalam wujud dan format kelembagaan seperti sekarang, madrasah sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan sesuai dengan konteks historisnya. Sebagai salah satu model pendidikan, keberadaan madrasah tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di nusantara. Sebagai media penyebaran agama (dakwah) maka model pendidikan ini memiliki kemiripan substansial dengan model pendidikan (agama) yang ada di kawasan Timur Tengah, tempat dimana Islam sebagai agama lahir dan bertumbuh kembang.

[24]Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80

Fakta inilah yang memposisikan madrasah pada awal berdirinya merupakan lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan ilmu agama. Fakta ini pulayang menyebabkan madrasah selalu identik dengan pendidikan Islam. Sehingga berbicara madrasah atau sejarah madrasah sesungguhnya berbicara ihwal pendidikan Islam.

Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah mengalami berbagai perubahan sistem pembelajaran maupun format kelembagaannya. Bahkan Steenbrink menyebutnya dengan istilah „perubahan besar" dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.[25] Madrasah mulai memasukkan materi umum dalam kurikulum madrasah, yang semula hanya kajian agama terutama al-Qur'an dan fikih. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, satu hal yang tidak berubah: madrasah tetap menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan meski menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil.

Meskipun antara sekolah dan madrasah secara yuridis sama, namun keduanya memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan itu karena tujuan yang berbeda, khususnya visi dan misi dalam konteks sejarah kelahirannya.Tujuan pendirian *madrasah* pada awal mula di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan.[26]Di samping untuk mencegah memudarnya semangat keagamaan akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda saat itu, madrasah juga sebagai jawaban atau respon menghadapi kolonialisme dan Kristen.[27]

---

[25]Karel A. Steenbrink,*Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES., 1974), xvi

[26]Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 192-193.

[27]Azumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid, xiv

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari modernisasi lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren, eksistensi madrasah dalam konteks dan arus besar sistem pendidikan nasional secara faktual menghadapi pilihan yang sulit, yaitu antara kebutuhan ideal keagamaan dan kebutuhan praktis keduniaan.

Dari perspektifkeagamaan, madrasah harus mampu memberi dan meningkatkan pemahaman murid terhadap ilmu agama dan kemampuan untuk mengamalkannya. Sementara dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dalam perspektif praktis keduniaan, madrasah dituntut mampu memberikan kompetensi kepada murid dalam memenuhi kebutuhannya, yang tidak sepenuhnya bisa dipecahkan dengan ilmu-ilmu agama. Meskipun secara normatif selalu dikatakan bahwa Islam sebagai agama telah sempurna dengan segala perangkat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan duniawi.

Faktanya, ilmu pengetahuan dan teknologi (ilmu umum) yang berkembang saat ini, yang sering dianggap tidak Islami hanya dikembangkan orang Barat (non Islam), nyatanya mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia. Pada titik inilah pendidikan Islam berada dalam posisi yang dilematis antara corak pendidikan pesantren dan corak pendidikan madrasah.

Mengapa? Karena sebagai lembaga pendidikan yang selain ingin mewujudkan "pendidikan agama Islam," juga "pendidikan menurut Islam," keduanya memiliki kelemahan. Kelemahan ini berangkat dari kurang memadahinya lembaga dan sistem pendidikan sebagai sarana bagi pendidikan Islam itu sendiri, sebab pendidikan Islam mencakup horizon yang lebih luas yang sering tidak bisa dicapai oleh lembaga pendidikan Islam.

2. Pesantren

Istilah pesantren pasti sudah dikenal oleh muslim di Indonesia. Kata pesantren menurut Prof. John berasal dari bahasa Tamil, santri yang berarti guru mengaji. C.C. Berg juga berpendapat bahwa istilah santri berasal dari kata *shastri* (bahasa India) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata *shastra*, yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.[28]

Berdasarkan konsep itu, dapat dipahami bahwa pesantren berasal dari India dan dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa, sistem tersebut kemudian diadopsi Islam. Sekarang, konsep pesantren dimaknai sebagai asrama dan tempat murid-murid mengaji, khususnya dengan tujuan meningkatkan kekuatan keagamaan (*religious power*)[29]Islam.

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan secara *indigenous* oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas) dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat(Ta'arifin 2005).[30]

---

[28]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 18.

[29]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 17.

[30]Ahmad Ta'arifindan Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005), 5

Karel A. Steenbrink mengutip pendapat Amir Hamzah, secara terminologi dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India.Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya mengaji bukanlah berasal dari istilah Arab melainkan dari India. Demikian juga istilah pondok, langgar di Jawa, surau di Minangkabau dan rangkang di Aceh bukanlah istilah Arab, tetapi dari istilah yang terdapat di India.[31]

Sebagai lembaga pendidikanIslam yang tertua di Indonesia, di pesantren biasanya ada kiai; santri; kegiatan membaca kitab kuning; ada pondokan atau asrama; dan terdapat masjid. Dari kompenen-komponen tersebut merupakan syarat disebut pesantren (Tafsir 2013). Secara terminologis pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Hasby Indra 2004).

KH. MA. Sahal Mahfudzmemberikan definisi pesantren yang dianggap lebih luas dan representative, setidaknya dalam konteks sosio-kultural-historis pada pesantren yang dipimpinnya. *Stressing* dan fokus penting yang perlu dicermati pada definisi KH. MA. Sahal Mahfudz adalah bahwa pesantren sebagai sistem, menjadi sumbu utama dan dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Islam. Bahkan, pesantren telah membentuk suatu sub kulturbaru,[32] yang secara sosiologis-antropologis dapat dikatakan

[31]Karel A. Steenbrink,*Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES., 1974), 20.

[32]Istilah "pesantren sebagai subkultur", juga ditulis dalam sebuah artikel khusus oleh Abdurrahman Wahid. Lihat: Dawam Raharjo *(peny) Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES,1985), 42.

sebagai masyarakat pesantren. Elaborasi lebih jauh terhadap pernyataan ini, bahwa apa yang disebut pesantren di sana bukan semata-mata wujud fisik tempat belajar agama, dengan perangkat bangunan, kitab kuning, santri dan kiainya, akan tetapi juga masyarakat luas yang tinggal di sekelilingnya dan membentuk pola hubungan budaya, sosial dan keagamaan.[33]

Kebudayaan masyarakat tersebut tak bisa dibantah memang dipengaruhi oleh dan di-*derivasi* dari pesantren.Artinya, masyarakat sekitar adalah "bagian dalam" dari masyarakat pesantren juga. Bahkan sangat mungkin menjadi sisi lain dari pesantren tertentu. Lebih lanjut, dalam pandangan yang lain, secara historis pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli *(indegenous cultura)* Indonesia.[34]

Di samping sebagai bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia yang khas,pesantren dalam berbagai variasinya merupakan pusat persemaian, pengamalan dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keislaman.[35](Abdullah 1995)Secara sederhana dapat dirumuskan, bahwa pesantren sebagai institusi, memiliki fungsi pendidikan, dakwah, kemasyarakatan dan bahkan perjuangan.[36]

Ada hal yang menonjol sebagai ciri khas yang dimiliki pesantren tradisional, yaitu hanya memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa arab; teknik pengajaran dengan metode *sorogan* danbandongonatau *weton.* Selain kedua metode tersebut, Mastuhu juga menyebut hafalan dan halaqah(Mastuhu 1994). Sistem madrasah dan klasikal diterapkan

---

[33]Ihsan, *Madrasah Berrbasis Pesantren*, 49

[34]Abdurrahman Shaleh, dkk. Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, dalam Ihsan, *Madrasah Berrbasis Pesantren*, 50

[35]Amin Abdullah, *Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 3

[36]Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan", dalam *Wolfgang Karcherd, dkk.* (Peny.), *Dinamika Pesantren,* (Jakarta: P3M, 1988), 88

untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengembangan *sorogan* dan *bandongan.*[37]

Gejala pengembangan metode pembelajaran pesantren tersebut, bisa dijumpai hampir di semua pesantren sekarang ini. Selain tetap menggunakan sistem *sorogan*, *bandongan*, hafalan dan halaqah, juga memakai sistem madrasah klasikal, dengan penjenjangan yang jelas. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien

Secara filosofis dan psikologis-paedagogis, pengembangan metode pembelajaran ini menjadi suatu tuntutan bahkan keniscayaan dengan pertimbangan animo santri yang datang dan heteroginitas latar belakang mereka sebelum memasuki sebuah pesantren.

Namun demikian, bukan berarti metode *sorogan* dan *bandongan* semakin tidak efektif.Sebaliknya metode tersebut secara didaktik-metodik dalam konteks pencapaian hasil belajar terbukti memiliki efektifitas dan signifikansi yang tinggi.Karena sistem ini memungkinkan seorang kiai atau guru untuk mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan santri dalam menguasai materi.Sedangkan efektifitas sistem *bandongan* terletak pada keperluan praktis pencapaian kuantitas dan percepatan kajian kitab.Selain itu, juga untuk tujuan kedekatan relasi santri dan kiai atau santri dan gurunya.Tentu tidak menutup mata, bahwa setiap metode memiliki kelemahan dan kekurangan.[38]

Sedangkan kurikulum pesantren secara mikro adalah kitab-kitab Islam klasik yang menjadi kajian utama.Dalam hal ini, juga dapat disebutkan kurikulum secara makro sebagai bidang keilmuan atau dalam bahasa yang mudah adalah tradisi keilmuan. Pembidangan dimaksud meliputi: membaca al-Qur'an, *fiqh* (hukum

[37]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosdakarya, 1992), 194.

[38]Ihsan, *Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yoyakarta: LKiS, 2020) 49.

Islam), *ushul fiqh* (pengetahuan tentang sumber-sumber dan sistem jurisprudensi Islam), hadis, adab atau (sastra Arab), tafsir, tauhid (teologi Islam), tarikh (sejarah Islam), tasawuf dan akhlak (etika Islam).

Untuk menempuh materi-materi tersebut, santri memerlukan kiai, guru yang berbobot dan diperlukan pula pendidikan yang lebih sistematis. Oleh karena itu, pesantren dalam mengejawantahkan proses pendidikan dan pembelajarannya, memiliki sistem khas yang membedakannya dengan sistem pendidikan dan pembelajaran yang lain. []

BAB III
KONSEP DAN GENEALOGI MODERASI BERAGAMA

A. Konsep Moderasi Beragama

Merujuk pada *The Classical Theory of Concepts—nya Aristoteles, m*embincangkan moderasi beragama –dalam hal ini Islam– bukanlah sesuatu yang mudah, sebab Islam telah berubah menjadi sebuah sistem yang *multifaces*[1] dan bercampur aduk antara urusan ketuhanan yang sakral dengan kepentingan manusia yang profan. Jika meminjam istilahnya W.C. Smith, ada koneksi Islam sebagai keyakinan dan tradisi yang bertali-temali sehingga sulit dicari garis batasnya.[2]

Karena itu, moderasi membutuhkan *clear and distinct* dari dua arah: subyek dan obyek. Sebagai subyek, kita membutuhkan jarak agar akurasi dan obyektifitasnya terjamin. Namun dalam kasus agama, hal ini tidaklah mudah, karena secara psikis seseorang cenderung

---

[1]Amin Abdullah, "Pengantar" dalam *Metodologi Studi Islam,* Ahmad Norma Permata [ed all], (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), 1

[2]Definisi tentang Islam saja mengalami proses pemuaian, perkembangan dan perubahan, sesuai tingkat pemahaman masyarakatnya. Pada saat ini, tentu saja, kata-kata "al-Islam" telah menjadi nama sebuah agama, khususnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Tapi, secara generik, "Islam" bukanlah nama dalam arti kata sebagai nama jenis atau sebuah *proper noun*. Dan ini melibatkan pengertian tentang istilah itu yang lebih mendalam, yang justru banyak diketemukan dalam kitab suci. Perkataan itu, sebagai kata benda verbal yang aktif, mengandung pengertian sikap pada sesuatu, dalam hal ini sikap pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sikap itulah yang disebutkan sebagai sikap keagamaan yang benar dan diterima Tuhan: "Sesungguhnya agama bagi Allah ialah sikap pasrah pada-Nya (al-Islam) (QS. Al-Imran 3:19). Maka selain dapat diartikan sebagai nama sebuah agama, yaitu agama Islam, perkataan al-Islam dalam firman ini bisa diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, yaitu "pasrah kepada Tuhan," suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar. Uraian lebih lengkap, baca: Nur Kholish Majid, "Islam, Iman Dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Budhy Munawar Rahman, et. All (Jakarta: Paramadina, 1994).

memasukkan segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya –seperti simbol-simbol yang mencerminkan dunia di sekitarnya, norma, agama, budaya, kehidupan sosial, serta perilaku orang yang akrab dengannya– ke dalam sistem gejala kejiwaannya. Proses internalisasi pengalaman ini kemudian mempengaruhinya dengan cara tertentu ketika memahami, merasa, berpikir dan berbuat.[3]

Di tingkat objek, perlu distingsi apakah moderasi ini level norma Islam, atau perilaku pemeluknya.[4] Sebab antara substansi ajaran dan perilaku pemeluknya adalah dua hal yang berbeda, meskipun tidak boleh dipisahkan. Karena Islam merupakan kesatuan antara idea dengan fakta, atau antara ajaran dengan kenyataan, baik dalam gejala kejiwaan,[5] perilaku perorangan,[6] ataupun kehidupan bermasyarakat.[7]

Di level pemeluknya juga perlu dipilah kembali, apakah yang abstrak atau yang kongkrit;[8] apakah pada *inward experience* (persoalan yang bersifat batiniah yang tidak dapat dikomunikasikan),[9]

---

[3]Vinacke, *The Psycholgy of Thinking* (Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc, 1992), 285.

[4]Untuk itu, agaknya perlu dibedakan antara studi ajaran Islam dan studi Islam. Studi jenis pertama bermaksud mengurai, menerangkan, menjabarkan dan mungkin pula menjelaskan kata atau proposisi yang tidak jelas. Unsur pokok studi ini adalah memposisikan Islam sebagai "subyek" yang dipersilahkan untuk menjelaskandirinya. Sedangkan studi Islam lebih menempatkan Islam sebagai "obyek" kajian dan analisis. Sebagai obyek, maka ia dapat diposisikan menjadi sasaran kegiatan. Konotasi obyek dalam posisi ini tidak selalu harus difungsikan sebagai pihak atau unsur yang pasif semata, melainkan lebih dipandang dalam kaitannya dengan kegiatan ilmu. Lebih dari itu, terminologi Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran atau wahyu Tuhan semata, melainkan juga dengan berbagai bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam terapan* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 119.

[5]Terminologi gejala kejiwaan belum ditemukan dalam literatur klasik Islam, namun fakta yang dapat dikonsepkan menjadi gejala ini jelas terkandung dalam keberagamaan pemeluk ajaran Nabi Muhamad saw. Oleh karena itu, iman dirumuskan memiliki unsur-unsur pembenaran dengan hati, pernyataannya dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Lihat: al-Syahrastany, *Kitab al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, t.t.) 111.

[6]Dalam rumusan Imam al-Asy'ary yang dikemukakan oleh al-Syahrastany di atas ini tidak secara eksplisit disebut perilaku perorangan. Akan tetapi, rumusan unsur iman dalam bentuk perbuatan anggota badan tentu juga menunjuk unsur ini.

[7]Teori kehidupan kelompok sebagai bagian integral keberagamaan cukup terkenal dalam tulisan sarjana Barat. Terminologi yang dipakai adalah pengalaman keagamaan. Lihat: Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, (New York: Columbia University Press, 1925), 27-60.

[8]Abdullah, *Studi Agama, 23.*

[9]Dalam perkembangannya, sesuatu yang dianggap batiniyyah juga menjadi wilayah

atau *outward behaviour* (yang merupakan manifestasi eksternal Islam yang dapat diamati dan dikomunikasikan).[10]

Inward experience adalah agama subyektif, sedang *outward behaviour* adalah agama obyektif dan agama simbolik.[11] Agama sebagai kenyataan subyektif merupakan kerinduan dan kepasrahan ruhani kepada Yang Mutlak, tempat seluruh yang nisbi mempertaruhkan diri. Agama dalam kategori ini adalah pembawaan yang azali, fitri, dan sangat pribadi.

Outward behaviour sebagai kasunyatan obyektif bentuk konkretnya adalah akhlak karimah, yakni realitas kehidupan manusia yang agung. Dalam konteks kehidupan manusia individu, akhlak karimah muaranya adalah "kejujuran," sedang pada konteks kehidupan manusia sosial, akhlak karimah bermuara pada "keadilan". Sebagai kasunyatan obyektif agama dalam kategori ini bersifat terbuka, tidak

---

ilmu. Karl Popper telah memulainya dengan mengajukan *Realisme Metafisis.* Menurutnya, ada kebenaran metafisis yang objektif-universal sebagaimana ada dalam dunia fisis.Yang masuk dalam kategori metafisis Popper adalah (1) dunia non fisik, dan (2) dunia otonom dan objektif dalam arti di luar posisi pengamat. Dan menurut Popper, kebenaran semacam ini berada di luar kawasan ilmu, tetapi bisa melahirkan ilmu, dan bersifat *untestable truth*. Karl R. Popper, *Conjectures and Refutations* (London: Routledge and Kegan Paul, 1972), 273-290.

[10]Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition" dalam Leonard Rindei (ed). *The Study of Middle East* (New York: John Wiley & Sons, 1976), 32.

[11]Dalam terminologi lain yang populer di kalangan umat Islam, agama subyektif adalah akidah, agama obyektif adalah akhlak, dan agama simbolik disebut syari'at. Akidah merupakan *sangkan*, akhlak menjadi *paran*, sementara syari'at adalah jalan yang dengannya azas ditransformasikan menjadi tujuan. Istilah lain yang hampir sama adalah iman, Islam dan ihsan. Berdasarkan sebuah hadits yang terkenal, ketiga istilah itu memberi umat Islam (Sunni) ide tentang rukun Iman yang enam, Rukun Islam yang lima dan ajaran tentang penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Hadir dalam hidup. Dalam penglihatan itu terkesan adanya semacam kompartemen-talisasi antara pengertian masing-masing istilah itu, seolah-olah setiap satu dari ketiga noktah itu dapat dipahami secara tersendiri, dapat bentuk sangkutan tertentu dengan yang lain. Sudah tentu hakikatnya tidaklah demikian. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam (al-Islam) tidak absah tanpa iman (al-iman), dan iman tidak sempurna tanpa ihsan (al-ihsan). Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, ternyata pengertian antara ketiga istilah itu terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang-tindih sehingga setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian inilah iman, Islam dan ihsan sebagai trilogi ajaran Ilahi. Kholish Majid, "Islam, Iman Dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Budhy Munawar Rahman, et. All (Jakarta: Paramadina, 1994).

mengenal batasan kesukuan, ras, bahasa dan lain sebagainya. Agama pada level ini, agama sebagai akhlak karimah, adalah jiwa.

Outward behavior sebagai agama simbolik, sesuai dengan makam dan sebutannya, agama pada level ini bukan agama hakiki (*dhatiy*), melainkan agama nisbi (*nisbiy*), yang kehadirannya semata-mata karena tuntutan agama hakiki, agama subyektif-obyektif tadi. Kalau agama subyektif-obyektif adalah ruh dan jiwa, maka agama simbolik ini adalah raganya.

Setelah melakukan ada kejelasan subyek dan objek moderasi, barulah kita bisa masuk dalam ranah konsep moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara [12]

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai "pilihan terbaik". Ibnu Faris secara khsuus mendefinisikan *wasatiyah* sebagai susuatu yang menunjukan pada keadilan dan tengah-tengah.[13]

Apa pun bahasa yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata wasith

[12]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, 384.

[13]Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),108

bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata wasath itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau t*atharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme, radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata extreme juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya". Setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme,* yaitu *al-guluw,* dan *tasyaddud*. Meski kata tasyaddud secara harfiyah tidak di sebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata syadid, syidad, dan asyadd. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari extreme atau tasyaddud. Dalam konteks beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.[14]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Sementara kata ekstrem didefinisikan sebagai "paling ujung, paling tinggi, dan paling keras".[15]

---

[14]Tim Balitbang Kemenag RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Baltbang, 2019), 18
[15]https://kbbi.web.id/moderasi

Sedangkan beragama diambil dari kata dasar agama yang diberi awalan ber. Dalam bahasa Indonesia, awalan ini berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk tidak memiliki objek (intransitif), tetapi dapat memiliki pelengkap atau keterangan. Sedangkan kata agama, Imam al-Ra>zi mendefinisikan agama sebagai sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang untuk mengikutinya sesuai pilihan sendiri guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat.[16] Agama merupakan sistem kepercayaan dan doktrin spiritual terhadap realitas tertinggi yang sering disebut sebagai *Universal Rite.*[17] William James menyebut *the religion is the felling, act and experiences of individual men in their solitude so far as they apprehend theme selves to the devine.*[18] Sementara itu Smart menyatakan bahwa agama adalah seperangkat ritual terlembaga yang mengekspresikan sentimen sakral pada fokus Ilahi atau trans-Ilahi.[19]

Penelitian Armstrong menyimpulkan bahwa agama-agama besar, seperti monoteisme Yahudi, Kristen, Islam, Budha, Hindu, Kong Hu Cu, Taoisme, bahkan rasionalisme Eropa (700-200 SM), memiliki banyak kesamaan. Semuanya berdasar pada wahyu dan tradisi lama untuk membangun konsep tentang Zat transenden dan universal dengan misi mempertajam spiritualitas dan pengembangan kasih sayang (*They all built on the old tradition to evolve the idea of a single, universal transcendence; they cultivated an internalized spirituality, and stressed the importance of practical compassion).*[20]

---

[16]Fakhruddin al-Ra>zi, *Mafa>tih al-Ghayb,* vol. XIX (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 338

[17]Wallace, *Religion An Antropological View,* (New York: Random House, 1966), 102.

[18]William James, *The Variaties of Religious Experience: A Study in Human Nature* (Toronto: Longman Green and Co, 1925), 31

[19]Walaupun wacana tentang agama mewujud menjadi tradisi dan budaya tetap menjadi dan mengundang konflik dalam memahaminya. Lihat juga: Ninian Smart, *Batas-Batas Studi Agama Ilmiah,* Dalam Ahmad Norma Permata, (Ed) *Metodologi Studi Agama,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), 153

[20]Karen Armstrong*, The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christiany and Islam*, (London: Harper Collins Publishers, 2000), xii – xiii.

Secara umum, unsur-unsur pembentuk sebuah agama, sebagaimana diyakini Koentjaraningrat, adalah lima komponen, yaitu : (1) Emosi keagamaan, (2) Sistem keyakinan, (3) Sistem ritus dan upacara (4) Peralatan ritus dan upacara dan (5) Umat beragama.[21] Senada dengan itu, Bustanuddin juga menyebut lima kompenen, yakni: [22]

1. Kepercayaan kepada kekuatan gaib

    Kepercayaan keagamaan dipusatkan atau didasarkan pada adanya kekuatan gaib, yaitu Tuhan yang super natural, atau yang ada di balik alam fisik (metafisik). Oleh karena itu, agama sebagaimana yang biasa dipahami, adalah pandangan dan prinsip hidup yang didasarkan kepada kepercayaan adanya kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

2. Sakralitas

    Dalam kehidupan agama, ditemukan sikap mensakralkan sesuatu, baik tempat, buku, orang, benda tertentu, dan sebagainya. Sakral mempunyai arti *suci,* istilah yang berpasangan dengan profan, atau yang *biasa-biasa saja, alamiah.* Kitab al-Qur'an, bulan Ramadhan, hari Jum'at, Ka'bah, Makam para Nabi dan Wali adalah sederetan sesuatu yang dianggap suci di kalangan orang Islam. Demikian pula salib, gereja, hari natal, Kitab Bibel merupakan sesuatu yang sakral bagi orang Nasrani.

3. Ritual

    Dalam agama, terdapat ritual upacara atau ritus untuk mensakralkan sesuatu. Upacara tersebut tidak dapat dimengerti

[21]Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Bina Cipta, 2000), 80

[22]Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 61

secara ekonomi dan rasional. Dalam berhaji misalnya tidak dapat dipahami keuntungan dan alasan rasional apa, sehingga harus melakukan ibadah tersebut. Upacara ritual ini biasanya dikenal dengan ibadat, kebaktian, berdoa atau sembahyang. Setiap agama mengajarkan berbagai macam ibadah, doa' dan bacaan-bacaan pada momen-momen tertentu yang dalam agama Islam misalnya dinamakan dengan dzikir. [23]

4. Umat Beragama

Agama tidak akan ada, tanpa ummat beragama yang memeluknya. Komunitas beragama terdiri dari berbagai komponen fungsi. Ada yang menjadi pemimpin, penyampai ajaran (da'i, missionaries, zending) dan ummat beragama. Memercayai adanya kekuatan gaib yang berpengaruh dalam kehidupan manusia dimiliki oleh banyak orang. Adanya kesamaan kepercayaan kepada wujud atau kekuatan gaib akan menjadi perekat dalam komunitas ummat yang memercayainya.Kesatuan masyarakat primitif dan ummat beregama diikat oleh adanya keyakinan atau keimanan keagamaan.[24]

5. Mistisisme dan Kebatinan

Mistisisme merupakan aspek ruhaniah dalam agama. Mistisisme berarti bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin didapatkan melalui meditasi dan perenungan spiritual, tidak melalui pikiran dan tanggapan pancaindera. Mistik adalah aspek esoteris dari penghayatan seseorang atau suatu organisasi yang disebabkan oleh ketaatan spiritual. Seangkan aspek eksoterisnya adalah peribadatan. [25]

---

[23]Malefijt, *Religion and Culture* (New York and London: The Macmillan Company and Collier Mc Milland, 1968), 190-191

[24]*Ibid*, 105-106

[25]A.S. Horby, *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford

Pengalaman ruhaniah atau mistik didapatkan dari ajaran agama melalui berbagai macam latihan, *riyāḍah*, serta ibadah. Ajaran agama yang mencakup juga masalah aktivitas kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, juga mengajarkan bahwa pendekatan rasa dan ruhaniah hendaknya dihayati, dirasakan dan dialami oleh penganut agama dalam aktivitas kemasyarakatan tersebut.

Pengalaman dan pendekatan batin pada umumnya tidak dirasakan oleh penganut agama yang awam yang hanya melaksanakan ajaran agama secara awam, hanya dari aspek hukum (formal) saja. Ketika kehausan kepada pengalaman batin ini memuncak, mereka memasuki aliran tarekat yang sengaja dikembangkan oleh pendirinya untuk mencapai pengalaman batin tertinggi dengan melalui cara-cara riyadloh (latihan ruhani) yang kebanyakan tidak diajarkan oleh syari'at. Akan tetapi, mereka menciptakanya sendiri atau meniru dari agama atau aliran lainya.

Dalam konteks ini perlu dibedakan antara agama dan beragama, namun tidak boleh dipisahkan. Agama adalah sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk mengikuti peraturan tersebut sesuai dengan kehendak dan pilihannya sendiri, guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan keberagamaan merupakan respon manusia terhadap agama dalam konteks ruang, waktu dan kondisi psiko-sosio-kulturalnya. Dengan demikian, berbeda dengan agama yang bersifat universal, keberagamaan bersifat lokal dan temporal.[26]

Penggabungan dua kata, moderasi dan beragama akan memunculkan pemahaman baru dengan karakteristik baru yang sampai sekarang masing-masing pihak mengajukan konsepsinya

---

University Press, 1984), 559.

[26]Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan; Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 260-261; Ninian Smart, "Batas-Batas Studi Agama", dalam Ahmad Norma Permata, (Ed) *Metodologi Studi Agama,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), 153

dengan terminology yang hampir sama, seperti Islam Madzhab Tengah yang digagas Tarmizi Taher. Moderasi beragama secara subtantif dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Dalam kasus Islam, pemahaman tersebut Kembali pada legitimasi Al-Qur'an dan hadis Nabi bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang moderat, karena intisari ajaran Islam adalah *wasathiyah*. Baik di dalam ibadah (Q.S. Al-Isra/17:110), dalam perilaku soial (Q.S. AL-Rahman/55:7), dalam perilaku ekonomi (Q.S. Al-Isra/17:29; Q.S. Al-Furqan/25:67), maupun sebagai komunitas (Q.S. A-Baqarah/2:143). Dan Nabi Muhammad SAW, pun mengecam orang yang ekstrem dalam beragama.[27] Di sinilah istilah moderat menemukan akarnya di dalam tradisi Islam.[28]

Mengingat moderasi beragama terkait dengan perilaku riil yang membentang dari level privat sampapi publik, tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumbersumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

[27]Nabi Muhammad SAW, pun mengecam orang yang ekstrem dalam beragama, "Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama." M. Kholid Syeirazi, Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam (Yogyakarta: Alif.id, 2020), 133.

[28]Sauqi Futaki, *Konstruksi moderasi (Wasathiyyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam,* (Surabaya: UNISDA, 2018), 522

Sampai pada level ini sangat dimungkinkan ada variasi pemahaman. Menyikapi ragam konsep yang mungkin terjadi, yang kita perlukan bukan memposisikan memposisikan secara diametral, akan tetapi bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang ditawarkan, apakah tawaran tersebut akan membawa dunia semakin damai atau semakin panas, apakah tawaran tersebut laku dijual ke publik atau tidak. Dengan uji praktis ini, maka pertentangan tidak diperlukan lagi, karena uji validitasnya menggunakan pragmatis dan korespondensi, bukan normatif lagi.

Dengan cara ini pula, terbuka peluang untuk menyingkap, memaknai dan melaksanakan agama sesuai konteks masa kini. Yang perlu dicatat adalah bahwa cara pikir ini menuntut hadirnya *epistemology holistic* yang mengakomodasi aspek rasional, empiris, dan intuitif yang senantiasa didialogkan secara sirkular, sesuai dengan objeknya, baik materiil ataupun formil. Point ini perlu mendapat catatan tersendiri mengingat paradigma humanisme-sekuler telah mereduksi realitas-ontologis kepada hal yang bersifat fisik semata. Mereka membangun dunia dengan merujuk secara utuh kepada *logos. Logos* tentunya penting dalam kehidupan, karena ia merupakan pemikiran rasional, pragmatis dan *scientific* yang memungkinkan umat manusia berfungsi dengan baik dalam kehidupan dunia. Namun *logos* juga memiliki keterbatasan karena ia tidak mampu mengurangi kesedihan dan kepedihan penderitaan manusia. Argumen rasional tidak mampu memahami (*make no sense*) terhadap tragedi, sebagaimana pula ia tidak mampu menjawab pertanyaan tentang nilai akhir kehidupan manusia. Dengan demikian, yang dibutuhkan sekarang adalah sikap eklektik dan terbuka, bukan sikap dogmatis yang apatis terhadap dinamika moderasi.

B. Akar Genealogis

Dalak konteks Indonesia, akar genealogis moderasi dapat kita temukan dalam banyak literatur, antara lain dalam Kakawin

Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Secara umum, ditemukan fakta bahwa masyarakat Nusantara tidak pernah ada persoalan dengan agama dan Tuhan. Sumber otoritatif Narwaci yang ditulis pada permulaaan abad ke-17 menyebutkan bahwa Tuhan adalah keseluruhan alam yang dilambangkan dengan makhluk yang sangat kecil sehingga sewaktu-waktu dapat masuk ke sanubari orang. Pada saat yang sama, Tuhan sekaligus maha besar dan luas seperti samudera, tidak berujung juga tidak berpangkal seperti angkasa, dan terdiri dari semua warna yang ada di dunia. Dengan perspektif ini, manusia Nusantara akan toleran dengan semua agama.[29]

Dalam konteks moderasi Islam, akar genealogisnya merujuk pada moderasi walisongo. Sebagai sebuah *term*, arti Wali Sanga masih diperdebatkan. Suatu pendapat menyatakan, kata *'wali'* diserap dari bahasa Arab berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin; sedangkan *'sanga'* bermakna sembilan. Dengan demikian, Wali Sanga adalah wali yang jumlahnya sembilan. Perlu dicatat bahwa bilangan sembilan dalam alam pikiran Jawa adalah bilangan paling tinggi, bilangan "keramat". Pendapat lain menyebutkan bahwa kata *sanga* berasal dari kata dalam bahasa Arab *'tsana'* yang berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata *sana* berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Dengan merangkum berbagai penafsiran di atas, Ensiklopedi Islam mendefinisikan Wali Sanga sebagai sembilan wali yang dianggap dekat dengan Allah SWT, terus menerus beribadah kepada-Nya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. [30]

Meskipun mereka tidak hidup sezaman, tetapi masing-masing mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Penentuan wilayah dakwah tersebut tampaknya dengan mempertimbangkan pula faktor

---

[29]SantosoSantoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana,* New Delhi: International Academy of Culture,1975, 578.

[30]Agus Sunyoto, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan* (Jakarta: Transpustaka, 2011), 33;. Hasan Muarif Ambary, *Menemukam Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia, (*Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998}, 55.

geostrategi yang sesuai dengan kondisi zamannya. Kemungkinan mereka memilih pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan di Nusantara pada saat itu. Sebagai pusat perniagaan, tentunya Jawa banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Jawa, sehingga diharapkan para pedagang inilah yang nantinya akan menyebarkan ajaran Islam di daerah asal mereka. [31]

Formasi penempatan Wali Sanga ini mengambil pola 5:3:1. Jawa Timur mendapat perhatian besar dari para wali. Di sini bertempat lima orang wali, dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim, sebagai wali perintis, mengambil wilayah Gresik. Setelah beliau wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di Surabaya. Sunan Bonang di Tuban, sedangkan Sunan Drajat di Sedayu. Kelima tempat para wali tersebut adalah "kota bandar" atau pelabuhan. Pengambilan wilayah pantai ini adalah ciri Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh para *da'i* yang berprofesi sebagai pedagang.[32]

Di Jawa Tengah para wali mengambil posisi di Demak, Kudus dan Muria. Penempatan para wali di Demak, Kudus dan Muria ternyata tidak hanya ditujukan untuk penyebaran Islam di Jawa Tengah semata, tetapi untuk kawasan Indonesia Tengah seluruhnya. Saat itu, pusat kekuatan politik dan ekonomi memang sedang beralih ke Jawa Tengah setelah Majapahit goyah akibat serangan Kediri pada tahun 1478.

Di Jawa Barat, proses Islamisasi hanya ditangani seorang wali, yakni Syarif Hidayatullah, yang setelah wafat dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Barangkali karena pada saat itu, penyebaran ajaran Islam di wilayah Indonesia Barat, terutama di Sumatera

---

[31]Agus Sunyata, *Atlas Walisanga,* (Depok, Pustaka Iman, 2017), 46

[32]Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (*Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1981), 177-178.

dapat dikatakan telah merata bila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia Timur. Seperti sekarang hal yang semacam itu masih dapat kita saksikan kenyataannya.

Adapun pemilihan Kota Cirebon sebagai pusat aktifitas dakwah Sunan Gunung Jati, tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur, ataupun ke Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial, politik dan ekonomi saat itu, mempunyai nilai geostrategis, geopolitik dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. [33]

Dengan latar belakang tersebut, maka tidak ada syak lagi bahwa Pulau Jawa kaya dengan tempat-tempat yang bernuansa sejarah dan religius. Sejarah Wali Sanga bukanlah sejarah lokal, melainkan sejarah internasional, karena juga ada kontak dengan Gujarat, Cina, Persia, dan Arab. Sementara nuansa religiusnya dapat dirasakan sampai saat ini dengan ditandai oleh ritual masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan pola yang dikembangkan oleh Wali Sanga. Mereka adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya.

Sebagian literatur bahkan menyebutkan bahwa yang dibawa Wali Sanga bukan hanya masalah keagamaan, melainkan juga perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Oleh karena itu, di Jawa ada banyak tempat (situs) berupa bangunan ataupun tempat ibadah yang bernilai historis tinggi, sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. Terkait dengan modrasi, Walisongo melakukan dakwah dengan cara cara moderat. Antara lain dilakukan dengan:

---

[33]Hasan Mu'arif Ambari. Peranan Cirebon Sebagai Pusat Perkembangan Dan Penyebaran Islam. Dalam Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. (Jakarta : CV. Defit Prima Karya. 1996.), 38. Lihat M. Sanggupi Bochari dan Wiwi Kuswiyah. *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*., *op., cit.*, hlm. 38-39. Lihat juga *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Dan Nilai Tradisional. (Jakarta : Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996} 38.

a. Wayang

Setelah agama Hindhu, Budha dan Islam masuk ke Jawa, wayang menjadi salah satu alat untuk menyebarkan agama. Seperti diketahui, Walisongo, khususnya Sunan Kalijaga adalah penggubah "WayangBeber" menjadi "Wayang Purwa". Wayang Beber merupakan warisan dari "Wayang Wwang" agama Kapitayan yang digunakan sebagai ritual *ruwatan*. Oleh para Wali, Wayang Beber ini digubah menjadi Wayang Purwa melalui prinsip-prinsip Islam. Karena pada era Hindu-Budha, wayang menjadi media dakwah mistik melalui epos *Ramayana* dan *Mahabharata*, maka Walisongo mendakwahkan tasawuf melalui karya seni adiluhung ini. Sunan Kalijaga misalnya, menggubah epos *Nawa Ruci* dalam *Mahabharata* Hindu, menjadi *Dewa Ruci*, di mana Bima Sakti bertransformasi menjadi Bima Suci melalui proses martabat tujuh (*maratib al-sab'ah*) model sufi al-Burhan puri. Prinsip sufistik ini merujuk pada peniadaan keakuan agar bias menemukan kebenaran Ilahiah.[34]

Dalam proses ini, proses moderasi berjalan dengan memodifikasinya: (1) Penambahan tokoh Hyang Tunggal yang abstrak tak berwujud sebagai Tuhan monoteistik yang menciptakan dewa Hyang Manikmaya (Batara Guru) dan Hyang Ismaya (Semar), (2) Penempatan silsilah dewa dalam jalur keturunan para nabi misalnya Hyang Rasa, Hyang Weang, Batara Sambu serta Manikmaya yang merupakan keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Syis, (3) Pengubahan praktik poliandri Dewi Drupadi yang bersuami lima Pandawa, menjadi monogami di mana Drupadi hanya bersuami Yudistira, (4) Keberadaan *Jimat Kalimosodo* (kalimat syahadat) yang mampu mengalahkan kekuatan dewa-dewa Hindu.[35]

---

[34]R. Hardjowirogo. *Sedjarah Wajang Purwa* (Jakarta: Balai Pustaka. 1953), 20-25.

[35]Holt, C. *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia* (Bandung: Penerbit Artline. 2000). 20.

b. Seni Gamelan dan Tembang

Seni musik gamelan dan lagu tembang yang biasanya memang lekat dengan kepercayaan Jawa zaman dulu juga menjadi salah satu media untuk menyebarkan agama Islam. Hanya saja, lagu tembang yang diciptakan tentu berbeda dengan tembang lain karena disisipi dengan ajaran Islam.[36]

Setidaknya ada 11 Tembang yang diyakini hasil kreasi Walisanga. Yakni:

1) *Maskumambang* menjadi pertanda dimulainya kehidupan manusia di sunia . Tembang Maskumambang ini member gambaran tentang janin dalam kandungan ibu ketika sedang hamil. Arti dari pada Maskumambang sendiri banyak yang memaknai sebagai emas yang terapung (emas kumambang).

2) *Mijil merupakan* kehadiran di dunia ini yang digambarkan oleh tembang Macapat yaitu tembang Mijil yang artinya sama dengan wijil yaitu keluar dari perut ibu.

3) *Kinanthi,* dalam filosofi tembang Kinanthi ini adalah masa di mana seseorang anak sedang dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya supaya dapat menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

4) *Sinom* berasal dari kata enom yang artinya muda, masa muda ini digunakan untuk menuntut ilmu, mencari teman dan mencari jati diri.

5) *Asmarandana* menggambarkan gejolak asmara di kehidupan manusia. Masa ini dimulai saat manusia mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis yaitu saat remaja.

6) *Gambuh* dapat diartikan jumbuh yaitu cocok atau sepaham, menggambarkan babak baru dalam kehidupan manusia yaitu manusia masa-masa pernikahan.

---

[36]Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). 77

7) *Dhandhanggula* menggambarkan proses suka duka dalam berumah tangga yang harus dilewati bersama-sama mulai mapan dalam berkeluarga dan dapat mencukupi kebutuhan hidup sekeluarga.

8) *Durma berasal* dari kata derma yang artinya member rejeki kepada orang lain. Saat segala kebutuhan sudah tercukupi dan sudah tidak ada kekurangan apapun. Manusia mulai memikirkan untuk berbagi rejeki kepada orang lain. Namun tak jarang setelah merasa cukup dia malah bersikap sombong dan angkuh.

9) *Pangkur* berasal dari kata mungkur (mundur/mungkur), manusia mulai mundur dari nafsu duniawi dan mulai memikirkan kehidupan setelah meninggal nanti. Setelah semua kebutuhan di dunia terpenuhi giliran manusia mencari bekal untuk kehidupan yang abadi kelak.

10) *Megatruh* adalah tembang Macapat yang menggambarkan manusia saat sakaratul maut. Megat berarti berpisah, ruh artinya nyawa. Berpisah antara jiwa raga dan kembali ke asalnya.

11) *Pocung,* badan yang telah ditinggalkan oleh ruhnya kemudian disucikan sebelum dikembalikan ke tanah. Jasat kemudian dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan disebut pocong. Tembang Macapat Pocung adalah tembung yang mengingatkan kita akan kematian.Tembang ini menjadi yang terakhir dari sebelas tembang macapat.

3. Perayaan dan Adat

Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menyukai perayaan apalagi jika diiringi dengan musik gamelan. Karena itulah para wali kemudian menyelenggarakan Sekaten dan Grebeg Maulud yang diselenggarakan pada hari lahir Nabi Muhammad SAW.

Dalam perayaan ini, gamelan diperdengarkan untuk mengundang penduduk. Kemudian diikuti dengan dakwah dan

pemberian sedekah Raja berupa gunungan. Dengan cara ini, maka masyarakat kemudian semakin tertarik untuk mempelajari Islam.

Selain itu, tradisi adat Jawa yang mengirim sesaji dan selamatan kemudian diubah dan diarahkan dengan cara yang lebih Islami. Selamatan dilakukan tapi niat dan doanya bukan kepada dewa, tapi kepada Allah. Dan makanan tidak digunakan sebagai sesaji untuk dewa, tapi dibagikan sebagai sedekah kepada penduduk setempat.[37]

4. Tradisi Dakwah Merangkul

Salah satu langkah terbaik untuk membuat seseorang tertarik untuk mempelajari agama adalah dengan merangkul dan memberi contoh. Sunan Giri misalnya terkenal di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh mereka dari kasta yang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam semua kedudukan manusia adalah sama. Para wali juga membantu masyarakat dalam hal pengobatan, membantu membuat aliran air untuk sawah masyarakat, dan masih banyak lagi. Dengan menunjukkan sikap seperti inilah banyak orang yang kemudian tertarik untuk mendalami Islam.

Dakwah yang dicontohkan walisongo konsisten dengan makna *harfiyah*-nya yang berarti "mengajak", bukan "menyuruh", apalagi "memaksa". Dakwah atau mengajak, secara teoritik selalu mengasumsikan bahwa yang menjadi pelakunya, pihak yang mengajak *(dâ'i),* secara aktif terlibat dalam tindakan yang dia dakwahkan kepada orang lain. Ibarat seseorang mengajak temannya pergi ke Mal, secara teoritik ia sendiri memang hendak pergi atau sudah berada dalam proses (sedang akan) pergi ke Mal. Berbeda dengan "menyuruh", maka si pelaku (penyuruh, *âmir*), bisa jadi tidak terlibat dalam pelaksanaan tindakan yang dia suruhkan. Apa artinya? Dakwah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang

---

[37]Mark R. Woodward, *Islam Jawa,* ter. Hairus Salim (Yogyakarta: UMI, 1985), 5.

mengandaikan adanya basis keperluan yang sejalan –minimal tidak bertentangan– dengan pihak yang hendak diajak, meskipun pada saat itu belum terjadi kesesuaian. [38]

C. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Bagian prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah dengan menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya: keseimbangan antara akal dan wahyu; jasmani dan rohani; hak dan kewajiban; kepentingan individu dan kepentingan komunal; keharusan dan kesukarelaan; teks agama dan ijtihad; gagasan ide dan kenyataan; serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.[39]

Lebih lanjut, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut terdapat inti moderasi beragama yakni, adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, serta mempraktikan semua konsep yang berpasangan di atas. Adil, dalam KBBI dapat diartikan: 1) tidak memihak/tidak berat sebelah; 2) berpihak kepada kebenaran; 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Tidak memihak/tidak berat sebelah bisa dianalogikan dengan istilah "wasit" yang merujuk pada seseorang yang memimpin pertandingan yang memiliki sikap tidak berat sebelah dan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip selanjutnya, keseimbangan, merupakan istilah menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak kepada persamaan, keadilan, dan kemanusiaan. Orang yang memiliki sikap seimbang berarti tegas, akan tetapi tidak keras karena berorientasi kepada keadilan, sedangkan keperpihakannya tidak sampai merenggut hak orang lain yang pada akhirnya akan merugikan. Sikap seimbang juga dapat dianggap sebagai bentuk cara

[38]Gus Mus, *Epilog Jejak para Wali dan Ziarah Spiritual* (Jakarta: Kompas, 2006) 225

[39]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 10

pandang untuk melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang, juga tidak konservatif dan tidak liberal.[40]

Sikap adil dan seimbang sebagai prinsip moderasi merupakan sikap jalan tengah atau yang sering disebut dengan *wasathiyah* yang sampai saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi dianggap sebagai sikap keragaman yang ideal sebagai peredam masalah keagamaan yang mulai memanas. Dalam buku Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam (2019), menyebutkan beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam *Wasathiyah* sebagai berikut:

a. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrath*, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrith*, yaitu mengurangi ajaran agama. Juga bisa diartikan bahwa *tawassuth* adalah sikap tengah-tengah, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamintalis), dan terlalu jauh ke kiri (liberalis).

Sikap tawasuh sebenarnya sudah termaktub dala firman Allah:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗوَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

[40]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 11

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dengan sikap ini, Islam akan mudah diterima oleh lapisan masyarakat. Karakter *tawassuth* ini dalam Islam sebagai titik tengah di antara dua ujung dan hal ini merupakan suatu kebaikan yang semula sudah diletakkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam perlu diterapkan dalam segala sendi kehidupan dengan tujuan agar agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi emua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya[41]

b. *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawazun adalah suatu pandangan keseimbangan yang tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri istilah *tawazun* berakar pada kata *mizan* yang memiliki arti timbangan. Akan tetapi dalam konteks moderasi, *mizan* tidak diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia atau terkait dengan kehidupan akhirat yang kekal [42]

[41]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 10

[42]Mustaqim Hasan, 2021, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa,” Jurnal Mubtadiin, 7 (2): 115

Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Tawazun juga memiliki pengertian memberikan sesuatu akan haknya tanda adanya penambahan dan pengurangan. *Tawazun,* karena merupakan sikap seseorang individu untuk menyeimbangkan kehidupan, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang sebagai muslim. Melalui sikap *tawazun*, seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir, dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup [43]

c. I'tidāl (tegak lurus)

I'tidal secara bahasa berarti lurus dan tegas, mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan secara proposional. Termasuk bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi individu muslim adalah sikap *I'tidāl*. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah SWT supaya dilakukan secara adil, yakni bersifat seimbang atau berada di tengah-tengah dalam segala aspek

[43]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama. 10

kehidupan dengan menujukkan perilaku *ihsan*. Adil memiliki arti mewujudkan keseimbangan dan kesaman di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada.[44]

d. Tasāmuh (toleransi)

Tasāmuh memiliki toleransi. Di dalam kamus *lisan al-Arab* kata *Tasāmuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna kemurahan hati, kemudahan, pengampunan, dan perdamaian (Siradj 2013). Secara etimologi, *tasāmuh* adalah menerima perkara secara ringan atau menoleransi. Sedangkan secara terminologi, *tasāmuh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati[45].

Tasāmuh merupakan suatu pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, walaupun tidak sependapat dengannya. Karena setiap orang memang berbeda. Sikap ini termaktub dala Al Qur’an,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ

Artinya” Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur’an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

[44]Nurul H Ma’arif, Islam Mengasihi Bukan Membenci, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017). 143

[45]Irwan Masduqi, Berislam secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011). 36

Tasāmuh juga diartikan toleransi ini memiliki kaitan yang erat dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.

Orang yang memiliki sifat *tasāmuh* akan lebih bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmuh* berarti suka menghargai dan mendengar pendapat orang lain[46].

e. *Musāwah* (egaliter)

Musāwah secara bahasa berarti persamaan. Secara istilah, *musāwah* adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa.

Musāwah dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Ddalam al Qurr'an disebuttkan,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

[46]Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, 19

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik, serta persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia[47].

f. *Syurā* (musyawarah)

Kata *syurā* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syurā* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019).

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah

[47]Kementerian Agama Republik Indonesia , Implementasi Moderasi Beragama,. 14

mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah juga pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin.

D. Aspek Dasar Moderasi Beragama

Ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung mengarah ke sumbu atau pusat (*centripetal*), tidak pernah diam dan terus bergerak. Sikap moderat ini pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu beregerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus, yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Jadi, untuk mengukur moderasi beragama harus mampu menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Begini, sikap keberagamaan seseorang dipengaruhi dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan, cenderung mengutamakan akal. Bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, dan tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama secara ekstrem, dan hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama, bisa mengakibatkan sikap konservatif.

Dus, seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya,

dan berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks dengan tetap memahami konteks.

Untuk menentukan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong moderat atau ektrim, Kementrian Agama RI menggunakan empat aspek indikator moderasi beragama, yakni: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

a. Komitmen Kebangsaan

Salah satu indikator moderasi yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang, atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan adalah komitmen kebangsaan, terlebih komitmennya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Permasalahan komitmen kebangsaan dewasa ini sangat penting dicermati terutama dengan munculnya paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur.

Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan.[48]

b. Toleransi

Sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya,

[48]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama. 14

dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini, merupakan sikap toleransi. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.[49]

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik.

Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks ini, lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan, yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.[50]

c. Anti-Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan

[49]Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019). 19

[50]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama. 12

menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Selain faktor pemahaman yang kaku, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam *daulah islamiyah,* seperti *khilafah*, *darul Islam*, dan *imamah*. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain[51].

d. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Pertemuan antara agama, khususnya Islam, dan budaya sering mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan

---

[51]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama 12

antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi "tool" dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti al-'adah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.[52]

E. Tantangan Moderasi Beragama dalam Konteks Lokal dan Global

Secara geografis di Indonesia terdapat 17.000 lebih pulau dengan bentangan garis pantai mencapai 80,999 km. Penduduknya ada, 269,6 juta orang, dan sebesar 87% beragama Islam.[53] Kebudayaannya beraneka ragam, ada sekitar 1.128 suku bangsa dan

[52]Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama. 23
[53]Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS).

731 bahasa daerah. Semuanya menjadi kebanggaan, namun sekaligus tantangan mempertahankan kemajemukannya. Hal ini pula yang menjadikan Indonesia serupa roti yang paling enak di antara semua roti yang ada di dunia. Dus, Indonesia menjadi rebutan.

Saat ini, setidaknya ada tiga kepentingan besar yang berkembang di Indonesia. Pertama, kepentingan nasionalis yang kini berkuasa dan memiliki tujuan untuk mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasilanya. Kedua, kepentingan liberal yang senantiasa memperjuangkan kebebasan dan persamaan hak, menolak pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Di dalamnya terdapat paham kapitalis dan paham sekuler yang memiliki tujuan akhir kebebasan, menguasai segala lini birokrasi guna dapat menguasai pengelolaan sumber daya alam, tanpa mau ambil pusing terhadap ideologi ataupun hukum negara, bentuk negara, maupun sistem pemerintahannya. Ketiga, kepentingan faham radikal, baik radikal kanan maupun radikal kiri yang bertujuan untuk mengganti hukum negara atau ideologinya, mengganti sistem pemerintahannya dan mengganti bentuk negaranya.[54]

Dari ketiga kepentingan tersebut, yang paling berbahaya dan paling terasa dampaknya saat ini adalah kepentingan faham radikal, khususnya radikal teroris. Hal itu terjadi karena saat ini kepentingan faham radikal berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka senantiasa menyebarkan faham-fahamnya di tengah masyarakat yang berdampak pada terjadinya aksi-aski intoleransi; perpecahan bernuansa SARA; sampai pada munculnya amaliah berbentuk aksi teror. Mereka ingin mengganti hukum atau ideologi negara sesuai kepentingannya, tunduk dengan sistem pemerintahan dan bentuk negara yang digagasnya.

Data statistik hasil Survei *Saeful Mujani Research and Consulting* (SMRC), pada 2017, yang dilansir Jawa Pos pada 5 Juni 2017, terdapat

[54]Subkhan, Mencepit, LKiS

14,5% masyarakat yang setuju NKRI bubar, dan 4% di antaranya menjadi pendukung ISIS. Sedangkan yang setuju NKRI diubah menjadi khilafah sebanyak 9,2%. Membaca angka-angka hasil survei tersebut, bila dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia saat itu yang jumlahnya sekitar 260 juta orang, maka angka 4% yang menyatakan mendukung ISIS adalah 10 jutaan orang, dan angka 9,2% yang menyatakan setuju NKRI diubah menjadi khilafah adalah 20 jutaan orang.[55]

Dua tahun kemudian, dalam laporan hasil penelitian *IDN Research Institute* yang dilakukan pada 20 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018, berjudul *Indonesia Millenial Report*, terbit pada 19 Januari 2019, diketahui bahwa 19,5 % dari 63 juta penduduk millenial Indonesia atau sekitar 12 jutaan orang penduduk Indonesia usia millenial setuju dengan sistem khilafah.[56]

Kondisi itu tentu mengganggu tujuan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana tidak mengganggu kalau masing-masing berjalan dengan pandangan dan impiannya sendiri, saling bertentangan satu dengan yang lain.

Padahal, sejarah Indonesia mencatat kebhinnekaan dan kehidupan adalah dua sisi mata uang yang sama. Kehidupan terjadi karena adanya keanekaan ciptaan Tuhan. Hidup adalah siang dan malam, bumi dan langit, laut dan darat, barat dan timur, serta tumbuhan dan binatang. Dinamika perkembangan terjadi karena adanya keanekaan alam diolah secara kreatif-arif oleh manusia yang beragam. Manusia tidak berhak menjadikan kehidupan serba tunggal, sebab kehidupan berjalan di atas roda keragaman.

Secara hakiki, kebinekaan bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi untuk dipertentangkan, tapi untuk saling dipertemukan, untuk tunggal ika. Masing-masing memiliki potensi, kreasi, kearifan dan karakter yang

[55]Survei *Saeful Mujani Research and Consulting* yang dipublikasikan di Media Cetak Jawa Pos, 5 Juni 2017.

[56]IDN *Reserach Institute* yang dipublikasikan di Media Online, 19 Januari 2019.

bisa disandingkan, dikembangkan dan disumbangkan demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sisi kemanusiaan, keadilan dan keberadaban adalah tiga kata kunci yang dipilih untuk menyatukan kebinekaan bangsa, sebagaimana semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Ini sebagai penananda untuk mengesampingkan perbedaan yang ada. Meski berbeda-beda tapi tetap bersatu dan menjaga kesatuan.

Kebhinnekaan di Indonesia sudah hadir jauh sebelum provinsi ini lahir. Sejarah mencatat di tanah ini berdiri Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Hindu, Mataram Buddha (Syailendra), Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaran. Di bumi ini pula terbangun megah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Menara Kudus dan Kuil Sam Po Kong.

Mahakarya sebesar itu tidak mungkin dibangun tanpa memperhitungkan aspek kewilayahan dan karakteristik penduduknya. Maka tidak mengherankan jika di bumi Nusantara ini begitu kaya keragaman agama, budaya, dan adat istiadat.

Keragaman yang dipotret *Bhinneka Tunggal Ika* bukanlah sekedar perbedaan agama, melainkan semua keragaman, baik keragamaan etnis, sosial, budaya, bahkan politik. Semua itu harus dijadikan sebagai modal sosial yang saling merekatkan dalam bingkai kemanusiaan, seperti *welas asih,* kesalehan sosial, dan toleran akan perbedaan pada masyarakat plural.[57]

Dengan cara pikir yang demikian, identitas-identitas yang ada di Indonesia, baik itu yang berlatar nilai keagamaan, etnis, bahasa, dan adat adalah faktor alamiah dan dasariah. Bangsa ini sangat menyadari bahwa persatuan dan *sense of belonging* (rasa kepemilikan) akan latar belakang tersebut, harus dilebur dalam satu identitas otentik bernama

---

[57]Ida Ayu Wimba dkk, "Sinkretisasi Masa Majapahit Sebagai Dasar untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa", dalam *Prosiding Seminar Nasional; Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Mellinial,* Tahun 2015, hlm. 175-180.

Indonesia. Identitas yang sudah disumpahkan melalui model *amalgam spot* (peleburan titik) benama Sumpah Pemuda Indonesia. Sumpah yang juga merupakan bentuk dari penerimaan nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika*. Eka Dharmaputera mengatakan bahwa integralisme, Sumpah Pemuda, dan Pancasila adalah wujud fungsional yang akan terus melekat pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sebagai petunjuk untuk berinteraksi satu sama lain. Untuk membangun dan mengembangkan hubungan negara yang baik. Untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih menerima perbedaan; baik yang sudah melekat ataupun datang di kemudian hari.[58]

Bhinneka Tunggal Ika adalah *university of diversity* (dalam bahasa *global multiculturalism*). Bisa juga dimaknai sebagai *glue of social capital* (modal pengikat sosial) yang berkelindan sebagai nilai prinsipil setiap individu di Indonesia; apakah itu yang memiliki kekuatan keagamaan ataupun perbedaan kebudayaan. Sedangkan berdasarkan pada bahasa yang lebih popular di Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* ialah pluralitas (kemajemukan) kebudayaan, keagamaan, dan kesukuan yang ada di Indonesia.

Sayangnya, aura khazanah kebinekaan mulai luntur. Perubahan sosial telah mendorong sebagian anak bangsa tidak lagi bangga dengan keragaman, dan lebih tertarik dengan keseragaman. Sebagian lainnya malah asyik mencari identitas baru, yang cenderung berupaya menghancurkan budaya leluhur. Di sinilah "Tunggal Ika" mengambil peran. Nilai ketunggalan harus dieksplorasi dan dimaknainya ulang, dan mentransformasikannya ke dalam konteks hidup kekinian agar mampu mengatur diri sendiri (*self-organization*), dan mengeksplorasi masa depannya sendiri, seraya beradaptasi dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang sensitif.

---

[58]Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya,* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997, hlm. 40.

Secara prinsip, semua keragaman Nusantara mesti dikohesikan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan, yakni terciptanya keadilan dan kemakmuran yang manusiawi dalam bingkai ketuhanan. Setiap warga negara harus dipastikan dapat mengaktualisasikan dirinya dan dapat meraih cita-citanya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pencapaian kondisi yang demikian meniscayakan adanya penegakan keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan partisipasi yang dikemas dalam bingkai nilai-nilai keadaban dan etika sosial yang luhur.

Kesadaran ini harus selalu disemai, direstorasi dan direkonstruksi. Jika tidak, bangsa ini akan "*off side*" dan keluar dari garis batas permusyawaratan dan persatuan.

Negara pada dasarnya adalah cawan kosong yang bergantung pada siapa dan apa yang diisikan. Siapa sesungguhnya yang ada di balik negara, itulah pertanyaan yang sangat signifikan untuk dijawab karena dialah yang menentukan dan mewarnai corak kehidupan bernegara. Di sinilah dibutuhkan manusia profesional dan berkarakter dari semua agama, semua ras dan semua peradaban tanpa terkecuali.

Sedangkan dari sisi apa yang mau diisikan untuk negara, kontribusi agama, budaya dan adat istiadat dengan kekayaan nilai etik dan moralnya sangat diperlukan. Kita butuh kontribusi spirit keadilan Islam, kasih Kristiani, ahimsa (*non violence*) Hindu, kesederhanaan budha, kehalusan tradisi Jawa, ketegaran budaya pesisiran, kelugasan kaum *ngapak*, dan seterusnya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika.

F. Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan keagamaan

Data Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Komisi III DPR pada, 25 Januari 2022, yang menyatakan ada 198 Pesantren terafiliasi teroris sungguh mencengangkan. Meski dari sisi statistik, jumlah ini terbilang kecil di banding jumlah Pondok Pesantren di seluruh Indonesia yang mencapai 27.722, tapi tidak boleh dianggap remeh. Terlebih jika menilik data yang menyatakan sejumlah pelajar di Indonesia yang tidak lagi mencintai dasar negara Pancasila, dan menganggapnya

sebagai dasar negara kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Seperti dilansir Alvara Research Center pada 2017. Sebagai berikut:

Chart 17: Perception on Ideology of State
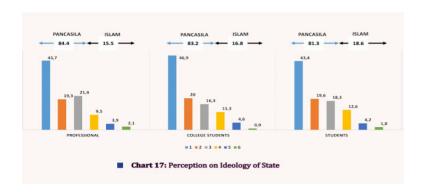
Di dalam temuan tersebut, 18,6% pelajar lebih sepakat dengan Islam sebagai dasar negara, daripada Pancasila (81,3%). Sikap yang sama juga dimiliki oleh 16,8% mahasiswa dan 15,5% kaum profesional kita. Yang dimaksud sebagai Islam sebagai dasar negara ini ialah dasar negara Islam secara umum, dan dasar negara Khilafah Islamiyyah yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi Islam yang telah dilarang pemerintah.

Demikian pula survei nasional yang diadakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2017, menemukan sekian prosentase pelajar yang sepakat dan mendukung terorisme serta radikalisme yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Temuan survei tersebut sebagai berikut:

KATEGORI	BASE	Tahu ISIS?		Jika tahu ISIS, tahu yang diperjuangkan ISIS adalah Negara Islam/Khilafah?		Jika tahu ISIS, apakah setuju dengan perjuangan ISIS tersebut?		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat setuju + Setuju	Tidak setuju + Sangat tidak setuju	TT/TJ
PENDIDIKAN								
<= SD	**40,6**	48,3	51,7	41,9	58,1	1,6	89,5	8,9
SLTP	**19,9**	69,8	30,2	39,5	60,5	2,4	87,3	10,3
SLTA	**30,2**	80,1	19,9	49,8	50,2	3,3	89,8	6,9
PT	**9,3**	93,6	6,4	60,1	39,9	3,4	93,0	3,6

KATEGORI	BASE	Tahu HTI?		Jika tahu HTI, tahu yang diperjuangkan hti adalah Negara Islam/Khilafah?		Jika tahu HTI, apakah setuju dengan perjuangan HTI tersebut?		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat setuju + Setuju	Tidak setuju + Sangat tidak setuju	TT/TJ
PENDIDIKAN								
<= SD	**40,6**	12,3	87,7	52,7	47,3	11,1	71,5	17,4
SLTP	**19,9**	25,7	74,3	49,5	50,5	7,6	59,8	32,7
SLTA	**30,2**	40,2	59,8	54,0	46,0	11,6	70,5	17,8
PT	**9,3**	63,7	36,3	71,8	28,2	13,5	70,7	15,7

Dari data di atas, terdapat 3,3% pelajar SLTA, 2,4% pelajar SLPT, dan 1,6% pelajar SD yang setuju dan sangat setuju dengan perjuangan ISIS. Sebuah sikap yang berbahaya mengingat ISIS adalah organisasi teroris. Dengan demikian, 3,3% pelajar tersebut sepakat dengan terorisme. Demikian pula terdapat 11,6% pelajar SLTA, 7% pelajar SLTP dan 11,1% pelajar SD yang setuju dan sangat setuju dengan perjuangan HTI. Sebuah angka yang besar bagi modal kaderisasi dari gerakan tersebut.

Temuan survei itu tentu menjadi *warning* bagi masa depan moderasi beragama di dunia Pendidikan Islam dan bangsa ini secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah ada apa dengan bangsa ini? Mengapa daya tarik NKRI terus memudar? Mengapa semangat formalisasi agama semakin memikat? Tidak mudah menjawab sederet pertanyaan ini karena masalahnya membentang dari yang prinsip sampai yang teknis, mulai ideologi sampai teknologi, mulai tatanan global sampai fenomena lokal.

Yang jelas para pendiri bangsa sudah bijak meletakkan Pancasila sebagai nilai pemersatu dan menjadikan negara kesatuan sebagai bentuk negara. Semua pihak mendapat kesempatan menjalankan keyakinan dan tradisinya, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari hukum negara yang secara substansi berorientasi pada kepentingan publik. Dan secara prosedural diterima nalar publik melalui mekanisme legislasi. Karena memang kontribusi agama, budaya, adat istiadat dengan kekayaan nilai etik dan moralnya, sangat diperlukan. []

BAB IV
MODERASI BERAGAMA MADRASAH PESANTREN

A. Basis Paedagogis Madrasah Pesantren

Gagasan Madrasah Berbasis Pesantren berangkat dari kebutuhan untuk merumuskan suatu sistem pendidikan Islam yang baru. Kebaruan dari sistem ini terletak dalam basis filosofisnya, yang hendak menjadikan kepesantrenan sebagai basis pendidikan dari madrasah.[1] Disebut basis filosofis, karena madrasah berbasis pesantren berangkat dari kehendak untuk mengembalikan sistem pendidikan madrasah kepada dasar filosofis dari pendidikan Islam yang terdapat di pesantren.

Secara jujur harus diakui bahwa saat ini telah terjadi defilosofisasi pendidikan Islam di madrasah, yang berujung pada tercerabutnya dari landasan filosofis pendidikan Islam itu sendiri. Proses defilosofi ini terjadi akibat proses instrumentalisasi, pragmatisasi, fungsionalisasi, dan mekanisasi pendidikan Islam madrasah.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan filsafat pendidikan Islam yang berangkat dari rasionalitas nilai, bukan rasionalitas instrumental. Rasionalitas nilai dalam pendidikan Islam menyatakan bahwa hakikat pendidikan dalam Islam adalah pembentukan karakter manusia berdasarkan ontologi keislaman. Ontologi manusia ini berisi tentang konsep "manusia ideal" menurut Islam, yaitu sebagai hamba

[1]Malik Fadjar dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Sjadzal,* (Jakarta: kerja sama IPHI dan Paramadina, 1995), 513-514.

(*'abdullah*) dan wakil Tuhan (*khalifatullah*). Sebagai hamba, manusia harus mengarahkan hidupnya untuk beribadah. Menjadi hamba Tuhan. Sementara sebagai khalifatullah, manusia adalah pengejawantah nilai-nilai ketuhanan sehingga dunia bisa ditata dengan nilai-nilai tersebut.

Dari ontologi keislaman manusia inilah, pendidikan Islam dibangun. Jadi pendidikan Islam adalah pendidikan yang dibangun berdasarkan rasionalitas nilai-nilai ontologi Islam atas hakikat manusia. Oleh karena itu, elemen keilmuan dalam pendidikan Islam, haruslah mampu memenuhi kebutuhan bagi pembentukan manusia islami. Dalam kaitan ini, pemenuhan tersebut akhirnya memuara pada dua tugas manusia sebagai '*abdullah* dan *khalifatullah.*[2]

Dari dua tugas kehambaan dan kekhalifahan ini, maka tidak ada lagi dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum. Sebab demi pemenuhan tugas kekhalifahan, muslim haruslah mengetahui seluk-beluk dunia agar ia bisa menata dunia dengan baik. Muslim haruslah menguasai ilmu politik, antropologi, ilmu budaya, ilmu bahasa, ilmu sosial, filsafat, ilmu teknik, dan segenap tradisi pengetahuan tentang manusia dan masyarakat yang tidak berasal dari khasanah keislaman.

Standar keislaman dalam tugas penataan dunia kemudian bisa berarti dua macam. Bisa bersifat formalis, dalam artian, pelajar Islam menggunakan konsep Islam (misalnya politik Islam) sebagai rumusan penataan dunia. Atau bersifat substantif, yakni memasukkan nilai-nilai dasar keislaman dalam ruang lingkup yang tidak Islami.[3]

Pada titik inilah, praktik pendidikan Islam harus dibangun berdasarkan basis *Ilahiyyah (devinity based education)*. Pola dan pelaksanaannya secara ideal sudah diterapkan secara nyata di pesantren. Dalam hal ini, pesantren sebagai subkultur yang secara

---

[2]Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1980), 90. Lihat pula Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism,* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1978), 18.

[3]Ihsan, *Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), 86.

ideal telah memuat tiga sistem nilai pesantren seperti termaktub di atas. Hanya saja karena secara legal, lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia adalah madrasah, maka pembentukan sistem pendidikan Islam yang ideal, berarti pertemuan antara konsep madrasah dan konsep pesantren. Dalam kaitan ini, pesantren sebagai nilai dan sistem pedagogis, Saya jadikan basis pedagogis dari sistem pendidikan madrasah.[4]

Dus, perumusan sistem baru pendidikan ini tidak harus membuahkan lembaga pendidikan yang benar-benar baru, yang belum ada selama ini. Tapi perumusannya ada pada penempatan kepesantrenan sebagai basis pedagogis dari madrasah. Dari sini basis pedagogis itu meliputi beberapa hal. (1) basis nilai, (2) basis pengajaran, (3) basis kultural.

1. Basis Nilai

Sistem nilai dalam madrasah berbasis pesantren bukanlah instrumentalisme seperti yang di madrasah. Sistem nilai dalam madrasah berbasis pesantren dimaksudkan sebagai sistem nilai pesantren yang berangkat dari asketisme, intelektualisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga nilai inilah yang menjadi corak normatif dari pesantren.

Asketisme terkait dengan pola hidup warga pesantren yang asketik. Sekaligus corak, pijakan, dan tujuan pendidikan pesantren yang asketik. Asketik di sini diartikan sebagai orientasi serba *ukhrawi*, yang membuat segenap praktik pendidikan di pesantren diniatkan sebagai ibadah. Asketisme berbeda dengan materialisme yang lahir dari instrumentalisme. Asketisme lebih mengarah pada penguatan kualitas spiritual, sehingga logika pendidikan bukan untung-rugi, kejar-latihan-kerja, dan segenap orientasi ekonomis.

---

[4]Ihsan, *Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), 87.

Sementara itu, intelektualisme terkait dengan corak pendidikan pesantren yang mengedepankan tradisi ilmiah.[5]

Dalam tradisi ini, pelajaran agama Islam tentu tidak hanya lima bidang studi seperti di madrasah. Dalam tradisi ilmiah Islam, pembelajaran bersifat maksimal: dalam hal cakupan keilmuannya; dan penguatan metodologi keislamannya. Hal sama pada nilai pengabdian masyarakat yang menyatukan pesantren dengan masyarakat. Semua itu yang membuat pesantren tidak murni lembaga pendidikan formal yang menciptakan dinding tebal dengan realitas masyarakat. Pesantren adalah pusat pendidikan kultural, yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.[6]

2. Basis Pengajaran

Basis ini menyangkut pola pengajaran dan pembelajaran di kelas. Dalam madrasah, pola yang digunakan adalah sistem kelas dengan buku ajaran resmi dari kementerian agama. Hal ini yang membuahkan hasil kurang maksimal di dalam pendidikan Islam, sebab ia tidak mendasarkan diri pada sumber utama dari keilmuan Islam, yakni kitab kuning. Dengan penggunaan kitab kuning, murid mampu menelusupi detail kompleksitas pengetahuan Islam yang bersumber dari peradaban klasik. Tentu penggunaan kitab kuning ini berpengaruh pada kurikulum, setidaknya pada dua hal.

Pertama, penguatan Bahasa Arab. Artinya, karena rujukan utama pembelajaran adalah sumber utama, maka pendidikan Bahasa Arab bisa bersifat praksis dan metodologis. Bahasa Arab tidak hanya diajarkan agar murid mengetahui gramatikanya, melainkan agar murid mampu menerapkannya, baik dalam hal tulis-menulis maupun berbicara.

---

[5]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 58-62.

[6]Irwan Abdullah, Muhammad Zain, Hasse J. (Ed.), *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1-7.

Kedua, perluasan kompleksitas kurikulum. Karena kitab kuning sangat kaya, maka penggunaan kitab kuning tersebut akan meluaskan cakupan kurikulum, sehingga pendidikan agama Islam tidak terbatas pada lima bidang studi di atas. Kitab kuning adalah representasi dari kekayaan literatur klasik Islam. Dengan mempelajarinya, murid akan familiar dengan kekayaan literatur ini. Dengan demikian, penggunaan kitab kuning akan mendorong pengayaan mata pelajaran, sehingga melampaui standar minimalis kurikulum kementerian agama.

3. Basis Kultural

Basis ini meliputi pengondisian kultural agar pendidikan Islam bisa berfungsi secara maksimal dalam memenuhi tujuan normatif dari filsafat pendidikan Islam. Pengondisian kultural inilah yang terkait dengan basis kelembagaan pesantren. Artinya, pesantren yang didirikan secara menyatu dengan madrasah, akan menjadi "lingkungan pendidikan" yang strategis bagi pembentukan manusia Islami. Yakni manusia yang sesuai dengan ontologi Islam. Hal ini niscaya, sebab pesantren tidak hanya memenuhi aspek kognitif pendidikan, melainkan pula afekstif dan psikomotorik.

Artinya, aspek kognitif, yakni aspek pemahaman rasional atas pengertian-pengertian definisi pengetahuan, telah diberikan oleh sistem kelas di madrasah. Sementara afeksi, yakni aspek internalisasi pengetahuan hingga menjadi kesadaran psikis-normatif serta praktik psikomotoriknya disediakan sistem pesantren. Tentu afeksi dan psikomotorik ini bersifat keagamaan. Maka, dimensi afeksi dan psikomotorik akan mengerucut pada spiritualitas.

B. Tiga Model Madrasah Pesantren

Berangkat dari ketiga basis tersebut, madrasah sebagai sistem teknis dari pendidikan Islam, akan memiliki basis yang mendasar, yakni pesantren. Artinya, madrasah yang memiliki kekuatan pada sisi

manajemen rasional dan birokrasi pendidikan, disempurnakan oleh basis dari pendidikan itu sendiri, yakni pesantren. Dengan demikian, madrasah yang saat ini disebut sebagai sekolah berciri khas Islam, tidak akan menjadi sekolah murni yang kehilangan ciri khas Islamnya. Ia tidak akan terjebak ke dalam jeruji sistem birokratis yang tercerabut dari akar filosofis pendidikan Islam. Madrasah sebagai sistem teknis, akhirnya bisa bermanfaat sebagai pengaturan rasional bagi nilai-nilai filosofis pendidikan Islam. Berdasarkan ketiga basis tersebut, madrasah dikategorikan menjadi:

1. Madrasah Pesantren (MP)

    Madrasah Pesantren (MP) adalah model pengelolaan MA yang secara operasional pengelolaannya berada dalam satu sistem manajemen. Artinya, suatu MA tidak hanya secara fisik berada dalam lingkungan pesantren tetapi antara MA dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi dan manajemen yang menyatu (*integrated*).

    Tujuan penyatuan sistem pengelolaan ini agar semua proses pendidikan berada dalam suatu sistem sehingga semua kegiatan guru dan murid berada dalam satu alur dan paket program yang sama. Dari tiga model dalam buku ini, model MP adalah yang paling ideal untuk sebuah proses pendidikan. Tidak hanya untuk pendidikan Islam (madrasah) saja tetapi juga untuk semua lembaga pendidikan pada umumnya. Karena model ini mampu menciptakan proses pendidikan holistik yang akan melahirkan autput dan outcome pendidikan berkualitas.

    Ada 2 aspek penting dalam proses berlangsungnya pendidikan di MA yang berorientasi pada kualitas, yaitu aspek pengelolaan dan aspek penguatan. Dilihat dari sudut pengelolaan, ada satu kata kunci yang menjadi ciri khas MP, yaitu "integrasi". Menyatu dan holistiknya sistem pengelolaan madrasah peantren. Sedang dari isi penguatan.

2. Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP)

Madrasah yang berada di lingkungan Pesantren (MLP) secara substantif memiliki kesamaan dengan model yang pertama, perbedaannya hanyalah terletak pada keberadaan pesantren secara fisik. Bila pada model pertama MA dan pesantren berada dalam satu sistem pengelolaan dan dalam satu kompleks pendidikan, sementara model ini antara MA dan pesantren tidak berada dalam satu sistem manajerial.

Pesantren yang di maksud di sini adalah pesantren yang secara fisik berada dalam satu kawasan atau lingknguan di sekitar lokasi MA. Model ini sekaligus menjadi alternatif bagi MA yang memiliki keterbatasan dalam penyiapan infrastruktur. Karena berada di luar manajemen dan tidak berada dalam satu komplek pendidikan, langkah yang bisa ditempuh para pengelola MA adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak pengelola atau pengasuh pesantren dalam hal materi (ilmu agama) yang diajarkan di pesantren.

Oleh karenanya, dari sudut pengelolaan kelembagaan model MLP ditempuh melalui kerjasama antara manajemen madrasah pada satu pihak dan manajemen pesantren pada pihak lain. Dengan kerja sama ini diharapkan sistem dan materi pendidikan yang dijarkan di pesantren bisa sejalan dan mendukung tema-tema yang diajarkan di MA.

Dari sudut materi atau bahan yang diajarkan, belum tentu apa yang diajarkan di madrasah dan pesantren sama. Namun substansi isinya memiliki titik temu. Meskipun dari sudut kelembagaan antara madrasah dan pesantren merupakan unit organisasi atau lembaga yang berbeda, namun pembelajaran di pesantren didesin dalam rangka penguatan (*empowering*) terhadap materi yang diajarkan di madrasah.

Karena berbeda lembaga maka antara keduanya hubungannya bersifat koordinatif dalam rangka menjalin sinergi demi menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian isi dari materi pembelajaran. Karena merupakan unit organisasi yang berbeda, maka model manajemen atau kepemimpinan antara madrasah dan pesantren tidak harus menyatu, butuh biaya inftrastruktur yangmahal. Akan tetapi antara madrasah dan beberapa pesantren yang berada di lingkungannya ada kerja sama dan koordiniasi. Kerja sama itu bisa dalam bentuk materi kurikulum, tata tertib, jadwal kegiatan, dan hal-hal teknis lain. Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, secara operasional pembelajaran di pesantren berjalan sesuai dengan karakter dan materi masingmasing pesantren. Dengan asumsi bahwa pembelajaran di pesantren berorientasi pada *ulum al-din*, maka hasil pembelajaran tersebut otomatis akan memperkaya dan melengkapi materi agama Islam di kurikulum madrasah.

Dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan Islami, pesantren yang berada di lingkungan madrasah tersebut berjalan sesuai dengan kultur dan nilai yang ada dan berjalan selama ini. Dengan kata lain pengelola pesantren memiliki otonomi dan deskresi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaranannya, khususnya materi ulum al-din. Output yang diharapkan dari sistem ini adalah penciptakan pribadi murid/ santri yang berakhlakul karimah.

Terkait pembelajaran untuk penguatan, model ini setidaknya untuk Kudus, lebih visibel dilakukan karena sudah sejumlah madrasah sudah menerapkannya. Kekurananya hanya satu, selama ini antara madrasah dan pesantren belum memaksimalkan kerjasama atau koordinasi, sehingga terkesan murid yang nyanteri di pesantren lebih mirip mencari pemondokan untuk tempat tinggal. Kerjasama dalam konteks ini ditujukan untuk kepentingan koordinasi dan sinergi kegiatan.

3. Madrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP)

Pola Adopsi Sistem Nilai Pesantren (MSNP) Konsep model ketiga ini didasarkan atas asumsi bahwa sistem pendidikan pesantren dengan meteri dan kulturnya dipandang cocok atau sesuai dengan karakter MA, terutama dalam mewujudkan ciri khas Islam. Sebagaimana diketahui, pada pesantren ada unsurunsur yang secara kultural sejalan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan ciri khas Islam.

Seperti keberadaan kiai sebagai figur panutan, masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan ibadah, pengajaran kitab kuning sebagai sumber pengetahuan agama Islam, dan asrama sebagai media penciptaan suasana sosial keberagamaan, lengkap dengan kondisi lingkungan pesantren sebagai sub kultur masyarakat sekitar.

Model ketiga ini juga memiliki dua aspek pokok sebagai komponen yang akan menjadi jelas dalam model dimaksud, yaitu: aspek pengelolaan dan aspek model penguatan materi pembelajaran.

C. Tipologi Moderasi Beragama pada Madrasah Pesantren

Pendidikan moderasi beragama di tiga MP ini dikembangkan melalui beberapa hal. ***Pertama,*** pembentukan sikap toleran melalui Penguatan persaudaraan (*ukhuwah diniiyyah*, *wathoniyyah* dan *basyariyyah*) dengan penekanan pada persaudaraan ummat se-agama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dipraktekkan oleh para pendiri Madrasah yang selalu mengedepankan sikap toleran di setiap tindakannya dalam bermasyarakat sebagai contoh K.H. Muhammad Zaim, pengasuh pondok pesantren dan madrasah aliyah al hidayat lasem, selalu mengajarkan toleransi pada para santrinya. Beliau memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai tersebut, seperti toleran terhadap keturunan tionghoa, jadi santri melihat langsung apa yang dilakukan oleh para

beliau. Lebih lanjut beliau menceritakan karena posisi atau letak pondok pesantren dan madrasah al Hidayat lasem yang berdampingan dengan komunitas tionghoa, tak jarang beberapa warga tionghoa datang menemui gus Zaim untuk hanya sekedar mengobrol sampai berdiskusi serius, obrolan ini tidak lantas ditempat khusus, akan tetapi di teras depan rumah supaya terlihat santai, di samping itu para santri yang berseliweran di sekitar pondok dapat melihat pemandangan ini sehingga dapat menjadi pelajaran bagi mereka tentang makna ukhuwah basyariyah. Hal lainnya adalah setiap ada warga tionghoa yang meninggal dunia Gus Zaim selalu memyuruh sntrinya untuk ikut bertakziyah atau melayat sampai jenazah dimakamkan. Ini merupakan hal yang luar biasa dan menjadi cara yang ampuh untuk menancapkan sikap moderat dalam diri para santri dengan cara memberikan contoh langsung pada para santri. Ini lebih dikenal dengan istilah *hidden curriculum* atau kurikulum yang tersembunyi tetapi nyata dalam proses pembelajaran. *Hidden curriculum* konotasinya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang berhubungan dengan perilaku guru, dan dimensi yang berhubungan dengan implementasi konsep guru tentang apa, siapa dan bagaimana peserta didik diberlakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi bukan bagaimana materi pembelajaran diajarkan. Esensinya, hidden curriculum merupakan jalan *by pass* mewujudkan tujuan pendidikan nasional [14].

***Kedua*,** kurikulum pendidikan Islam bernuansa salaf yang membangun tradisi berpikir berdasarkan khasanah keilmuan Islam. Hal ini dilakukan dengan pengayaan Literasi Keagamaan demi menumbuhkan sikap moderasi agama bagi peserta didik di Madrasah Pesantren, Para siswa harus melek sumber agama. Sumber agama bisa dipahami melalui pemahaman atas *kitabturats* yang sering juga disebut kitab kuning. Dalam kontek praktik literasi keagamaan, madrasah pesantren memiliki referensi yang *based on* pada literasi yang bersifat orisinil (salafiyah) sebagaimana table di bawah ini:

Madrasah	Kitab Salaf
MA Al Anwar, Sarang	*Bulughul Maram, SafinatunNaja, TafsirJalalain, Taqrib, kailani*
MA Al Hidayat, Lasem	*FathulQarib, Tasawuf, Mantiq, Muhadatsah, Tafsir, Hadis, Musthalah hadis, Tajwid*
MA Qudsiyyah, Kudus	*Tafsir Jalalin, Bulughul Marom, Tuhfatul Murid, Takhrir, Sulamul Munawaroh, Qifayatul Atqiyak, Lubabul Ushul, Faroidus Sanniyyah wa Durorul Bahiyyah, Durusul Falaqiyah, Ibnu Aqil–Sarah alfiyah, Uqudul Juman, Mustholah Hadits, 'idlotun nasyi'in, Tasrihul Yasir*
MA Al Hidayah, Kudus	*Durusul Faroid, Alfiyah, Tafsir Jalalain, Fathul Qorib, Mabadi'ul awaliyah, Faroidu Saniyyah, Mandumatul Baiquni*
MA AlWathoniyyah, Semarang	*Aqidah, Ushul fiqih, Fiqih, Ilmu tafsir, Ilmu hadis, Nahwu, Shorof, Ilmu mantiq, Balaghoh, Ilmu mawaris*

Praktik ini dimulai dari penggunaan kitab-kitab salafiyah yang bermadzhab *ala madzahibil arba'ah* pada tataran hukum (syariah). Artinya, dalam suatu kasus tata cara melaksanakan praktik ibadah tidak memutlakkan pada satu pendapat yang dianggap benar dan memungkinkan ada pendapat yang lain juga sama benarnya. Adanya perbedaan ini karena mempertimbangkan ruang dan waktu serta variabel-variabel baru yang mengikuti arus dinamika zaman serta kebutuhannya. Sebagai contohnya adanya *qoul jadid* dan *qadim* merupakan wujud moderasi karena perubahan tersebut berdasarkan adanya *illat*.

Kitab-kitab tersebut dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar pada tataran kurikuler, sedangkang pada ranah ekstra di madrasah pesantren melaksanakan kegiatan *Bahtsu masa'il* yang dilakukan dalam satu tahun sekali. *Bahtsu masa'il* sebagai ciri khas dari pesantren. Kegiatan ini pada intinya membahas permasalah *waqi'iyah* yang ada di masyarakat untuk menemukan jawaban atau solusi serta dapat membuka gerbang moderasi dalam benak para santri. Senada dengan

hal ini Hani dan Ashif dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa menyajikan konsep pembelajaran fiqih berbasis masalah dapat membuka wawasan secara luas dan terbuka mengenai perbedaan hukum Islam yang di terapkan dalam masyarakat sehingga mampu memposisikan diri untuk berada di tengah dan berlaku moderat dalam menyikapi perbedaaan yang ada [15].

Bahtsu masa'il jika dilihat dari kegiatannya mencerminkan suatu model pembelajaran literasi keagamaan yang moderat. Ini sesuai dalam *Head of Religious Education Teachers of Religious Education [16]*, yang memiliki tujuh tahaapan. Yaitu *refleksi*, *inkuiri, empati, penalaran*, dan *komunikasi*, penulisan atau penginformasian jawaaban persoalan dan permasalahan dengan menggunakan diksi atau istilah yang mudah dimengerti.

Dari kegiatan *bahtsumasail* ini, memberikan pelajaran terhadap santri untuk membaca teks dan fenomena sosial keagamaan dengan sudut pandang yang komprehensif. Setidaknya mereka mampu memahami literasi yang mungkin bisa dilihat, diapresiasi, dan diakses di luar pandangan mereka. Hal ini memungkinkan para peserta didik mampu saling memahami, mengapresiasi, dan respek terhadap pluralitas. Dengan demikian, pemahaman keagamaan Islam moderat akan menjadi bagian dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupanpara santri

Ketiga, Moderasi *beragama* di MP Kawasan Pantura juga dilakukan melalui Pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam kegiatan berikut:

Madrasah	Kegiatan
MA Al Anwar, Sarang	UpacaraBendera, Pramuka, Paskibraka, Menyanyikan Syair Ya Lal Wathan
MA Al Hidayat, Lasem	Upacara Bendera, Pramuka, Marching Band, Paskibraka

MA Qudsiyyah, Kudus	Upacara Bendera, Pramuka, Menyanyikan Shalawat Kebangsaan (Asnawiyyah)
MA Al Hidayah, Kudus	Upacara Bendera, Pramuka, Pencaksilat
MA Al Wathoniyyah, Semarang	UpacaraBendera, Pramuka, Pencaksilat, MenyanyikanSyairYa Lal Wathan

Beberapa kegiatan tersebut dilakukan untuk menancapkan jiwa nasionalisme, bahkan beberapa madrasah yag kami teliti menyanyikan syair syair kebangsaan seagai sarana untuk *menguatkan* spirit nasionalisme. Seperti MA Al Wathoniyyah dan MA Al Anwar sarang yang selalu mengumandangkan Syair *ya lal wathon* karangan KH Wahab Hasbullah setiaphari. *Gagasan* tentang nasionalisme tersebut juga tampak dalam Shalawat Asnawiyah yang sangat populer di kalangan santri Jawa. Syair ini diciptakan oleh KHR Asnawi yang juga merupakan pendiri Madrasah Qudsiyyah, syair ini selalu dilantunkan setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dalam syair ini terdapat spirit nilai-nilai kebangsaan, seperti liriknya yang berbunyi *aman aman aman aman* Indonesia raya aman, merupakan sebuah doa untuk keamanan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Kecintaan terhadap Pancasila, pengenalaan etos kewargaan, nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan. Hanya saja MP mempunyai nilai tambah dalam Pendidikan kebangsaan ini, yakni pengayaan wawasan berdasarkan khasanah keislaman. Berbeda dengan Pendidikan umum, MP tidak hanya mengajarkan nasionalisme, tetapi juga nasionalisme perspektif Islam. Karena Islam sudah menjadi perspektif, maka penyampaian nilai-nilai kebangsaan, secara otomatis sering menggunakan khasanah wawasan keislaman. Pada titik ini, wawasan kebangsaan dan keislaman *telah* menjadi paradigma integral dalam proses Pendidikan MP, hasil dari integrasi pesantren dan madrasah itu sendiri.

Benih-benih nasionalisme ini selanjutnya dapat menghalau perilaku radikal yang tentunya dapat menghambat sikap *moderat* dalam diri para santri. Kekosongan materi yang mengajarkan wawasan

kebangsaan dan potensial diresapi paham-paham radikalisme di tubuh pondok pesantren salafi berpotensi menggiring para santri berpaham garis keras dan anti NKRI. Kondisi seperti ini bisa menjadi cikal bakal lahirnya radikalisme akut yang berujung pada terorisme [17].

D. Moderasi Beragama Madrasah Pesantren

Harus diakui bahwa pada diri madrasah melekat dua status sekaligus, yaitu: (1) madrasah sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan Islam, dan (2) madrasah sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan Islam madrasah dituntut untuk terus mewujudkan jatidiri kemadrasahannya dalam rangka mewujudkan visi dan cita tujuan pendidikan Islam. Sebagai subsistem pendidikan nasional madrasah dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konteks dan tantangan yang ada.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dalam mewujudkan tujuan sebagai ”sekolah umum” dan ”ciri khas Islam” madrasah dihadapkan pada berbagai problem dan dilema yang cukup berat. Sebagai ”sekolah umum” maka madrasah harus seratus prosen sama dengan sekolah, dan dalam mewujudkan ”ciri khas Islam” madrasah dituntut untuk membekali murid dengan *ulum al-din* secara proporsional sebagai pengejawantahan ciri kemadrasahan.

Desain pengelolaan pada madrasah dalam ketiga kategori di atas mengerucut pada model madrasah pesantren, dimana secara operasional pengelolaan antara madrasah dan pesantren berada dalam satu sistem manajemen. Artinya, suatu madrasah tidak hanya secara fisik berada dalam lingkungan pesantren tetapi antara madrasah dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi dan manajemen yang menyatu (*integreted*).

Tujuan dari penyatuan sistem pengelolaan ini adalah agar semua proses pendidikan berada dalam suatu sistem yang memungkinkan

semua kegiatan guru dan murid berada dalam satu alur dan paket program yang sama. Dari tiga model yang peneliti tawarkan, model ini yang paling ideal untuk sebuah proses pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan Islam (madrasah) saja tetapi juga untuk semua lembaga pendidikan pada umumnya. Dengan sistem atau model ini akan tercipta proses pendidikan holistik yang akan melahirkan *autput* dan *outcome* pendidikan berkualitas.

Dalam konteks moderasi, Madrasah Pesantren telah menerapkannya dalam sistem pembelajaran mereka. Hal ini tampak dalam kegiatan yang mereka lakukan:

1. Kurikulum[7]

a. Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas. dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik murid. Dalam hal ini termasuk pembelajaran yang rutin dilaksanakan setiap harinya. Salah satu mata pelajaran yang materinya memuat nilai nilai kebangsaan adalah pendidikankewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nialai budaya bangsa yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

[7]Kurikulum pada lembaga pendidikan islam atau umum dibagi menjadi dua yaitu kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi. Lihat dalam Ihsan dkk, The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesi'a Madrasah Since the Passage of the UUSPN, Educational Studies, Volume 47, Nomor 4, 2021, 3

melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Kegiatan Ekstra kurikuler

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) murid. Kegiatan ekstra kurikuler lebih pada pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh murid baik di Sekolah maupun di luar Sekolah. Dengan kata lain kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk membimbing murid mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam diri mereka.

Selain itu kegiatan ekstra kurikuler juga bertujuan untuk menambah pengetahuan murid tentang hal-hal yang kurang dikuasai sehingga purmenjadikan mereka, dari belum tahu menjadi tahu, dan dari yang belum bisa menjadi bisa. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan menumbuhkembangkan pribadi murid yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung-jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung jawab sekolah

Fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas murid sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Ekstra kurikuler memiliki fungsi sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial murid. Ekstra kurikuler juga mempunyai fungsi rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi murid yang menunjang proses perkembangan.

Pun ekstra kurikuler berfungsi sebagai persiapan karir, atau untuk mengembangkan kesiapan karir murid. Dalam pelaksanaan program kurikulum, demi menunjang proses pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan pemberian bekal *skill* dan ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat murid, baik dalam berorganisasi, olah raga, berkesenian dan berekspresi, maka di Madrasah Aliyah diadakan program ekstra kurikuler untuk menggali potensi murid dalam bidang non akademik, termasuk dalam rangka menguatkan pendidikan nilai- nilai kebangsaan.

c. Kegiatan Nonkurikuler

1) Upacara Bendera

Pengibaran Bendera Merah putih mencerminkan banyak sekali nilai-nilai luhur yang dapat ditumbuhkan. Bagi petugas pengibar bendera, ada nilai gotong royong, kekompakan, dan kebersamaan yang bisa diambil ketika melaksanakan tugasnya. Mereka harus terbiasa dan bisa mengharmoniskan posisi badan dan berakan ayunan tangan dan hentakan kaki mereka. Selain itu juga bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa ataupun menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme. Mengikuti kegiatan upacara hari senin dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri peserta upacara. Melalui kegiatan upacara hari Senin murid dapat mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur demi mendapatkan kemerdekaan dengan taruhan nyawa mereka.

2) Mengheningkan cipta

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik. Selain melatih kedisiplinan murid, juga bisa

mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Upacara bendera sebagai wujud menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 Perjuangan bangsa Indonesia memberi bukti betapa kemerdekaan adalah hal yang paling berharga dan sarat akan perjuangan. Perjuangan bangsa Indonesia itu tertuang pada Pembukaan UUD 1945, hal ini memiliki makna dan tujuan agar murid sebagai generasi penerus bangsa memahami perjuangan serta cita-cita pendiri bangsa terdahulu. Sehingga generasi penerus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.

Kegiatan yang tidak kalah penting dalam upacara bendera adalah pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan ulang oleh seluruh peserta Upacara. Hal ini dimaksudkan agar para peserta upacara dapat mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dengan harapan akan menumbuhkan sikap pancasilais di dalam diri dan jiwa para murid. Melalui kegiatan upacara bendera dapat membuat peserta upacara menghargai pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, para perumus pancasila (dasar negara) dan pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.

3) Menyayikan Syair kebangsaan

Syair dalam lagu wajib nasional akan mengobarkan semangat perjuangan sehingga dapat melatih untuk menghormati perjuangan para pahlawan bangsa dan mengenang jasa-jasanya di dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kekuasaan penjajah.

Dari beberapa madrasah, seperti MA Al Wathoniyyah dan MA Al Anwar Sarang, para pelajarnya mengaku, jiwa nasionalisme mereka bertambah ketika melantunkan lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya atau Ya Lal Wathon karangan KH Wahab Hasbullah setiap hari.

Gagasan tentang nasionalisme tersebut juga tampak dalam salawat Asnawiyah yang sangat populer di kalangan santri Jawa. Syair ini karya KHR Asnawi yang juga pendiri Madrasah Qudsiyyah, syair ini selalu dilantunkan setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dalam syair ini terdapat spirit nilai nilai kebangsaan, seperti liriknya yang berbunyi *aman aman aman aman Indonesia raya aman*, merupakan sebuah doa untuk keamanan dan kejayaan bangsa Indonesia. Denan kata lain nilai berbangsa yang hendak ditanamkan adalah berbasis pada pondasi keagamaan dan keilmuan[8]

Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Syair kebangsaan juga mengajarkan mereka untuk mencintai tanah air. Selain menjadikan mereka terbuka dengan nilai-nilai budaya, anak-anak pun akan tumbuh jadi pribadi yang lebih perasa terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Dengan lagu, mereka tidak berpikir dengan kaku, tapi justru lebih luwes menemukan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari. Menjadi pribadi yang tangguh dan penuh rasa percaya diri.

[8]Ihsan dkk*, Narasi Satu Abad: KHR. Asnawi, Madrasah Qudsiyyah & Hikayat Santri Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Sahila, 2016), vii.

4) *Hidden Curriculum*

Hidden curriculum adalah segala kegiatan yang mempengaruhi murid, baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan murid di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah.[9] Dalam kebijakan sekolah yaitu bagaimana sekolah menerapkan kebiasaan atau berbagai aturan disiplin yang harus diterapkan pada seluruh komponen sekolah atau warga sekolah.

Di antara kebiasaan sekolah tersebut misalnya: kebiasaan ketepatan guru melalui pelajaran, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, bagaimana guru menyikapi berbagai kenakalan murid baik di luar ataupun di dalam sekolah. Pengembangan dari pengertian *hidden curriculum* adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam kesehariannya serta interaksinya terhadap sesama warga sekolah maupun dengan Tuhan. Segala kegiatan yang dilakukan ini tidak tertulis dalam dokumen sebagaimana kurikulum yang ideal, akan tetapi sebuah kebijakan sekolah yang menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut.

Hidden curriculum berfungsi memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupan di kemudian hari. Dalam hal ini dapat mempersiapkan murid untuk siap terjun di masyarakat.

Secara teori banyak yang menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk *hidden curriculum* yang dapat ditelusuri melalui

---

[9]Ihsan, Islamic Nationalism based on Islamic Boarding Schools: Study of Madrasas and Islamic Boarding Schools in the North Coast Region of Central Java Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, No. 7, 2020, 473.

berbagai aspek dan dimensi. Dalam menanamkan *hidden curriculum* terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji. Hidayat menjelaskan ada 2 aspek dalam kegiatan *hidden curriculum* yakni aspek struktural (organisasi), dan aspek budaya. Dua aspek ini yang menjadi contoh dan panduan untuk melihat dan mendengar dalam *hidden curriculum* di sekolah. Pertama, aspek struktural menjelaskan tentang pembelajaran di kelas, berbagai kegiatan sekolah diluar kegiatan belajar, dan berbagai fasilitas disekolah. Kedua, aspek kultural mencangkup norma sekolah, etos kerja, peran dan tanggungjawab, relasi sosial, ritual dan perayaan ibadah, toleransi, kerjasama, kompetisi, ekspektasi guru terhadap murid, dan disiplin waktu.

Dari uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan bahwa model moderasi beragama di Madrasah pesantren tercermin dalam nilai Islam Nusantara sebagai berikut:[10]

1. *Institutional Identity*

Cerminan nilai Islam Nusantara yang sangat kentara serta langsung dapat dilihat kasat mata adalah seragam madrasah yang dikenakan guru maupun muridnya dengan pakaian khas nusantara. Pakaian seragam batik merupakan salah satu pakaian khas nusantara yang dipakai setiap hari sabtu dan minggu, selain itu seragam khas *kudusan* juga diprogramkan setiap hari kamis, yakni dengan memakai ikat kepala, sarung batik dan baju putih.

Dengan begitu para santri dapat mengenal budaya nusantara yang tersirat dalam seragam madrasah. Di samping itu para santri juga mampu memahami makna islam nusantara yang tersirat dalam pakaian seragam yang dipakainya bahwa

[10]Ihsan dkk, Actualization of Islam Nusantara Values at Madrasah Qudsiyyah Kudus Vol.16 No. 1, 2021, 147

inilah pakaian islami *ala* nusantara. Bukan jubah, bukan pula gamis, melainkan sarung batik. Sebagai bukti pakaian adat, ini menjadi simbol yang melekat pada diri santri serta murid-siswi madrasah.

2. *Teaching Materials/References to Javanese*

Warisan Islam Nusantara lainnya yang tak ternilai harganya adalah munculnya banyak ulama Nusantara beserta maha karyanya yang hingga kini terus menjadi mata air pengetahuan dan penelitian para intelektual Indonesia maupun dunia (Darajat 2015).

Sebagai sampel di Madrasah Qudsiyyah, beberapa karya sesepuh pendiri madrasah yang sampai saat ini tetap eksis digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran diantaranya; Kitab Fashalatan, Tauhid Jawan, Kitab Soal Jawab Mu'takad Seket, karya KHR Asnawi sebagai pendiri. KH Yahya Arif salah satu masyayikh madrasah Qudsiyyah juga menulis kitab kitab yang dijadikan sebagai modul pembelajaran seperti nahwu, lughah, mahfudhat, fiqih, ushul fiqih, falak, faraidl, dan masih banyak lagi. KH M. Sya'rani Ahmadi sebagai nadzir Qudsiyyah juga merilis bermacam-macam kitab dari berbagai disiplin ilmu.

Kitab-kitab tersebut untuk memudahkan para santri dalam mempelajari kitab kuning. Mayoritas kitab tersebut ditulis dengan bahasa Jawa agar mudah difahami oleh para santri, selain itu Bahasa jawa merupakan Bahasa lokal nusantara sehingga juga membawa misi islam nusantara. Bahan ajar yang tak kalah nusantaranya adalah kitab falak yang digunakan di madrasah Qudsiyyah yang mengajarkan hitungan penanggalan aboge dan asapon sebahgai bentuk identitas maasyarakat Jawa memudahkan santri untuk memahami konten ilmu yang berbahasa arab.

Mayoritas kitab yang ditulis para masyayikh tersebut merupakan petikan, rangkuman atau bahkan terjemahan dari kitab klasik yang berbahasa arab karya ulama timur tengah, nah para masyayikh berusaha mengambil nilai atau intisarinya kemudian ddisusun dengan bahasa ibu masyarakat jawa sebahgai upaya melestarikan budaya dan misi syiar islam nusantara.

3. *Activity Assence*

Beberapa kegiatan yang dapat menstimulus jiwa santri dalam mendalami nilai Islam Nusantara diantaranya penanaman karakter cinta tanah air atau nilai kebangsaan. Islam Nusantara mengajarkan untuk mencintai tumpah darah tanah kelahiran. Aktualisasi nilai Islam nusantara di madrasah Qudsiyyah juga dilakukan melalui Pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam kegiatan kulikuler, misalnya melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn), Sejarah, Tata Negara, dan lain-lain.

Berbagai upaya penguatan etos kebangsaan ini sudah *inheren* di dalam sistem pendidikan nasional, baik yang ada di dalam kurikulum maupun *hidden curriculum*. Berbagai penguatan itu juga terdapat didalam kegiatan intra-kurikuler, ekstra-kurikuler, kegiatan ekstra-kurikuler yang dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan antara lain pramuka yang bertujuan untuk membentuk karakter murid yang berbudi luhur, menannamkan rasa cinta tanah air, memiliki sikap kekeluargaan, serta selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila, Dasadarma dan Trisatya. Dan juga kegiatan yang bersifat non-kurikuler seperti upacara bendera, Pengibaran Bendera Merah putih mencerminkan banyak sekali nilai-nilai luhur yang dapat ditumbuhkan.

Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi para santri. Syair kebangsaan juga

mengajarkan mereka untuk mencintai tanah airnya. Kegiatan lainnya adalah ziarah yang merupakan tradisi nahdhiyyah secara rutin dilaksanakan di madrasah ini, baik di makam sunan kudus pada bulan muharram maupun di makam pendiri madrasah KHR Asnawi beserta masyayikh lainnya. Kegiatan ini dimaksud untuk hurmat dan doa atas jasa para muassis serta dalam rangka *nguri-uri* tradisi nusantara *sowan* leluhur sebagai bentuk penghormatan dan *ngalap berkah* dari para sesepuh. Selain itu juga sebaagai penyambung spirit perjuangan dan pembelajaran antar generasi.

4. Kontra radikalisme melalui penguatan Pancasila

Strategi deradikalisasi melalui PAI berbasis penguatan pendidikan Pancasila memiliki dua posisi strategis. *Pertama*, secara langsung meruntuhkan kritik terdalam kaum radikal atas Pancasila sebagai dasar negara nasional RI. Hal ini dilakukan melalui penunjukan sifat Islami dari Pancasila dan NKRI.

Tentu kaum radikal yang dimaksud di sini ialah radikalisme politik (*salafi haroki*) dan radikalisme teroristik (*salafi jihadi*) yang mencitakan pendirian *khilafah* atau *daulah Islamiyyah*. Dengan cita-cita seperti ini, NKRI tentu terposisi sebagai opisisi karena ia dianggap bagian dari praktik kekufuran akibat adopsi atas sistem politik non-Islam.

Pada titik ini, sebagai dasar negara nasional, Pancasila menjadi penyangga bagi bentuk negara-bangsa (*nation-state*) yang telah membuyarkan kesatuan wilayah politik Islam (*kekhilafahan*) yang global. Serta menjadi dasar kosntitusional bagi tegaknya kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dianggap menciderai kedaulatan Allah (*hakimiyyatullah*). Ini tentu berbeda dengan *khilafah* atau *daulah Islamiyyah* yang berbasis pada *hakimiyyatullah*, dan menempatkan syariah sebagai konstitusi negara. Maka Pancasila akhirnya dibenturkan dengan

konstitusi syariah, NKRI dibenturkan dengan *daulah Islamiyyah*, dan demokrasi dibenturkan dengan kedaulatan Allah. Logika pembenturan Islam dan Pancasila ini tetap mengendap di kepala kaum radikal, sejak HTI, hingga gerakan jihadis penegak syariah seperti MMI, JAT, JAK, MIT, dan lainnya.[11]

Proses peruntuhan argumen kontra-Pancasila ini dilakukan melalui pembuktikan dimensi Islami atau agamis dari Pancasila. Artinya, ketika kaum radikal menolak Pancasila atas nama Islam, maka deradikalisasi berbasis Pancasila menunjukkan sebaliknya, yakni dimensi Islami dari Pancasila dan NKRI. []

[11]Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisongo* 2012, 85

BAB V
KEBERHASILAN MODERASI BERAGAMA MODEL MADRASAH PESANTREN

A. Kiai Moderat

Sampai saat ini, pesantren tetap menjadi warisan sekaligus kekayaaan budaya dan intelektual Nusantara. Bahkan, dalam beberapa aspek tertentu, pesantren dapat dipahami sebagai benteng pertahanan terhadap kebudayaan itu sendiri, karena peran sejarah yang dibuktikannya. Harapan dimaksud, tentunya sangat mendorong pada penguatan dan konstruk budaya yang telah digariskan para pendirinya. Hal pokok yang menjadi konsen pesantren adalah sebagai pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan yang berdimensi relijius, dan motor penggerak transformasi bagi masyarakat dan bangsanya.

Sejarah telah membuktikan bahwa konsistensi pesantren terhadap *manhaj al-fikr al-salafy* (metode berfikir sesuai nilai-nilai salaf) telah menjadikannya mampu bertahan dari segala deraan dan tantangan zaman. Pesantren dapat bertahan dengan tegar ketika sistem pendidikan yang lain hanya sibuk mengurusi politik dan birokrasi. Demikian pula, pesantren juga tetap hidup dengan moderasi dan toleransinya ketika muncul lembaga Islam lain yang justru mengarahkan muridnya untuk tidak toleran terhadap umat lain.

Kiai hakikatnya memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial. Perubahan tersebut ada kalanya ke arah positif, ada pula yang mengarah pada hal negatif. Hal positif, seperti santri atau masyarakat bersikap sopan, taat beribadah, bijak dalam berinteraksi sosial. Adapun hal negatif, seperti santri melakukan tindakan radikal, dakwah dengan cara keras.

Aspek yang berpengaruh dan berdampak dari kiai terhadap santri serta masyarakat adalah pemikiran, sikap, kesantunan, wibawa, kharisma, keteladanan, dan cara dakwah. Beberapa cara dakwah efektif yang digunakan kiai, seperti dakwah melalui nasihat, hikmah, dialog, dan tidak mendiskriminasi sosial. Melaui perannya dalam membimbing, mengarahkan. Semua aspek tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap dan karakter para santri. Beberapa bentuk moderat pesantren dapat dilihat dari sistem lembaga dan prosesnya. Pertama, aspek sistem lembaga.

Gagasan moderat terlihat dari beberapa semboyan pesantren. Seperti semboyan: *berdiri di atas dan untuk semua golongan*. Pesantren itu terbuka untuk semua kalangan dan inklusif. Ada pula semboyan: *abantal shahadat, asopo' iman, apajjung Islam*. Artinya santri harus memiliki iman kuat, dan konsisten dalam mengamalkan syari'at Islam. Budaya lokal yang menjadi unggulan di pesantren tesebut adalah hormat pada guru. Kedua, aspek proses. Seluruh proses kegiatan belajar santri didampingi guru.

Hasil penelitian menujukkan beberapa indikator moderat kiai dapat dipetakan pada empat aspek. Pertama, aspek akidah atau ideologi. Para kiai dalam menggunakan dalil seimbang antara dalil *naqli* dan *aqli*, mereka tidak mudah memvonis orang lain salah. Kedua, aspek sosial. Para kiai bergaul dengan semua golongan, mengutamakan urusan bersama, dan perdamaian. Ketiga, dalam aspek kebudayaan. Mereka cenderung lebih menekankan preventif daripada *punishment* dengan kekerasan. Demokratis dan membiasakan budaya musyawarah dalam memutuskan perkara. Budaya toleransi dengan tetap menjaga budaya atau metode lama yang baik, dan tetap terbuka dengan kebaruan atau teknologi. Keempat, dalam aspek kebangsaan. Menjaga eksistensi kesatuan bangsa dengan menjunjung sikap toleransi, menghormati serta menaati pemerintah selama tidak menyimpang dari norma dan agama, dalam menyampaikan pendapat atau kritik kepada penguasa dengan cara bijak tanpa kekerasan.[1]

---

[1]Muhammad Idlom Dzulqarnain, JASNA: Journal for Aswaja Studies Volume 1 No 2, 2021, 99.

Dengan demikian, kiai moderat di era kekinian paling tidak dapat kita lihat dari sosok KH. A. Mustofa Bisri dari Nahdlatul Ulama serta Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah. Dua tokoh ini paling tidak mewakili wajah moderat kiai masa kini yang selalu sejuk dan bijaksana dalam dakwah dan kiprahnya. Keduanya selalu menebar kasih sayang kepada umat serta menjauhkan dari pertikaian dan tentu saja menjadi pemersatu bangsa ini.

Seorang kiai merupakan penggerak dalam pembentukan karakter warga pondok pesantren atau yang sering disebut dengan santri. Dalam kegiatan pembelajaran, maka posisi kiai sebagai transformator ilmu, transformator tindakan dan transformator keberagamaan secara utuh. Oleh karena itu, di pondok pesantren, kiai berperan dan berfungsi sebagai pembimbing, teladan, gerbang ilmu dan pengayom.

a) Kiai sebagai Pembimbing

Efektifitas peran kiai dalam proses pembentukan perilaku keberagamaan santri di pesantren Qudsiyyah ini disebabkan oleh karena beberapa peran dan fungsi yang sang kiai yaitu sebagai pembimbing. Berbekal kelebihan dan keunggulan yang dimiliki para kiai, menjadikannya memiliki *kharisma* yang tercermin melalui ilmu, perilaku, kepribadian, serta posisi struktural dan kulturalnya. Karena itulah, para kiai menjadi sosok yang dikagumi sekaligus menjadi panutan para santri. Kiai, oleh para santri dianggap sebagai sosok yang lebih dekat dengan Allah SWT sehingga dapat menjadi perantara yang menenteramkan suasana hati para santri. Karena itulah, nasehat para kiai menjadi sesuatu yang selalu dinantikan oleh para santri.

b) Kiai sebagai Teladan

Kiai sebagai teladan (*uswah khasanah)* yakni memberikan contoh nyata melalui keselarasan antara ucapan dan tindakan, baik

selama di dalam maupun di luar pesantren. Salah satu comtoh kiai sentral, yang sekaligus menjadi *nadlir Qudsiyyah* Kudus, KH. Sya'roni Ahmadi, yang segala tutur kata dan perilakunya selalu menjadi tauladan, bukan hanya bagi para santri tetapi juga bagi para kiai muda lain di pesantren.[2] Bahkan selama mengajar, beliau selalu datang tepat waktu, bahkan tidak jarang datang lebih awal sebelum para santri datang. Hal ini, selain contoh nyata dari cara mengajarkan sikap kedisiplinan juga bentuk penghormatan terhadap ilmu. Secara tidak langsung, para santri yang pada awalnya merasa *sungkan*, pada akhirnya menjadi disiplin dalam proses belajar.[3]

c) Kiai sebagai Gerbang Ilmu

Dalam konteks ini, para kiai di Qudsiyyah telah melahirkan banyak karya yang menjadi rujukan pengetahuan keagamaan. Pendiri Qudsiyyah, K.H.R. Asnawi sendiri merupakan sosok yang mempunyai beberapa karya masyhur, dan sampai saat ini banyak menjadi rujukan dalam pendidikan Islam. Untuk menyebut beberapa diantaranya seperi, *Fashalatan, Tauhid Jawan,* Soal Jawab *Mu'takad Seket*, dan syair-syair nasehat seperti *Shalawat Asnawiyah,* yang telah dinobatkan sebagai sholawat kebangsaan.

Tradisi menulis ini pun berlanjut ke para santri beliau, seperti K.H. Yahya Arif, penulis kitab yang dijadikan sebagai panduan (modul) dalam proses pembelajaran *nahwu, lughah, mahfudhat, fiqih, ushul fiqih, falak, faraidl,* dan lain-lain. K.H. M. Sya'roni Ahmadi, *nadzir Qudsiyyah* juga merilis beberapa kitab, antara lain *al-Faraid al-Saniyah* yang mengupas tentang doktrin *Ahlusunnah wal Jama'ah*, *Faidl al-Asany* yang membahas *Qira'ah al-Sab'iyyah*, *al-Tashrih al-Yasir fi 'ilmi al-Tafsir* tentang tafsir Al-Qur'an mulai dari pembacaan, lafal, sanad, dan artinya, *Tarjamah Tashil al-Turuqat* membahas ilmu *manthiq*, *Tarjamah al-Ashriyyah*

[2]Ihsan, *Guru Ngaji Wong Kudus*, (Semarang: NEED'S Press, 2012), 128.
[3]Wawancara dengan Fakhruddin, Kepala MA Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020.

membahas ilmu *Ushul Fiqh*, dan *Qira'ah al-Ashriyyah* yang sangat membantu para santri dalam mempelajari *kitab kuning*.[4] Salah satu kutipan santri Qudsiyyah penyusun syi`ir *Syaikhona* yaitu Fathur Rohman*: karena merasa sedih dan duka yang mendalam (wafatnya Kiai) saya coba ungkapan rasa itu menjadi menjadi lirik lagu.. juga menjadi kenangan dan doa*.[5]

d) Kiai sebagai Pengayom

Sosok kiai yang *ngemong* para santri ini diwujudkan dalam proses pembelajaran. Apa yang dipraktikkan oleh Kiai Nor Halim Ma`ruf dapat menjadi salah satu contoh. Dalam proses belajar-mengajar, beliau selalu menampakkan wajah dengan penuh senyuman, dan memperlakukan santri layaknya anak sendiri.[6] Sikap dan perilaku ini, ditujukan agar para santri memiliki rasa kedekatan dengan kiai-nya, sehingga ilmu yang diberikan pun akan dengan mudah masuk dalam jiwa para santri. Jika pun ada santri yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pesantren, maka hukuman yang diberikan bukan berbentuk hukuman fisik tetapi lebih pada hal-hal yang dapat menggugah dan membuka hati para santri, seperti membaca surat Yasin, membaca salawat, istighfar dan lain sejenisnya.[7]

B. Literasi Moderat

Secara sederhana literasi diartikan sebagai kemampuan dalam "melek wacana". Pengembangannya merupakan bentuk integrasi dari kemampuan mendengarkan, berbicara, memirsa, membaca, menuis,

---

[4]Wawancara dengan Ali Yahya, Waka Kurikulum MA Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020.

[5]Wawancara dengan Fathur Rohman, penyusun syi`ir *Syaikhona* pada Jumat, 12 Februari 2021.

[6]Wawancara dengan Fakhruddin, Kepala MA Qudsiyyah pada hari Selasa, 10 November 2020.

[7]Wawancara dengan KH. Fathur Rahman, Kepala *al-Mudirul Khas* Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020.

dan berpikir kritis. Kemampuan literasi ini merupakan fondasi atau dasar penentu keberhasilan dalam pendidikan.[8] Budaya membaca berbanding lurus dengan tingkat kemajuan pendidikan suatu bangsa.[9] Dimana membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Parameter kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi pendidikannya.

Bagaimana memahami literasi moderat yang berkembang di negeri ini? Tentu saja semua itu tak buisa dilepaskan dari bagaimana Islam berkembang di negeri khatulistiwa ini. Islam Indonesia terbentuk hingga menjadi sebuah aliran (*school of thought*) membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang. Istilah itu sendiri tidak serta merta lahir dan baku, akan tetapi melalui proses dan pergulatan yang cukup melelahkan. Paradigma hukum, teologi, sufi, politik, budaya dan lainnya diformulasikan oleh penggagasnya dalam ruang-waktu yang berbeda. Masing-masing bidang merupakan akumulasi pemikiran pencetusnya sebagai respon atas persoalan yang muncul saat itu. Kehadiran Islam Indonesia secara sporadis dari generasi yang berbeda tidak bisa ditafsirkan bahwa bangunan pemikiran mereka tidak kongruen dan sebangun, karena tetapi tetap ada sel yang dapat menyatukan, bahkan saling melengkapi.

Sebagai sebuah terminologi, Islam Indonesia membutuhkan analisis tersendiri. Term Islam sudah dikenal sejak abad ke 6, sementara term Indonesia baru dikenal pada bad ke 20, tepatnya saat sumpah pemuda pada tahun 1928. Sebelum itu, term yang muncul adalah Nusantara. Dengan demikian, Islam Indonesia menggabungkan pemikiran abad ke 6 dan abad ke 20. Sebuah penggabungan yang berisiko secara praktis dan metodologis. Sebab, abad ke 6 adalah abad yang secara keilmuan didominasi wacana filsafat. Sementara

---

[8]Sri Triatri, *Bunga Rampai Psikologi Dari Anak Sampai Usia Lanjut,* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 45.

[9]Ihsan, *Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Berbasis Literasi Pesantren*, Libraria, 2018, Vol. 6 (1); 179.

tahun 1928 adalah masa peralihan dari pra-modern ke modern. Masa modern titik tolaknya adalah perang dunia II. Pada masa inilah terjadi peralihan besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia ilmu dan agama.

Bagaimana corak pemikirannya? Untuk berbicara ini kita perlu melihat rentang sejarah yang cukup panjang. Asal muasal masuknya Islam di Nusantara sendiri masih perlu diteliti lebih lanjut. Sementara ini, literatur menyebutkan ada empat tesis tentang masuknya Islam ke Nusantara, yakni dari Gujarat, dari Bengal, dari Malabar, dan dari Arab. Penyebarannya dilakukan melalui jalur kebudayaan, perekonomian, dan politik.[10]

Penyebaran tersebut dilakukan melaui pesisir. Hal ini karena peradaban manusia umumnya lahir dari sebuah permukiman di sepanjang tepi sungai atau laut, setelah mereka berpindah dari kehidupannya di goa-goa. Lihatlah misalnya peradaban Mesir dibangun di deretan tepi sungi Nil. Lutetia, cikal bakal Paris, berada dibelah Sungai Seine. Tepi sungai atau pantai kemudian didesain sedemikian rupa menjadi sebuah tontonan eksotis yang merangsang untuk dinikmati. Sebut saja Bali dengan Kute-nya, London dengan Sungai Thames, Hongaria dengan Budapest dan Rusia dengan St. Petersburg.

Di wilayah pesisir inilah mereka mendirikan kerajaaan. Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Perlak di Pantai timur Sumatera yang dipimpin oleh Sayyid abdul Aziz, keturunan Quraisy aliran Syi'ah yang berkuasa tahun 1161-1186 M. Disamping itu, di sebelah utara sumatra juga muncul kerajaan Pasai yang dipimpin oleh Najmuddin al-Kamil yang berfilisasi dengan dinasti Fatimiyyah di Mesir. Ketika Dinasti ini dihancurkan Salahuddin al-Ayyubi yang bermadzhab Syafi'I tahun 1168, Kerajaan Pasai diserang oleh Laksamana Johan Jani, seorang peranakan India Persi yang juga

[10]Nur Syam, *Islam pesisir,* (Yogjakarta: LKiS, 2005), 59-61.

bermadzhab Syafi'i. Ditangan Jani, Pasai menjadi kerajaan terbesar di Nusantara.[11]

Dua abad kemudian, Pulau Jawa "diserbu" Walisongo. Mereka memilih pulau Jawa karena saat itu Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan di Nusantara dengan Majapahit sebagai poros uatamanya. Sebagai pusat perniagaan, tentunya Jawa banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Jawa, sehingga diharapkan para pedagang inilah yang nantinya akan menyebarkan ajaran Islam di daerah asal mereka.

Mengingat sudah dari asalnya berbeda, maka aktualisasi Islam di Nusantara adalah campuran dari aspek lokalitas, mulai dari Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity* yang menjadi benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Corak berpikir ini terus berlangsung, bergulat dan tarik menarik hingga awal abad 20, dimana Indonesia lahir. Wacana pemikirannya cenderung dibagi secara dikotomis menjadi modernis dan tradisionalis. Orang yang paling bertanggung jawab dalam menyebarkan distingsi –yang kemudian menjadi dikotomi– antara "Islam tradisionalis" dan "Islam modernis" ini adalah Deliar Noer. Ia telah membuat secara tegas perbedaan mendalam antara Muhammadiyah, Persis, dan sejenisnya sebagai kelompok modernis, dan NU sebagai kelompok tradisionalis.[12] Padahal dalam realitasnya, pengelompokan seperti itu sudah tidak relevan lagi, karena telah muncul mazhab baru, neo modernisme dan

---

[11]Selamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya negara Islam Nusantara,* (Yogjakarta: Lkis, 2005), 131-146.

[12]Azyumardi Azra, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 60-61.

post tradisionalisme. Bahkan ditangan intelektual seperti Barton, tipologi tradisionalis-modernis menjadi benar-benar telah mandul.[13]

Akar-akar dari neo-modernisme membumi secara kuat pada liberalisme Islam. Dalam perjalanannya, aliran ini mendapat dukungan dan penganut bukan saja dari orang-orang yang selama ini dikenal berasal dari kelompok "modernis", tapi juga dari kalangan yang berbasis "tradisional".

Kemunculan neo-modernisme –sampai batas tertentu– dilatar belakangi kekecewaan (atau tepatnya keprihatinan) terhadap aliran-aliran kelompok muslim yang lahir sebelumnya. Mazhab ini melihat bahwa umat Islam dalam beragam alirannya –misalnya modernisme klasik dan neo-revivalis– dianggap kurang berhasil menyikapi modernitas yang telah merambah ke dalam kehidupan umat Islam sejak awal abad ke-20 yang lalu. Modernisme klasik memiliki dua kelemahan mendasar yang terletak pada ketidakmampuannya menguraikan metode dan implikasi-implikasi dari prinsip-prinsip dasarnya, serta pada pemilihan masalah-masalah *ad hoc* yang pada dasarnya telah menjadi masalah di dan bagi dunia Barat.[14] Rasionalitas sebagai bagian dari metodologi mereka belum dijadikan sebagai metodologi yang mandiri. Lebih dari itu, mereka terkesan apologetik dan terkadang menjadikan teks suci sebagai justifikasi atas isu-isu modernitas yang mereka angkat.

Inilah faktor utama yang mengantarkan lahirnya neo-modernisme. Kemunculannya lebih bersifat sebagai pencarian yang lebih independen terhadap sikap yang otentik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berubah.[15] Visi yang

---

[13]Bahasan secara rinci tentang runtuhnya teori itu dapat dibaca dalam Gregory James Barton*, The Emergence of Neo-Modernism; a Progressive, Liberal Movemement of Islamic Thought in Indonesia: A Textual Study Examining the Writing of Nurcholish Madjid*, *Djohan Effendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid 1968-1980,* dan karya-karya lain yang sejenis.

[14]Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities" dalam Alford T. Welch dan Pierre Cachia (eds.), *Islam: Past Influence and Present Challenge*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), 324.

[15]John L Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York – Oxford: Oxford University Press,

ditawarkan adalah membumikan nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam kehidupan konkret sehingga umat Islam dapat menjadi modern tanpa harus mengorbankan identitas dasar mereka.

Kerja besar neo-modernisme ini mewujud dalam pemikiran yang sangat beragam sesuai dengan persoalan pokok yang menjadi perhatian mereka. Ada yang menekankan pada teori modernisasi sebagaimana yang dilakukan Nurcholish Madjid, pribumisasi Islam ala Gus Dur, dan transformasi sosial model Kuntowijoyo. [16]

Pada saat yang sama, tantangan terhadap neo-modernisme juga lahir, khususnya dari mereka yang berasal dari basis "tradisional". Mereka menyikapi neo-modernisme sebagai gerakan yang lebih dekat dengan kelompok "modernis" dan kurang berpijak pada tradisi intelektual mereka. Tantangan itu kian menganga ketika pemikir-pemikir Arab kontemporer, semisal Muhammad Abid al-Jabiri dan Nashr Hamid Abu Zaid –dengan geneologi yang berbeda dari neo-modernisme– menggagas tentang perlunya penyandingan secara kritis pendekatan-pendekatan modern dengan khazanah tradisi Islam klasik.

Sebagai jawabannya, mereka memproklamirkan aliran baru dengan sebutan Islam Nusantara. Gerakan pemikiran ini bermula dari komunitas-komunitas kecil warga *Nahdhiyin* yang secara intens melakukan kajian dan penelitian atas berbagai pemikiran keagamaan, filsafat, teori-teori sosial, serta sekaligus terjun ke lapangan melakukan pendampingan dan advokasi. Agak berbeda dengan kelompok neo-modernisme yang pendukungnya dari kalangan akademisi, pendukung kelompok Islam Nusantara tidak terbatas sekadar dari kelompok mahasiswa atau sarjana, tapi juga dari kalangan pesantren tradisional.[17]

1988), 182.

[16]Budhy Munawar-Rachman, "Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah: Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia" dalam Edy A. Efendi (ed.), *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat*, Cetakan I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), 262.

[17]Marzuki Wahid, "Post-Tradisionalisme Islam: Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, (Edisi No. 10 Tahun 2001), 14.

Islam Nusantara merupakan konstruk pemikiran yang berpijak pada dinamika budaya lokal Indonesia, dan bukan tekanan dari luar, yang berinteraksi secara terbuka bukan hanya dengan berbagai jenis kelompok masyarakat, tapi juga mengkondisikan mereka berkenalan dengan pemikiran luar yang bukan berasal dari kultur tradisionalisme mulai dari yang liberal dan radikal sampai dengan yang sosialis-Marxis, dan post-strukturalis-post-modernis.[18]

Dengan demikian, Islam Nusantara memiliki semacam obsesi untuk menggabungkan tradisi intelektual Islam klasik dengan segala pemikiran yang berkembang dewasa ini dalam rangka menjadikan Islam sebagai praksis yang membebaskan manusia. Islam perlu dikembangkan sebagai landasan yang dapat melihat tradisi sebagai sesuatu yang cair dan dinamis.[19]

Terlepas dari adanya perdebatan epistemologis terhadap eksistensi Islam Nusantara ini, fakta sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum perdebatan ini lahir, kalangan pesantren telah melahirkan banyak karya moderat yang membentang hampir di semua disiplin ilmu. Sebutlah misalnya genealogi keilmuan dan model beragama kaum santri, sebagaimana ditulis Abdurrahman Mas'ud dalam disertasinya "The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching" yang melacak pemikiran dan sanadnya hingga generasi para wali. Para wali di buktikan oleh Abdurrahman Mas'ud berhasil mentransmisikan Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah secara moderat, terbuka dan luwes.

Zainul Milal Bizawi mendokumentasikan karya ulama pesantren dengan judul "Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama Santri 1830-1945" membuktikan jaringan para

[18]Untuk menelusuri pergolakan pemikiran ini bisa dilihat dalam Ahmad Baso, The Intellectual Origins of Islam Nusantara A Study on a Globalising Indonesian Islam and Reform of Hegemonic Reason (Jakarta: Pustaka Afid, 2017); Ahmad Baso, NU studies Pegolakan pemikiran antara fundalisme islam dan fundamentalisme neo-liberal (Jakarta: Erlangga, 2006)

[19]Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara : Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 176

ulama Nusantara yang damai. Terinspirasi Milal, Ahmad Ginanjar Sya'ban memperkokoh temuan tersebut dengan karya terbarunya, "Mahakarya Islam Nusantara: Kitab, Naskah, Manuskrip dan Korespondensi Ulama Nusantara".

Di mata kaum santri, karya-karya tersebut bukanlah sekedar materi pembelajaran, akan tetapi pembentuk karakter moderasi beragama para santri. Dari kitab kuning, transmisi nilai, tradisi, dan ilmu pengetahuan dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jama'ah terjadi dalam pesantren. Termasuk di dalamnya nilai dan tradisi moderasi beragama. Watak dan karakter Islam moderat yang diwarisi dari para wali ditransmisikan melalui kitab kuning. Karakter moderasi santri karena setiap hari mereka disodori *khilafiyyah,* perbedaan pendapat dengan argumentasi yang jelas. Keanekaragaman madzhab dan interpretasi menjadikan santri berfikir luas, tidak menunggalkan tafsir, sehingga mereka jauh dari pikiran hitam putih dan merasa merasa paling benar.

C. Habitus Moderat

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya. Habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang.

Dengan cara pandang yang demikian, maka habitus tidaklah bebas nilai. Habitus menyembulkan cara pandang dalam menyikapi, membincangkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.[20]

[20]Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 292-324.

Sistem dengan berbagai kerangka ideologis dapat diumpamakan sebagai permukaan cermin. Realitas yang kita tangkap adalah apa yang dipantulkan oleh sebuah cermin, sementara pantulan itu sendiri tergantung pada permukaan cermin. Jika cerminnya cembung, realitas yang kecil bisa menjadi besar. Jika cerminnya cekung, maka realitas yang besar bisa menjadi kecil. Demikian pula jika cerminnya retak. Maka realitas yang menyatu dan koheren akan tampak tercerai-berai. Karena itu, kerangka ideologis yang berbeda akan merefleksikan realitas yang berbeda pula.[21]

Beberapa habitus moderat yang merupakan bukti keberhasilan Madrasah Pesantren adalah, *pertama,* nasionalisme. Kultur nasionalisme menjadi bagian dari praktik keberagamaan para santri. Pasalnya, gagasan tentang nasionalisme ini menjadi bagian dari proses pembelajaran santri. Terutama tampak dari salawat kebangsaan, seperti *Ya lal wathan* dan Salawat Asnawiyyah. *Salawat Asnawiyah* yang sangat populer di kalangan para santri. Syair yang diciptakan oleh K.H.R. Asnawi, sang pendiri Qudsiyyah ini selalu dilantunkan oleh para santri setiap hari, sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Selain berisi nilai-nilai kebangsaan, seperti liriknya yang berbunyi "*aman aman aman aman Indonesia raya aman"*, syair ini juga diyakini sebagai bentuk do'a untuk keamanan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Kedua, anti-fanatik. Sikap ini tampak pada kemampuan Qudsiyyah dalam mengikuti perkembangan zaman secara dinamis. Madrasah Qudsiyyah selalu terbuka dengan berbagai dinamika perubahan. Terbuka tidak berarti bebas berubah tanpa pedoman, tetapi dengan tetap menerapkan *filter* terhadap setiap perubahan yang terjadi. Filter yang digunakan sering disebut dengan istilah *mizan al-syar'i,* dengan tujuan membuka dan menghindarkan diri dari kejumudan dalam kerangka; "melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru (inovasi) yang lebih baik". Pendidikan di Qudsiyyah,

---

[21]Jesse F Dillard, "Accounting as a critical social science" dalam *Accounting, Auditing, and Accountability Journal, vol 4,* 1991.

lebih dikenal sebagai sekolah/Madrasah berbasis keagamaan, tetapi dalam perkembangannya juga membuka program ilmu pengetahuan alam. Kurikulum yang dikembangkan pun menekankan pada *critical and creative thinking,* di mana murid diarahkan menjadi insan yang mampu bersikap terbuka dan tidak fanatik.

Ketiga, tradisi menulis. Tradisi ini sudah mengakar sejak Qudsiyyah berdiri dan sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun dari para kiai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil karya santri, baik berupa buku, buletin mingguan seperti *el-fajr,* buletin 3 bulanan seperti *el-wijhah*, dan majalah tahunan *el-Qudsy*. Sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi menulis ini, Qudsiyyah selalu memberikan motivasi para santri untuk menulis, dengan cara memberikan *training* jurnalistik dan ceramah ilmiah.

Keempat, tradisi ilmiah. Sejak dini murid selalu diajarkan untuk bersikap kritis, tanggap terhadap fenomena, dan mampu memberikan solusi. Dari sinilah terbentuk tradisi ilmiah, kebiasaan menanggapi suatu permasalahan, dengan berorientasi memberikan solusi dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Contoh tradisi ilmiah yang dipraktikkan antara lain, forum *bahtsu al-masa'il* yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Qudsiyyah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari para santri yang mumpuni dalam penguasahaan kitab kuning, dengan mengkaji berbagai tema faktual yang ada di masyarakat. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mengasah kemampuan santri dalam penguasaan dan pemahaman literatur agama Islam klasik sebagai pijakan menyikapi dan mengatasi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Tradisi Moderat

Sadar atau tidak, perbincangan Islam modern di Indonesia merupakan satu tema keagamaan yang tidak saja penting, namun juga menarik. Dikatakan menarik karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah satu wujud negara yang memiliki ciri geografis yang majemuk. Terdiri dari ratusan, bahkan ribuan pulau. Masing-masing pulau dipenuhi suku dan etnis berbeda. Setiap

dari mereka mempunyai latar kebudayaan, adat, tradisi, bahkan sistem dan wujud kepercayaan (baca: agama) berbeda antara satu dengan lainnya. Fakta atas segala perbedaan ini adalah bukti nyata betapa Indonesia merupakan negera plural yang keberadaannya harus dijaga, dirawat, dikelola, bahkan harus diimbangi oleh satu bangunan sistem peraturan yang dapat merangkul semuanya.

Dalam kaitan ini, membincang Islam moderat sama kedudukannya membicarakan realitas Indonesia yang majemuk dan bineka. Kemajemukan dan kebhinekaan Indonesia ada satu kelebihan dan kekayaan Indonesia yang tidak saja khas, unik, namun juga suatu yang menarik di mata negera lainnya.

Pada saat bersamaan, diskursus Islam moderat di Indonesia dianggap penting karena dalam kenyataannya, saat ini ada banyak sikap, perilaku, dan tindakan sentimen keagamaan yang cenderung anarkis, kasar, dan memuat kekerasan. Gejala ke arah tersebut nampak jelas dalam realitas (paham/kelompok) keagamaan Indonesia saat ini. Ada banyak pristiwa pergesekan, perselisihan, bahkan hingga aksi persekusi antara satu sama lain. Puncak dari semuanya adalah menggeliatnya benturan dan konflik antara (paham) keagamaan yang secara nyata menjadi ancaman besar. Bukan saja bagi stabilitas bangsa negara, namun juga bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dipertontonkan oleh kelompok atau paham keagamaan beralirkan fundamentalisme dan ekstrimesme.[22]

Di Indonesia, term Islam moderat sejatinya sudah bergulir sejak lama, perbincangan tentangnya telah diangkat dalam banyak kesempatan. Di sektor politik, terutama pada awal masa transisi demokrasi Indonesia pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, term Islam moderat digaungkan secara besar-besaran. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelaraskan hubungan demokrasi dan Islam, yang

[22]Ahmad Baso, *Pesantren studies 2a: Buku II Kosmopilitanisme peradaban kaum santri di masa colonial*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 79

saat itu memantik perdebatan banyak kalangan. Sejulmah kelompok menganggap demokrasi dapat didudukkan bersama, karena keduanya adalah satu pandangan hidup universal yang menawarkan satu bangunan visi-misi sama.

Dalam sejarah keagamaan (Islam) di Indonesia, secara genealogis keberislaman moderat sesunguhnya secara praktik sudah telah diperkenalkan oleh pesantren. Terutama melalui nilai ajaran keIslaman yang dibawa oleh walisongo. Walisongo merupakan sosok pelaku dakwah abad XV-XVI yang dikenal berhasil mengintegrasikan aspek keagamaan dengan produk kebudayaan atau tradisi di luarnya. Memadukan kebiasaan masyarakat yang bersifat transinden dengan suatu yang profan. Melalui model dakwah mereka yang mengusung prinsip kultural, walisong berhasil memperkenalkan wajah kerahmatan Islam dengan cara elegan. [23]

Cara tersebut secara signifikan berhasil mempengaruhi banyak masyarakat. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip- prinsip Islam. Dalam kenyatnnya, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan- bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Kehadiran wajah Islam Indonesia yang mengusung semangat kearifan lokal, meminjam bahasa Azyumardi Azra, merupakan karakter asli dari wujud keberilsman Nusantara (Indonesia) yang moderat, bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat bersandingan. Demokrasi adalah sistem tata kelola pemerintahan yang lahir dari rahim kebudayaan barat. Sebaliknya, Islam memiliki sudut pandang sendiri perihal bagaimana mengelola dan membentuk sistem pemerintahan. [24]

[23]Faruk, "Menyingkap dan Membangun Multi-Kulturalisme" dalam Th. Sumarthana et. al. (eds.), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: DIAN/ Interfedei, 2001), 16 -17.

[24]Data lebih lanjut, baca: Barrie Axford, *The Global System; Economic, politics and Culture,* (Cambridge: Polity Press, 1995), 64-93

Pada saat bersamaan, sejumlah kalangan (muslim) menegaskan bahwa Islam dan keberislaman nusantara ini, Mark Woodward dalam studinya menemukan fakta, bahwa jika ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan Jawa, seperti *grebeg*, *selametan*, *kalimasodo*, adalah bagian dari ajaran Islam. Selain itu, doktrin *Kawula Gusti Martabat Tujuh* dan tradisi wayang yang dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Jawa, dapat ditelusuri asal usulnya dari tradisi tasawuf Islam.[25]

Dalam konteks dinamika keislaman Indonesia kontemporer, term Islam moderat selama ini disandarkan pada dua organisasi keislaman besar, yakni Nahdhatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Meski ada dalam kutub berlainan, namun keduanya diikat oleh kesamaan pandangan untuk menjalankan fungsi kerahmatan Islam, yakni menghadirkan satu rupa keagamaan yang berkesesuaian dengan realitas kebangsaan Indonesia. Bangsa yang terbentuk di atas tipologi masyarakat yang majemuk, bineka, plural, dan beraneka ragam.

Dalam NU, sikap keberislaman moderat tercermin nyata dari komitmen mereka untuk menghadirkan satu karakteristik keIslaman yang dapat bersanding mesra dengan nilai-nilai lokalitas. Meminjam konsepnya Syafi'i Ma'arif, menumbuhkan cara berislam dalam Bingkai Keindonesiaan, Sedangkan dalam Muhammayah, keberislaman moderat terletak pada semangat mereka dalam upaya melakukan proyek pembaruan. Senantiasa melanjalankan agenda revitalisasi studi ke-Islaman. Menumbuhkan semangat *tajdid* dalam upaya menselaraskan teks-teks keagamaan dengan semangat

[25]Penjelsan secara konseptual dapat dilihat di J. D. J. Waardenburg, "Official and Popular Religion as a Problem in Islamic Studies" dalam *Official and Popular Religion*, ed. Pieter H. Vrijhof and Jacques Waardenburg (Paris: Mouton Publisher, 1979), 340.

pembangunan kekinian. Agenda rethinking keislaman yang dilakukan Muhammadiyah, pada batasan-batasan tertentu, berhasil melahirkan paradigma keberIslaman modern. Di satu sisi terbuka terhadap perkembangan zaman, namun di sisi lain tetap berakar kuat pada subtansi keagamaan Islam.

Bagi NU sendiri, menyebut mereka sebagai kelompok Islam moderat merupakan satu kewajaran. Jika ditelusuri lebih jauh, klaim moderat terhadap keberadaan NU bukan semata terletak pada semangat ke-Islaman mereka yang bias kultural. Lebih dari itu, ada pada semangat ajaran mereka yang termuat dalam tiga prinsip, yakni *al-tawâssuth* (berada di tengah), *itidâl* (tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri), dan *al-tawâzun* (keseimbangan, tidak berat sebelah antara dimensi *duniawi* dan *ukhrawi*) (Muzadi, 2007). Demikian tercantum jelas dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010:

> "Untuk mewujudkan hubungan antar-bangsa yang adil, damai dan manusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, maka Nahdlatul Ulama bertekad untuk mengembangkan ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah Wathaniyah, dan ukhuwwah Insaniyah yang mengemban kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-ikhlas (ketulusan), al-adalah (keadilan), al-tawassut (moderasi), altawazun (keseimbangan), dan al- tasamuh (toleransi)".

Jika ditelusuri lebih mendalam, trilogi ajaran NU sebagaimana tercantum jelas dalam anggaran dasar di atas, kesemuanya merupakan hasil perasan dari sumber tertinggi Islam, yakni Al-Quran. Ajaran tentang *al- tawâssuth* adalah turunan dari Surat al-Baqarah ayat 143. Sedangkan konsep *al-i"tidal* diproduksi dari Surat al- Ma'idah, ayat 8. Adapun ajaran *al- tawâzun* merupakan turunan dari Surat al- Hadîd ayat 25. Dalam tradisi NU, ketiga ajaran tersebut adalah kesatuan nilai dalam beragama yang harus ditransformasikan sedalam mungkin ke semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Baik

itu menyangkut aktivitas yang murni berkaitan dengan keagamaan seperti ritual dan keilmuan, maupun ke dalam sektor sosial seperti dalam bergaul, berkomunikasi, atau bahkan dalam berhubungan dengan (paham) keagaman di luar mereka. Dalam hal akidah, shariah, akhlak, pergaulan antar-golongan, kehidupan bernegara, kebudayaan, dakwah dan bidang-bidang lainnya.[26]

Penjelasan di atas memiliki keselarasan dengan banyak kajian yang telah dilakukan sebelumnya, berkenaan dengan hubungan NU dengan Islam moderat di Indonesia, klaim bahwa NU memiliki karakter dan ciri keagamaan moderat pada dasarnya sudah sudah banyak diungkap. Studi yang dilakukan Muhammad Ali, Masdar Hilmy, dan Ahmad Najib Burhani, dan Toto Suharto, kesemuanya sepakat mengkatagorisasikan NU bukan saja sebagai Islam moderat, namun juga memiliki kedudukan sebagai kelompok Islam mainstream di Indonesia, melebihi ormas lain, bahkan dengan Muhammadiyah sendiri yang sejauh dianggap mempunyai paradigma lebih modernis.

Adapun Muhammadiyah, sikap mereka terhadap term Islam moderat mempunyai keseragaman dengan NU. Bahwa Muhamadiyah, meski dalam beberapa kajian seringkali dibenturkan dengan ormas NU, pada kenyatannya sama-sama memuat tradisi keberislaman yang mengusung spirit moderat. Klaim moderatisme Muhammadiyah di sini secara nyata dapat kita temukan dalam banyak kajian. Salah satuanya adalah studi yang dilakukan Burhani (2012), dia mengkaji sikap religius Muhammadiyah terhadap isu keagamaan kontemporer yang belakangan muncul dalam diskursus keIslaman, seperti pluralisme, liberalisme dan Islamisme.

---

[26]Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di Ahmad Baso, *Islam nusantara ijtihad jenius & ijma' ulama Indonesia jilid 1 : dialog-dialog santri-kiai tentang studi Islam dan kajian ke-Indonesia-an dari PBNU)pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk dunia*, (Jakarta: Pustaka Afid, 2015), 78-134

Secara umum, sikap keberislaman moderat Muhammadiyah tercermin jelas berdasarkan hasil Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Bandung tahun 2012, yang dirumuskan dalam Kristalisasi Ideologi dan Khittah Muhammadiyah. Salah satu keputusannya adalah penajaman ideologi Muhamadiyah, yakni ideologi Islam berkemajuan yang menempatkan Islam sebagai Dîn al- Hadârah. Rumusan Islam kerkemajuan di sini selanjutnya dikontekstualisasikan melalui beberapa karakter, yakni; pertama, tajdîd. Bahwa dalam upaya menjalankan agenda pembaruan, perlu ditumbuhkan semangat ijtihad yang mendasarkan kuat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, menanamkan semangat dan corak reformis-modernis yang bersifatkan *wasatîyah* (tengah, moderat). Karakter *wasatiyah* (tengah/moderat) ciri khas sekaligus pembeda Muhammadiyah dengan ormas lain yang menganut paham dan perilaku ekstrim. Ketiga, mengedepankan sikap pro kemajuan dan anti kejumudan, pro perdamaian dan anti kekerasan, pro keadilan dan anti penindasan, pro kesamaan dan anti dikriminasi. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang autentik sesuai jiwa ajaran Islam. [27]

Berdasarkan ideologi, ajaran, dan nilai moderat ini, jelas menunjukkan bahwa Nahdhatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah merupakan miniatur kemoderatan Indonesia. Baik dalam beragama, berbangsa, bersosial, dan bernegara, yang mutlak berbeda dengan gerakan Islam radikal-liberal yang memiliki kecenderungan berperilaku berlebihan. Pun juga berbeda dengan gerakam Islamisme radikal-fundamentalis yang senantiasa berorientas pada pemaknaan dan pemahaman Islam secara kaku dan normatif. Seperti halnya kelompok Islam beralirkan Salafi, Wahabi, dan kelompok Islam HTI yang secara nyata memberi anacaman cukup besar bagi Kesatuan Negara Republik Indonesia.

[27]Lihat Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab*, (Ttp: al-Dar al-Fanniyah, Tth.), 24.

E. Penerimaan Azas Tunggal Pancasila

Sebagaimana ditulis oleh Andree Feillard, sejak awal Orde Baru memang menginginkan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang mesti diterima semua golongan. Demi tujuan tersebut, pemerintah kemudian menggunakan berbagai langkah politik sebagai tahapan perwujudannya. Pada 1966 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyelenggarakan seminar di Bandung tentang ideologi nasional. Seminar itu merekomendasikan Pancasila sebagai asas ideologi setiap partai, organisasi sosial-keagamaan, serta administrasi pemerintahan. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan usaha memberlakukan asas tunggal pada 1975 meskipun menemui kegagalan karena muncul respons negatif. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat pemerintah putus asa. Pemerintah secara bertahap kemudian mendekati berbagai organisasi sosial dan politik untuk menjelaskan kebijakan itu secara argumentatif dan memberikan beberapa konsesi yang dianggap perlu.

Namun hal itu masih menuai respons negatif dari berbagai elemen masyarakat. Semua agama besar yang diakui secara resmi mengemukakan keberatan mereka terhadap rencana itu. Pada 6 November 1982, kelima organisasi yang mewakili kelima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha) mengeluarkan pernyataan bersama bahwa masing-masing ingin mempertahankan asas keagamaan mereka dan berjanji akan membuat pengikut mereka tetap menjadi orang beragama dan Pancasilais. Melihat penolakan semua ormas, pemerintah kemudian mengubah rencana penyatuan ideologi yang telah diajukan ke DPR dengan mengkhususkannya hanya pada partai politik. Perubahan itu dilakukan atas usul Fraksi ABRI, Bakin, dan Wanhankamnas.[28]

Melihat begitu ngotonya pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal, sebagian menerimanya dan sebagian lagi menolak

[28]Andre Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 233-258.

dengan berbagai aksi politik. Namun pada umumnya perkembangan itu mengecewakan sebagian besar masyarakat Muslim. Mereka merasa bahwa tidak saja tokoh-tokoh politik mereka disingkirkan dari arus utama politik, tetapi bahkan diskursus politik negeri ini pun tidak mencerminkan bahwa mayoritas penduduknya Islam. Mereka melihat bahwa pemerintah Orde Baru memperlakukan para pemimpin dan aktivis Islam, terutama dari Masyumi, secara tidak semestinya. Karena itu bisa dipahami jika sebagian kalangan melihat kebijakan asas tunggal Pancasila sebagai upaya lebih jauh untuk melakukan depolitisasi Islam.

Berdasarkan hal itu, tidak mengherankan jika oposisi paling gigih terhadap politik asas tunggal datang dari sayap modernis, khususnya kalangan modernis tua. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi modernis radikal pimpinan Mohammad Natsir, mengeluarkan reaksi paling keras. Mereka menerbitkan sebuah pamflet yang menolak keras asas tunggal dengan asumsi bahwa hal itu adalah lanjutan dari proyek sekularisasi dan depolitisasi Islam Indonesia. Dalam bukunya, Deliar Noer merumuskan pandangan kaum modernis itu dengan tepat. Menurutnya, jika PPP (kelompok Islam) menerima asas tunggal, maka sama saja dengan:

a. Islam dipisahkan dari politik, yang berarti menempatkan Islam sama saja dengan agama yang lain dalam hubungannya dengan politik.
b. Islam seakan-akan tidak relevan dengan tuntutan zaman.
c. Islam seakan-akan menjadi sebab timbulnya kekacauan di masa yang lalu karena bertolak belakang dengan Pancasila.

Sedangkan Pelajar Islam Indonesia (PII), suatu organisasi yang berafiliasi dengan kelompok modernis, sampai dengan batas akhir yang diberikan pemerintah, tetap tidak mau mengganti asas Islam dengan Pancasila. Konsekuensinya, kegiatan PII dibekukan oleh pemerintah, yang dikukuhkan melalui SK Menteri Dalam Negeri No. 120 dan 121 tanggal 10 Desember 1987. Tanggapan yang lebih rumit dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam proses itu, HMI pecah menjadi

dua kubu, yaitu kelompok sempalan yang menolak Pancasila sebagai asas dan menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), dan kelompok HMI Diponegoro yang menerima asas tunggal. HMI MPO yang dipimpin oleh Eggie Sudjana mengklaim sebagai organisasi Islam sejati karena tetap mempertahankan Islam sebagai asas tunggalnya. Walaupun demikian tetapi HMI MPO tidak dibubarkan oleh pemerintah. HMI MPO tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan sering tampil sebagai rival dari HMI Diponegoro.[29]

Muhammadiyah, organisasi modernis nonpolitik, menyatakan penerimaannya setelah UU Keormasan disahkan oleh pemerintah pada 1985. Penerimaan itu dilakukan setelah organisasi ini cukup lama mempertimbangkan secara kritis dan matang untuk mengambil keputusan.[30] Dalam pandangannya, Pancasila sama sekali bukan masalah baginya, karena secara historis tokoh-tokoh senior Muhammadiyah telah ikut berperan dalam merumuskan Pancasila. Peranan Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dibantah dalam perumusan Pancasila sehingga dapat diterima sebagai dasar negara. Atas dasar itu, Muhammadiyah dalam muktamarnya di Surakarta pada 1986 akhirnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan tetap mempertahankan ciri keislamannya.[31]

Meskipun perlu ditambahkan bahwa tidak semua tokoh terkemuka Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang sama dalam merespons isu asas tunggal. Ada sementara penganut garis keras dalam tubuh Muhammadiyah yang merasa enggan dan bahkan keberatan untuk menerima asas Pancasila. Salah seorang penganut

---

[29]M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia,* (Jakarta: Paramadina, 1995), 110.

[30]Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional dar al-'ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT".Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila SebagaiDarul Ahdi Wa Syahadah, (Makassar: Muktamar Muhammadiyah Ke-47, 16-22 Syawal H/3-7 Agustus 2015 M),12.

[31]Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 247.

garis keras itu adalah HA Malik Akhmad, wakil ketua Muhammadiyah, yang siap menerima pembubaran Muhammadiyah oleh pemerintah. Segaris dengan itu, pengurus pusatnya meminta fungsionaris Muhammadiyah di Sumatera Barat untuk mengundur- kan diri karena menolak asas tunggal. Pernyataan itu dianggap menyalahi resolusi pengurus pusat yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Penolakan juga terjadi dari kelompok sempalan muslim yang menyulut peristiwa Tanjung Priok pada September 1984. Amir Biki, tokoh penting kelompok ini, bersama para aktivis lainnya, terbunuh di tangan pasukan keamanan. Jenderal L.B. Moerdani dan Try Soetrisno, ketika itu sering dituding bertanggung jawab. Kalangan Islam berpendapat bahwa jumlah korban yang mati terbunuh akan jauh berkurang jika ABRI tidak menggunakan cara-cara keras dalam menangani kasus tersebut.

Sedangkan di jajaran partai politik, tiga partai yang diakui pemerintah semuanya menyatakan kesediaannya menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. PPP sebagai satu-satunya partai yang mengakomodasi Islam politik, secara mudah menerima kebijakan asas tunggal. Partai tersebut mengganti asas Islam dengan asas Pancasila dalam konstitusinya serta mengganti lambang Kakbah dengan lambang bintang, meskipun ketika Reformasi bergulir akhirnya memakai kembali asas Islam serta Kakbah sebagai lambang organisasi.

Berbeda dengan beberapa kalangan modernis di atas, kelompok tradisionalis meresponsnya dengan cara yang lebih moderat, bahkan NU adalah ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. NU yang didorong oleh Kiai As'ad Syamul Arifin, Kiai Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda seperti Abdurrahman Wahid berhasil menerima Pancasila sambil tetap mempertahankan *aqidah islamiyah* sebagai dasar aktivitas organisasi. NU menunjukkan sikap yang akomodatif, terutama setelah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama pada 1983 di Situbondo.

Sebelum Munas, Kiai As'ad *menemui* Presiden Soeharto dan hanya diberi waktu 15 menit. Tapi pembicaraan ternyata berlangsung

gayeng, sehingga obrolan berlangsung lebih dari 1 jam. Lewat gaya komunikasinya yang santun dan terkadang jenaka, As'ad menegaskan kepada Soeharto agar Pancasila hendaknya hanya sebagai dasar negara, sementara agama adalah dasar hidup bersama. "Apa mau menerapkan Pancasila sebagai agama terus membuang Islam dan lain-lain? Kalau Pancasila ditempatkan sebagai agama, kita berpisah sampai di sini," kata As'ad menyampaikan aspirasi dan kegelisahan para kiai dengan tegas.

Soeharto pun tersentak. Jenderal penguasa Orde Baru itu menegaskan, Pancasila tidak akan dijadikan agama atau agama dijadikan Pancasila. Tapi Pancasila akan menjadi semacam pintu gerbang untuk masuknya semua agama, semua komponen bangsa, untuk bersama-sama membangun bangsa. "Agama ya agama, Pancasila ya Pancasila."

Dengan penjelasan tersebut, As'ad akhirnya bisa menerima dan menegaskan pendirian NU yang siap menerima Pancasila. Sebab, sejak semula NU memang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sang "Smiling General" pun manggut-manggut. "Islam wajib menerima Pancasila, dan haram hukumnya bila menolak. Sila pertama itu selaras dengan doktrin tauhid, *qul huwa Allahu ahad*," tutur As'ad. Penafsiran Pancasila pun harus dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita sebaiknya tidak memisahkan keyakinan tauhid umat Islam dengan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Namun, kalau masyarakat menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, hal ini menjadi idaman bagi setiap muslim. Karena itu, "Pancasila bisa menjadi potret Piagam Madinah di zaman modern ini.[32]

Akhirnya, pada munas Alim Ulama Nu di Situbondo tahun 1983, dicetuskan suatu deklarasi yang nantinya dipergunakan para

[32]Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 136.

elite NU sebagai justifikasi doktrinal untuk menerima Pancasila. Deklarasi itu berbunyi:

a. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
b. Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjiwai sila-sila yang lain dan mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam merupakan aqidah dan syari'ah yang meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
e. Sebagai konsekuensi logis dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan juga mengamankan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Deklarasi itu didasarkan pada keyakinan NU bahwa persoalan Pancasila sebetulnya telah selesai jauh sebelumnya sejak disepakati sebagai dasar negara oleh para pemimpin bangsa pada 18 Agustus 1945. Selain itu juga terletak pada fakta bahwa salah seorang perumus Pancasila adalah Wahid Hasyim, seorang figur penting di NU. Maka pada Muktamar 1984, NU dengan bulat menetapkan bahwa Pancasila merupakan asas organisasinya. Tidak ada laporan baik sebelum ataupun selama Muktamar tentang pemimpin atau fungsionaris

NU pada tingkat pusat maupun daerah yang menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut.[33]

NU dengan cara yang menarik berhasil memperbaiki hubungannya yang retak dengan pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada identitas keislamannya. Para tokoh NU sukses menyesuaikan diri dengan bangunan politik Indonesia yang begitu kompleks, dan juga dengan atmosfer kekuasaan saat itu, tanpa meninggalkan tujuan utama organisasinya. Hal itu tentu saja juga memiliki latar belakang yang jelas. Bersamaan dengan lahirnya kebijakan asas tunggal, di tubuh NU sendiri telah terjadi reformasi kepemimpinan. Elite pimpinan yang selama ini didominasi oleh ulama-politisi digantikan oleh generasi baru nonpolitisi yang sedang tumbuh dan didukung oleh ulama kharismatik. Para pimpinan baru itu melihat perlunya menata kembali hubungan dengan pemerintah yang tidak harmonis.

Setiap perubahan kebijakan di tubuh NU jangan semata-mata dilihat dari kacamata praktis, melainkan didasarkan pada konteks historis dan tradisi moderatisme yang menjadi ciri khas NU. Oleh sebab itu peneliti seperti Nakamura menolak kesimpulan yang diberikan Geertz, Castles, dan Feith yang menganggap NU sebagai kelompok oportunistik. Menurut Nakamura, kenyataan-kenyataan yang terjadi khususnya pada periode pengasastunggalan mendorong pada kesimpulan yang berbeda. NU memperlihatkan elastisitas paradigmatiknya dalam konteks sosial-politik yang selalu berubah. Cara NU yang merupakan organisasi pesantren menerima asas Pancasila pada gilirannya menjadi model yang dicontoh, baik disadari atau tidak, oleh organisasi-organisasi Islam lainnya. Semua oraganisasi keislaman menerima kebijakan asas tunggal dengan berbagai improvisasi. Oposisi, tokoh dan aktivis Islam garis keras yang menolak asas tunggal menemui kegagalan. Penguatan ideologi

---

[33]Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 250. Lihat juga Abdurrahman Wahid, “Nahdlatul Ulama dan Islam”, dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 201.

Pancasila harus dilakukan dalam satu langkah dengan penguatan paham keislaman moderat.[34]

F. Bhinneka Tunggal Ika

Kebhinekaan dan kehidupan adalah dua sisi mata uang yang sama. Kehidupan terjadi karena adanya keragaman ciptaan Tuhan. Hidup adalah siang dan malam, bumi dan langit, laut dan darat, barat dan timur, serta tumbuhan dan binatang. Dinamika perkembangan terjadi karena adanya keanekaan alam diolah secara kreatif-arif oleh manusia yang beragam. Manusia tidak berhak menjadikan kehidupan serba tunggal, sebab kehidupan berjalan di atas roda keragaman.

Secara hakiki, kebinekaan bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling dipertemukan, untuk tunggal ika. Masing-masing memiliki potensi, kreasi, kearifan dan karakter yang bisa disandingkan, dikembangkan dan disumbangkan demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang tertulis di pita berwarna dasar putih yang dicengkram cakar Elang Garuda, adalah bait yang dikutip dari Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin sendiri adalah syair dalam bahasa Jawa *kuno* dengan metrum yang berasal dari India. Biasanya sebuah kakawin dalam metrum tertentu, minimal terdiri dari satu bait. Dan setiap bait memiliki empat lirik dengan jumlah suku kata yang sama: terdiri dari guru dan laghu. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,

[34]Ihsan dan Ahmad Fatah, Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java, QIJIS, 2021, 9 (1): 245.

Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
(Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada
kerancuan dalam kebenaran). [35]

Perlu menjadi catatan, bahwa struktur sosial kerajaan Majapahit saat itu memiliki ragam masyarakat yang majemuk. Masyarakat tidak hanya menganut agama Hindu dan Buddha tetapi juga ada yang memuja roh-roh leluhur. Masyarakat di lingkungan kerajaan Majapahit saat itu terbagi menjadi tiga golongan, yakni golongan pertama adalah orang-orang yang beragama Islam yang datang dari barat dan tinggal di Majapahit; golongan kedua adalah orang-orang Cina yang berasal dari Canton, Chang-chou dan Ch'uan-chou yang letaknya di Fukien yang kemudian hijrah dan bermukim di sini. Sebagian besar dari mereka kemudian memeluk agama Islam dan menyiarkan agama tersebut; dan golongan ketiga adalah penduduk pribumi yang berjalan tanpa alas kaki, rambutnya digelung di atas kepala. Mereka percaya sepenuhnya kepada roh-roh leluhur.[36]

Sekarang, *Bhinneka Tunggal Ika* bukan saja sebagai sebuah jargon yang dihapalkan dan diulang, melainkan sebagai sebuah "organisme" yang hidup, berkembang, dan mempengaruhi orang yang dihinggapi. Keragaman bukan pepatah suci yang dihafalkan, tapi benar-benar perintah agama untuk dipraktekkan secara kongkrit dalam kedidupan diatas pondasi Bhinneka Tunggal Ika.

[35]Terjemahan ini didasarkan, dengan adaptasi kecil oleh Soewito SantosoSantoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana,* (New Delhi: International Academy of Culture,1975), 578.

[36]Agneta Schreurs**, "**Spiritual Relationships as an Analytical Instrument in Psychotherapy With Religious Patients", dalam *Journal of Philosophy, Psychiatry, & Psychology* – Vol. 13, no. 3, September 2006, hlm. 185.

Dalam konteks Moderasi beragama agama, semua ajaran agama-agama yang ada di Indonesia, semuanya mengakui dan menghargai kebinnekaan, sebagaimana tabel berikut ini: [37]

NO	AGAMA	LANDASAN TEOLOGIS	LANDASAN IDEOLOGIS
1	Islam	Islam menerima dan menghargai semua perbedaan-perbedaan yang ada dan berkembang di masyarakat. Islam sangat inklusif akan perbedaan. Islam hadir dan diajarkan agama umatnya mau memahami, saling mengenali, dan saling menghargai perbedaan kebudayaan yang ada. Misalnya, bagaimana paradigma teologis Qur'ani yang menyatakan bahwa Allah-lah yang menciptakan manusia ini berbeda-beda, kendati Allah sangat mampu untuk menciptakan manusia menjadi satu bentuk saja (Al-Qur'an; 11;118) atau lihat al Qur'an 5: 48). Atau bagaimana Allah tidak mewajibkan umatnya agar memaksa seorang individu memeluk agama Islam dengan cara-cara pemaksanaan (al Qur'an 2: 256). Atau bagaimana Allah menciptakan agama berbeda dan melarang umat Islam mencaci-maka sesembahan agama lain (al Quran 22:40 & al Qur'an 6:108).	Abdurrahman Wahid memahami pluralisme sebagai sebuah pandangan yang menghargai dan mengakui adanya keragaman identitas, seperti suku, agama, budaya, ras, dll. Pluralisme bukanlah ide yang ingin menyamakan semua agama sebagaimana yang selama ini sering dituduhkan, karena setiap agama tentu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Pluralisme, demikian Gus Dur, tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan seharusnya menjadi sarana bagi manusia untuk memahami anugerah Tuhan agar tercipta toleransi dan harmoni di tengah kehidupan. Gus Dur sering menganalogikan konsep pluralisme yang ia miliki ibarat sebuah rumah besar yang terdiri atas banyak kamar dan setiap orang memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Saat di dalam kamar, setiap orang dapat merawat dan menggunakan kamarnya serta berhak melakukan apapun di dalam kamarnya. Namun ketika berada di ruang tamu atau ruang keluarga, maka setiap penghuni kamar wajib melebur untuk menjaga kepentingan rumah bersama.

[37]Ihsan dkk, *Kudus Kiblat Bhineka Tunggal Ika*, (Kudus: Farum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2019), 29.

	Tidak hanya dalam al Qur'an, di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi rujukan utama umat Islam bertindak dan bersikap, juga mengajarkan hal serupa. Fakta sosiologis yang mungkin universal dari perilaku, ucapan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW *(sunnah nabawiyah)*, ialah ketika Nabi membangun negara Madinah. Nabi tidak menggunakan al Qur'an sebagai Undang-Undang yang mengatur masyarakat cosmopolitan di negara baru tersebut. Melainkan nabi membuat perundang-undangan sendiri, yang dibingkai dan dirumuskan bersama-sama dengan masyarakat sekitar, bernama *mithaq al Madinah* (piagam Madinah). Piagam ini, di kalangan akademik, disandingkan dengan terminologi *politic of multiculturalism* (politik proteksionisme terhadap keragaman masyarakat) di kalangan umat Islam. Melalui piagam ini juga, Nabi Muhammad mengakui keberadaan agama lain, yang lebih awal dipeluk masyarakat sekitar, sebelum Islam *hijrah* ke Madinah. Nabi Muhammad juga mengatur bagaimana umat Islam, wajib melindungi eko-sistem agama tersebut, agar terus berkembang dan diajarkan pada pemeluknya.	Semua penghuni kamar wajib bekerjasama merawat, menjaga, dan melindungi keseluruhan bagian rumah tersebut. Ketika terjadi serangan dari luar, maka mereka -tanpa mempermasalahkan asal kamar- harus bersatu melawan para penyerang yang ingin merusak keberadaan rumah tersebut. Bila dihubungkan dalam konteks negara, maka seluruh warga negara yang menjadi penghuni rumah NKRI wajib merawat, menjaga, dan melindungi rumah besar NKRI yang telah dibangun di atas fondasi Pancasila dan keragaman identitas primordial Senada dengan Gus Dur, Nurcholis Madjid menyatakan bahwa konsep pluralitas umat manusia sangatlah fundamental (asasi) dalam Islam. Islam, secara konsisten, dapat diubah ke dalam bentuk-bentuk pluralisme dan toleran. Pluralisme di sini dipahami sebagai ikatan murni dari berbagai peradaban akan dimenasi perbedaan di lingkungan masyarakat. Pluralisme sejati memang jarang terjadi dalam sejarah, tetapi Islam telah menunjukkan kemungkinan itu. Lebih jauh, Madjid menyatakan bahwa kebebasan agama dalam konteks Indonesia adalah suatu peningkatan kesadaran agama Islam tradisional dan perspektif modern.
		Demi integritas agama, negara tidak ingin memaksa atau mendidik kepercayaan seseorang, yang sesungguhnya disaksikan oleh Kitab Suci alQur'ān. Tampaknya, menurut al-Qur'ān sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, bahwa pluralitas adalah tatanan komunitas manusia, semacam hukum Tuhan (sunnatullah). Oleh karena itu, adalah hak istimewa Tuhan untuk menjelaskan kehidupan selanjutnya mengapa orang berbeda cara antara satu dengan yang lain.

2	Kristen	Allah yang menyatakan diri kepada umat pilihanNya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya Allah dan merupakan Allah bangsa-bangsa (UI. 6:4; 4:35,39;Yes. 43:10-11). Karena itu perjanjian Allah dengan Musa, "Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi untuk-Ku" (Im. 26:12, yang didahului oleh perjanjian-Nya dengan Abraham (Kej. 15:17-21; 17:1-14), Nuh dengan tanda pelangi (Kej. 9:16) dan Adam (Kej. 1-5) dan selanjutnya diteruskan melalui Daud (Mzm. 89) dan Al Masih, adalah perjanjian dengan umat manusia, bahkan seluruh dunia. Perjanjian Baru Yesus tidak hanya datang kepada orang-orang Israel saja, melainkan juga kepada orang-orang non Yahudi. (Mat. 8:10), penyembuhan anak perempuan Samaria (Yoh. 4:1-6). Penjelasan perumpamaan undangan penjamuan kawin yang akhirnya dihidangkan kepada siapa saja (Mat. 22:1-4).	Para tokoh agama Kristen tidak mempersoalkan ideology apapun yang dikembangkan oleh negara. Dalam ajaran Kristen kontestasi ideologis sekedar untuk membangun sebuah peradaban secara bersama-sama. Bukan membangun sebuah legitimasi yang berasaskan kepentingan agama tertentu. Dan, hal yang lebih penting, agama terbesar di dunia ini juga memiliki sejarah kuat, bagaimana relasi agama dan negara bisa di seimbangkan pada proses demokratisasi yang sesungguhnya. Bahkan lebih kuat dari itu, ada beberapa negara dimana Kristen menjadi agama mayoritas, sudah menghilangkan pengaruhnya sebagai system kenegaraan (sekularisme). Seperti pelbagai negara yang ada di eropa. Secara sosiologis juga ada banyak keragaman di internal umat Kristen sendiri. Jadi, istilah persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia bisa dinyana sebagai sebuah penyatuan dari perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di lingkungan agama tersebut. Sama halnya dengan di Islam yang juga memiliki berbagai madzhab, pandangan teologis, dan aspek-aspek kehidupan keagamaan lainnya.
3	Katolik	Sikap hormat yang tulus gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidahkaidah serta ajaran-ajaran, yang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni "jalan, kebenaran dan hidup" (Yoh 14:6); dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya (Kor 5:18-19)	Pendapat tokoh Katolik, Frans Magnis Suseno, pluralitas agama adalah paham pembangkang dari eksklusivisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar merupakan kesombongan. Agama-agama hendaknya pertama-pertama memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar daripada yang lain-lain. Teologi yang mendasari anggapan itu adalah anggapan bahwa agama-agama merupakan ekspresi religiusitas umat manusia. Posisi ini bisa sekaligus berarti melepaskan adanya Allah personal. Jadi, yang sebenarnya diakui adalah dimensi transenden dan metafisik alam semesta manusia, namun bisa juga dengan mempertahankan paham Allah personal.

4	Hindu	Bagawad Gita IV:11: "Jalan mana pun yang ditempuh manusia ke arah-Ku, semuanya Aku terima." Tuhan telah membuat agama-agama yang berbeda-beda untuk memenuhi berbagai aspirasi, waktu, dan negara. Semua doktrin hanyalah merupakan banyak jalan; tetapi satu jalan tidak berarti Tuhan itusendiri. Sesungguhnya, seseorang dapat mencapai Tuhan jika ia mengikuti jalan mana saja dengan sepenuh hati. Sejak dulu, kitab-kitab Veda menyatakan pandangan Hindu klasik, bahwa agama-agama yang berbeda hanyalah merupakan bahasa yang berbeda-beda yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepada hati manusia. Kebenaran memang satu; orang-orang bijak menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda.	Giridhar Mamidi dengan judul *"Semua Agama Sederajat?* Semuanya *Mengajarkan Hal Yang Sama?"*. Di sini, ia berusaha membuktikan bahwa semua agama tidaklah sama. Hanyalah orangorang Hindu yang suka menyatakan, bahwa semua agama adalah mengajarkan hal-hal yang sama. Bahkan, Bharat Ratna Bhagavandas menulis satu buku berjudul *"The Essential Unity of Religions"* (Kesatuan Esensial dari Semua Agama), yang didukung pula dengan pandangan Mahatma Gandhi. Frank Gaetano Morales, seorang cendekiawan Hindu, juga mengecam keras orang-orang Hindu yang menyamakan agamanya dengan agama lain.
5	Budha	nti ajaran agama Budha yang termuat dalam *Khuddhaka Nikaya, Khuddhaka patha, Dhammapada* 183 adalah: *Sabbapapasaakaranang*, *Kusala-saupasa-pada*, *Saccitaparoyodapang.* Artinya, tidak melakukan kejahatan, perbanyak berbuat kebajikan, serta sucukan hati dan pikiran. Sesuai dengan ungkapnya dalam kitab Digha Nikayn III:127, bahwa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan dan kebahagiaan orang banyak, demi kasih sayang terhadap dunia, demi kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sang Buddha bersabda: "....orang yang memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingan sendiri adalah yang terbaik" (Anggutara Nikaya, 11:95; Digha Njkaya, III:223) "tidak mungkin orang yang terperosok ke dalam lumpur dapat menarik orang lain dari lumpur. Hanya orang yang telah bebas dari lumpur...." (Mujjhima Nikaya, 1:45).	Secara ideologis, keberadaan Budha memang tidak pernah menjadi bagian dari system kenegaraan yang cukup kuat, sehingga bisa dinilai bagaimana mereka membangun relasi agama dan negara. Terkecuali pada era sebelum modern atau Sebelum Masehi. Terlepas dari itu, tidak juga dapat disangkal bahwa, keberadaan agama Budha akhirnya memberikan warna tersendiri bagi masyarakat Indonesia secara luas. Termasuk di dalamnya, disaat mereka harus menyemai perihal kehidupan ideologis mereka di masyarakat yang sangat plural. Inti ajaran Budha ialah meperhatikan keluesan diri sendiri, terbuka, dan sangat menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain.

6	Konghucu	Kosmologi Confucian adalah: pertama, saling melengkapi; kedua, ada perbedaan; ketiga, ada siklus; keempat, ada keharmonisan. Ayat lain menyatakan bahwa "harmonis tidak melanda" maksudnya mereka memilih harmonis tetapi jati diri tetap eksis. Ada juga ayat yang menyatakan "Tidak berangan-angan kosong", bahwa dalam menghadapi masalah apapun harus bertindak dan membumi, tidak mengharuskan karena ada dimensi waktu, dimensi tempat dan dimensi apa saja yang pasti berubah. Keempat, ayat yang menyatakan bahwa "kalau tidak tahu bertindaklah sebagai orang yang tidak tahu, kalau tahu bertindaklah sebagai orang yang tahu, intinya adalah berpengetahuan". Selain itu ayat yang menyatakan "Jangan inginkan apa yang tidak layak dan jangan lakukan apa yang tidak patut".	Secara sosiologis, dalam agama Konghucu dinyatakan bahwa "imana kita berpijak disitu langit dijunjung", artinya hidup dimanapun bisa survive. Seorang *kuncu*, tidak akan khawatir hidup dimanapun. Seorang kuncu akan menjadikan kebaikan bagi orang lain. Bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain di sekelilingnya. Secara aktif, "bila diri ingin tegak, bantulah orang lain tegak, bila diri ingin maju bantulah orang lain maju". Secara pasif: "apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan lakukan pada orang lain". Hal itu karena tidak ada seorangpun yang menginginkan menjadi buruk, semuanya menginginkan menjadi orang yang baik.

Berdasarkan data-data di atas, sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah teologi yang terambil dari agama-agama di Indonesia. Pengingkaran terhadap kebhinnekaan sama dengan mengingkari kehidupan, hal itu dan hanya akan membawa bencana bagi kehidupan mereka. Jika kita mau jujur, terjebaknya Indonesia dalam krisis multi-dimensional beberapa tahun terakhir dan masih terus berlangsung sampai sekarang, salah satu faktor utamanya, karena Indonesia pernah menerapkan kebijakan yang mengingkari pluralitas yang dimiliki bangsa. Semasa kebijakan tersebut, kemajemukan direduksi dengan pola penyeragaman dalam berbagai dimensi kehidupan.

Asas tunggal diberlakukan sehingga tidak ada ruang bagi nilai-nilai budaya lain untuk bisa hidup. SARA sebagai refleksi konkret kemajemukan masyarakat dicurigai, dimusuhi, dan dikerangkeng dalam penjara yang disebut Stabilitas Nasional. Memperbincangkan

SARA identik dengan pembuat onar atau bahkan sebagai makar yang dapat mengganggu stabilitas yang akan mendapat ganjaran perlakuan keras yang sangat tidak manusiawi.

Kondisi itu membuat masyarakat kehilangan identitas diri, dan kehilangan arti kehidupan yang sebenarnya. Kemajuan, dan kesejahteraan hidup hanya dimiliki segelintir elit yang berkuasa dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sedang masyarakat luas hidup dalam keterbelakangan dan pemiskinan, serta didera kekecewaan, penderitaan, dan keresahan yang tanpa ujung. Masyarakat terseret dalam kehidupan yang serba anomali dan berada dalam suasana yang depresif.

Pada gilirannya hal itu telah mengantarkan masyarakat ke dalam kehidupan yang sangat rentan konflik dan mudah tersulut untuk berbuat kekerasan. Kekerasan massal merebak di berbagai daerah seakan-akan berlomba, tidak mau kalah dengan kekerasan yang dilakukan negara. Hasil dari semua itu adalah terjadinya mega-persoalan bangsa yang terus dibayang-bayangi konflik etnis, konflik antar kampung dan sebagainya yang tak kunjung selesai hatta era reformasi (yang belum tentu bersifat reformatif) telah tiba.

Pengembalian Indonesia kepada kehidupan yang damai (yang akan berdampak kepada terciptanya kesejahteraan dan ketenangan hidup) meniscayakan seluruh elemen bangsa untuk merekonstruksi paradigma hidup yang selama ini mereka anut. Paham inetgralistik yang memandang kehidupan sebagai sesuatu yang serba tunggal harus diubah menjadi paham pluralisme dan multikuturalisme. [38]

G. NKRI Harga Mati

NKRI harga mati merupakan slogan yang sering digaungkan untuk menyatakan diri bahwa kita menyetujui dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keempat pilarnya. Biasanya akan

[38]Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya,* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997, hlm. 40.

sering kita temukan istilah tersebut terucapkan dengan lantang dalam setiap yel-yel kegiatan kepramukaan, paskibra, atau kagiatan sebuah organisasi, di mana asas pembentukannya adalah sebuah wadah yang memupuk kecintaan kader atau anggotanya kepada tanah air. Seperti Badan-badan Otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas moderat lainnya.

Kenapa harga mati? Karena NKRI dipahami sebagai bentuk yang sudah final, tetap, tidak bisa diganggu-gugat, dan harus kita jaga kemerdekaan dan kedaulatannya. Eksistensi NKRI memang selalu diuji, antara lain dengan hadirnya NKRI Syariah yang telah dideklarasikan di Monas, 1 September 2012, bertepatan dengan milad ke-14 FPI.

Setelah tidak begitu kedengaran, 7 tahun kemudian, tepatnya 5 Agustus 2019, gagasan ini muncul ke permukaan dengan kekuatan yang lebih besar, yakni Ijtima Ulama IV. Forum ini merekomendasikan terwujudnya NKRI Syariah yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi.

Rupanya, gagasan formalisasi syariah terus berevolusi dan memiliki daya pikat tersendiri. Survei LSI menemukan bahwa publik yang pro terhadap NKRI Syariah mengalami peningkatan dari 4,6 persen pada 2005 menjadi 13,2 persen pada 2018. Sementara itu, pendukung NKRI mengalami penurunan. Pada 2005, publik yang pro NKRI Pancasila angkanya mencapai 85,2 persen dan terus menurun hingga 75,3 persen pada 2018. Dengan data BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah 265 juta jiwa, maka pendukung NKRI Syari'ah adalah plus minus 35 juta orang.[39]

Dalam kaitan semangat bersyariah, secara makro, tatanan dunia selama dua dekade, cenderung menempatkan Islam di posisi

[39]Secara garis besar gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam menempuh jalur ganda. Pertama melalui jalur dari atas (top down), kedua jalur dari bawah (bottom up).Haedar Nashir, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2013), 496.

“tidak adil”. Tatanan dunia baru atau *the new world order* yang dicirikan dengan demokrasi, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, supremasi hukum dan kerja sama internasional sering ditelikung untuk kepentingan Barat (Amerika) atau Rusia, sehingga memunculkan problem baru. Isu persamaan hak, kesederajatan, dan keadilan yang selalu didengungkan hanyalah sekadar retorika yang sulit dilabuhkan dalam kehidupan nyata. Kapitalisme (dan juga komunisme) justru menciptakan kehidupan yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan.[40]

Dengan begitu, khazanah Islam tinggal menjadi ‘kenangan” sejarah yang dihafalkan. Sistem “khilafah” tumbang oleh sistem kepartaian, konsep “imamah” terlempar oleh sistem perwakilan dan pilihan, sistem ukhuwah hancur oleh kompetisi, hukum Syariah tersingkir oleh *civil law*, dan transaksi syari’ah ditinggalkan oleh transaksi modern. Di ujung keputusasaan itulah, Marshall G. Hodgson berkesimpulan bahwa Islam sebagai suatu tradisi institusional yang khas mungkin tidak akan berlangsung lama. [41]

Nah, dari situlah beberapa kalangan muslim kemudian terpanggil untuk melindungi identitas mereka, serta perlu mendefinisikannya kembali. Agama kemudian didaulat untuk merestorasi segala sesuatu yang telah dihancurkan peradaban luar. Islam diyakini memiliki perangkat yang cukup untuk menata kehidupan yang lebih damai dan mensejahterakan. Ikhtiar ini dapat kita lihat pada semangat Piagam Jakarta (22 juni 1945), Negara Islam Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan yang terbaru gagasan khilafah-nya HTI. [42]

---

[40]Muhamed Nawab Muhamed Osman, “Reviving the Caliphate in the Nusantara:Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia, Terrorism and Political Violance”,Routledge, 22: 601-622, 2010, 604.

[41]Marshall G. Hodgson ,*The Venture of Islam; Conscience and History in a World Civilization,* (Chicago, The University Of Chicago Press , 1974), 183

[42]Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), 223.

Alih-alih mendapatkan pengakuan, justru kehadiran mereka dianggap berlawanan dengan konstitusi, bahkan sebagai *bughat*. Namun, Sudah menjadi takdir sejarah, perjuangan tidak kenal berhenti, patah tumbuh hilang berganti. Sebuah ideologi tak akan musnah hingga ke serat-serat terkecilnya. Lalu muncullah kelompok-kelompok yang ingin kembali mengusung kembali Piagam Jakarta. Namun, karena khawatir ada trauma politik masa lalu, beberapa kelompok yang mengusung pengembalian Piagam Jakarta, bergerak dengan formula baru yang "kelihatan" konstitusional, tak lagi menggunakan istilah Piagam Jakarta, melainkan NKRI Syariah. Tetap NKRI, tapi bersyariah. Tetap pakai ayat konstitusi, tapi di bawah ayat suci.[43]

Sampai di sini, sebenarnya konsep NKRI bersyariah yang mereka tawarkan belum terang benderang. Bagaimana sistem ideologi, politik, kedaulatan, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial dan budayanya masih samar-samar. Yang tampak justru "yang bukan bukan". Bukan ini dan bukan itu. Secara operasional, belum jelas ukuran syariahnya. Model syariah Arab Saudi, Republik Islam Iran, Turki, Pakistan, Taliban, atau ISIS? Sederet pertanyaan itu tentu tak mudah dijawab. Sebab, mereka memang sedang mencari pola pelaksanaan syariah yang pas untuk Indonesia.

Dalam NKRI Pancasila, sesungguhnya pokok pikiran keislaman sudah banyak diakomodasi, bahkan dalam bentuk produk perundang-

---

[43]Istilah NKRI Bersyari'ah diperkenalkan oleh M. Rizieq Syihab dalam karyanya yang berjudul "Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Beryariah" diterbitkan oleh Islam Press dan diorasikan juga saat Milad FPI ke-21 oleh Habieb Rizieq yang berbicara melalui video dari Mekkah dan disiarkan langsung pada akun Youtube Front TV, berjudul "Milad FPI 21" tanggal 24 Agustus 2019, http://youtu.be/Ju4wvLBINdE. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00. Menurut Denny JA bahwa "Ketika memulai aksi 212 tahun 2016, isu NKRI Bersyariah sudah digaungkan. Setahun kemudian, dala Reuni 212 tahun 2017, perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah kembali diperkuatnya". Satrio Arismunandar (Ed), NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA,(Cerah Budaya Indonesia, 2019), hlm 1. Namun hal yang paling penting untuk diketahui bahwa upaya mewujudkan NKRI Bersyariah sebenarnya sudah lama didengungkan oleh M. Rizieq Syihab melalui karya tulisnya dan orasi pada Milad FPI yang ke-14, lihat Selengkapnya lihat pada akun youtube "FPI Front Pembela Islam" pada http://youtu.be/bdqDs0xqfPQ. Diakses pada 15-09-2019 pulul 08:00.

undangan, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan Syariah, UU ITE, Larangan atheisme pasal 156a KUHP, Tap MPRS No. XXV/MPRS Tahun 1966 tentang Komunisme dan lain-lain. Pendeknya, dari lima rukun Islam yang ada hanya Salat dan Puasa Ramadan saja yang belum dijadikan UU.

Jika NKRI Syariah diarahkan untuk pelaksanaan hukum pidana Islam (hudud), atau cara beragama mazhab tertentu sebagai aliran resmi negara, maka di sinilah awal dari masalah. Akan muncul "teror" atas nama agama yang lahir dari penafsiran parsial terhadap teks keagamaan. Penafsiran ini pada gilirannya akan melahirkan sikap fanatis, eksklusif, intoleran, radikal, militan, dan selalu berkeinginan membersihkan isme-isme modern seperti humanisme, modernisme dan liberalisme karena mereka menganggap dirinya sebagai satu-satunya penafsir yang benar.

Padahal, sejak awal bangsa ini penuh dengan pluralitas. Perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi untuk dipertentangkan, tapi untuk saling dipertemukan, untuk di-tunggal ika-kan. Masing-masing memiliki potensi, kreasi, kearifan dan karakter yang bisa disandingkan, dikembangkan dan disumbangkan demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.[44]

Eksistensi Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Agama, tapi juga tidak bertujuan menggantikan agama atau anti agama. Keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah titik temu keberagamaan dan kebudayaan rakyat Indonesia dalam merespon pluralitas bangsa. Pancasila dapat mengakomodasi seluruh varitas pencarian dan konvergensi khazanah bangsa yang mengakui perbedaan namun tetap menghargai pandangan (*wold-view*) masing-masing.[45]

---

[44] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante,* (Jakarta: LP3ES, 1985), 79.

[45]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia,* Cet-1, (Jakarta: Paramadina, 1998),84-85.

Kejadian berulang yang berbau SARA di atas–sampai batas tertentu–dipicu oleh ketidakmampuan para pelaku untuk mendialogkan dirinya dengan kompleksitas realitas sosial, realitas kebangsaan, realitas global dan realitas transendental. Mereka terjebak ke dalam sikap eksklusivisme dan narsisme identitas diri sendiri. Muslim mayoritas (NU dan Muhammadiyah) juga tidak pernah mengusulkan penerapan pidana Islam. Bagi mereka, cukuplah nilai universal Islam seperti keadilan (*al-'adl*), toleransi (*al-tasamuh*), kesetaraan (*al-musawah*), kemanusiaan (*al-insaniyah*), dan lain-lain, menjiwai perundangan.

Secara prinsip, NKRI Pancasila mengakomodasi semua khazanah bangsa untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan, yakni terciptanya keadilan dan kemakmuran yang manusiawi dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara harus dipastikan dapat mengaktualisasikan dirinya dan dapat meraih cita-citanya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pencapaian kondisi yang demikian meniscayakan adanya penegakan keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan partisipasi yang dikemas dalam bingkai nilai-nilai keadaban dan etika sosial yang luhur.

Melihat adanya perbedaan spektrum dan presisi antara NKRI Pancasila dan NKRI Syari'ah, rasanya bukan sikap yang bijak jika hanya mempertentangkannya tanpa adanya upaya merangkul untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sebagaimana dulu ada perdebatan di sidang BPUPKI yang diketuai Soekarno dan ditandatangani sembilan anggota utama, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, KH Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin telah berhasil mendamaikan anak kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka saatnya kita berkumpul kembali untuk membincangkan "NKRI".

Sebagai sesama anak bangsa, kita tidak boleh gagal paham melihat dinamika di atas. Kita tidak boleh hanya bereaksi terhadap

“akibat”, namun juga mencermati “sebab”. Fundamentalisme agama sering dituduh sebagai biang terjadinya beberapa kekerasan di berbagai kawasan dunia. Tudingan itu -sampai batas tertentu- memang mengandung kebenaran. Namun kita sering lupa bahwa modernitas sebenarnya ikut andil pula dalam banyak kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama ini. [46]

Dengan kata lain, modernitas dan fundamentalisme agama sama-sama berperan dalam menyuburkan tindak kekerasan, menghadirkan wajah-wajah berang dan perilaku mengerikan dalam kehidupan. Banyak bukti yang menjelaskan tentang keterlibatan modernisasi dalam tindakan yang bersifat *kursif* dan *represif*. Demikian pula cukup banyak fakta yang menunjukkan betapa fundamentalisme agama menampakkan diri dalam wajah yang angker, serta sikap dan perilaku yang penuh keberingasan.

Kita memang sepakat, modernisasi telah memberikan kenyamanan dalam sisi-sisi tertentu bagi kehidupan umat manusia. Kemajuan sains dan teknologi dengan akar-akar rasionalismenya telah membuat manusia dapat merengkuh sesuatu yang dulunya dianggap mustahil. Cita-cita manusia untuk menaklukkan alam dan menguak misterinya, sebagian besar mulai terwujud dalam kenyataan. Semua itu dapat dicapai sebagai berkah modernisasi. Namun pada saat yang sama, ia juga membawa malapetaka yang dulu tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam kehidupan. Melalui modernisasi, yang didukung penuh sains, teknologi, dan ekonomi kapitalistis, bangsa-bangsa Barat menunjukkan kekerasan mereka yang biadab dengan tindak kekerasan kolektif dan sistematis.[47]

[46]Pierre Bourdieu, “Sosial Space and Symbolic Power”, Sosiological Theory, Vol 7. Issue 1, (Spring, 1989) 14-25. Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, Trans. Richard Nice, (Stanford, California: Standford University Press, 1990), 95. Richard Jenkins, Membaca Pikiran Bourdieu, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

[47]Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis,(Yogyakarta: PT Kanisius, 2016),41.

Oleh karena itu, kita mesti mencari solusi yang benar-benar sistematis dan menyeluruh; suatu penyelesaian yang dapat menghindarkan umat manusia dari perilaku dehumanistik, serta menyelamatkan mereka dan kehidupan dari kehancuran. Untuk melenyapkan –minimal mengurangi– kekerasan, kita jangan terjebak kepada tindakan yang berbau kekerasan. Penindasan, pemaksaan dan persekusi jelas bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan kekerasan. Sebab hal itu hanya akan mendatangkan serangan balik dan dapat menjadikan kelompok fundamentalis atau calon fundamentalis akan lebih ekstrem lagi. Pada saat yang sama, kita harus pula menyadari, kultur modern kadang-kadang memaksakan tuntutan yang sulit. Kultur ini sering menjatuhkan harga diri manusia, serta menunjukkan kelemahan moral, kerentanan dan minimnya kehormatan manusia.

Pada tataran itu kita harus melangkah. Kita harus menjadi modern karena kemodernan sebagai upaya memakmurkan dunia adalah tugas umat manusia. Namun kita tidak boleh kehilangan spritualitas sesuai dengan identitas diri kita masing-masing. Manusia Indonesia tidak melihat sebuah fenomena hanya sebagai penampakan sosial-material, tapi ditelisik lebih jauh aspek kultural-transendentalnya.

Keberadaan Kerajaan Mataram Kuno yang melahirkan Borobudur dan Prambanan, Kerajaan Demak yang melahirkan Menara Kudus dan Keraton Solo-Jogja, Peradaban 'Coastal' yang melahirkan budaya pesisiran yang lugas dan peradaban 'Continental' yang menelurkan budaya mataraman yang eklektis adalah contoh karya anak bangsa yang memadukan secara harmoni berbagai unsur sehingga terbangun interdependensi yang kokoh.

Anak bangsa yang tidak menganggap dirinya paling benar, selalu terbuka untuk melakukan dialog dengan sesama, dengan lingkungan alam, dan bahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. []

BAB VI
PENUTUP

Pada dasarnya, Negara hadir untuk mengantarkan semua warganya menuju gerbang kemakmuran secara adil dan beradab. Untuk mewujudkan hal itu, segenap potensi harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai negara multi etnis multi religi dengan penduduk 269,6 juta jiwa, 1.128 suku, 731 bahasa, 17.000 lebih pulau dan 80,999 km garis pantai, tentu banyak hal bisa dikerjakan. Namun pada saat yang sama perbedaan tersebut juga merupakan tantangan.

Kebhinnekaan dan kehidupansejatinya adalah dua sisi mata uang yang sama. Kehidupan terjadi karena adanya keanekaan ciptaan Tuhan. Hidup adalah siang dan malam, bumi dan langit, laut dan darat, barat dan timur, serta tumbuhan dan binatang. Dinamika perkembangan terjadi karena adanya keanekaan alam diolah secara kreatif-arif oleh manusia yang beragam. Manusia tidak berhak menjadikan kehidupan serba tunggal, sebab kehidupan berjalan di atas roda keragaman.

Secara hakiki, kebhinnekaan bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi untuk dipertentangkan, tapi untuk saling dipertemukan, untuk tunggal ika. Masing-masing memiliki potensi, kreasi, kearifan dan karakter yang bisa disandingkan, dikembangkan dan disumbangkan demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya, khazanah kebhinnekaan mulai menunjukkan aura memudar. Perubahan sosial mendorong sebagian anak bangsa untuk tidak bangga dengan keragaman, dan lebih tertarik keseragaman. Mereka memilih sekatarian katimbang toleran. Khazanah *tepo selira* dan hidup

berdampingan dengan mereka yang berbeda digantingan dengan exclusivism dan fundamentalism.

Data statistic SMRCmenyebutkan 14,5 % masyarakat yang setuju NKRI bubar, dan 4 % diantaranya menjadi pendukung ISIS, sedangkan yang setuju NKRI diubah menjadi khilafah sebanyak 9,2 %. Mengamini data tersebut, *IDN Research Institute* yang dilakukan pada 20 Agustus 2018 juga menyatakan bahwa 19,5 % dari 63 juta penduduk millenial Indonesia setuju dengan sistem khilafah. Yang cukup mengejutkan adalah bahwa kalangan pelajarpun sudah terpapar cara pandang ini. Survei Alvara Research Center pada 2017 menjelaskan ada temuan 18,6% pelajar kita lebih sepakat dengan Islam sebagai dasar negara, daripada Pancasila (81,3%). Sikap yang sama juga dimiliki oleh 16,8% mahasiswa dan 15,5% kaum profesional. Yang terbaru, Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Komisi III DPR pada 25 Januari 2022 menyatakan bahwa 198 Pesantren terafiliasi teroris.Sungguh fantastis!.

Ada apa dengan bangsa ini? Mengapa daya tarik NKRI memudar? Mengapa semangat formalisasi agama semakin memikat? Tidak mudah menjawab sederet pertanyaan ini karena masalahnya membentang dari yang prinsip sampai yang teknis, mulai ideologi sampai teknologi, mulai fenomena local sampaitatanan global. Secara internal, setidak-tidaknya ada tiga kepentingan besar yang berkembang di Indonesia yaitu; *pertama*, kepentingan nasionalis yang kini berkuasa dan memiliki tujuan untuk mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasilanya;*Kedua*, kepentingan liberal yang senantiasa memperjuangkan kebebasan dan persamaan hak, menolak pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama, di dalamnya terdapat paham kapitalis dan paham sekuler yang memiliki tujuan akhir kebebasan, menguasai segala lini birokrasi guna dapatnya menguasai pengelolaan sumber daya alam tanpa mau ambil pusing terhadap ideologi ataupun hukum negara, terhadap bentuk negara maupun system pemerintahannya; dan *ketiga*, kepentingan faham radikal, baik radikal kanan maupun radikal kiri yang bertujuan

untuk mengganti hukum negara atau ideologinya, mengganti sistem pemerintahannya dan mengganti bentuk negaranya.

Sedangkan secara global, Sedangkan secara ekternal kita berhadapan dengan ideologi dunia yang sering menggunakan standart ganda. Persamaan hak, kesederajatan, dan keadilan yang selalu didengungkan negara maju ternyata hanya retorika yang sulit dilabuhkan dalam kehidupan nyata. Kapitalisme (dan juga komunisme) sebagai anak modernitas justru menciptakan kehidupan yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alih-alih memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai yang semacam itu, para penganut modernisme justru menjadikan hal tersebut sekadar komoditi untuk kepentingan segelintir elit mereka. Rasionalisme telah menjadi tolok ukur segala-galanya sehingga menghilangkan keluhuran dan moralitas umat manusia.

Sayangnya, banyak diantara kita yang gagal melihat proses ini secara arif dan lebih memilih bereaksi terhadap "akibat" daripada "sebab". Sebagian kita lebih memilih beraksi terhadap kemiskinan, tapi tidak bertindak pada sebab kemiskinan. Kita senang sekali menghabisi tindakan maksiat, tapi enggan bertanya kenapa mereka maksiat. Fenomena inilah yang menyebabkan lahirnya fundamentalisme berbasis agama.Akibatnya, fundamentalisme agama sering dituduh sebagai biang terjadinya beberapa kekerasan di berbagai kawasan dunia. Tudingan itu—sampai batas tertentu—memang mengandung kebenaran. Namun kita sering lupa bahwa modernitas sebenarnya ikut andil pula dalam banyak kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama ini. Dengan kata lain, modernitas dan fundamentalisme agama sama-sama berperan dalam menyuburkan tindak kekerasan serta dalam menghadirkan wajah-wajah berang dan perilaku mengerikan dalam kehidupan.

Sebagai ikhtiar berbenah, Pesantren sebagai penerus ajaran Walisongo diyakini memiliki model keberagamaan yang humanis dan moderat. Dari sanalah hidup berdampingan secara damai bisa

disemai dan dipupuk. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah keseimbangan: akal dan wahyu, taqlid dan ijtihad,jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan komunal, keharusan dan kesukarelaan, ide dan fakta, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan berdasarkan nilai *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidāl* (tegak lurus), *Tasāmuh* (toleransi), *musāwah* (egaliter) dan S*yurā* (musyawarah).Wujud kongkrit dari nilai-nilai tersebut, Kementerian Agama RI, menggunakan empat indikator, yakni1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Jika mengaca pada sejarah, Sebenarnya, masyarakat Nusantara tidak pernah ada persoalan dengan agama dan Tuhan. Sumber otoritatif Narwaci yang ditulis pada permulaaan abad ke-17 menyebutkan bahwa Tuhan adalah keseluruhan alam yang dilambangkan dengan makhluk yang sangat kecil sehingga sewaktu-waktu dapat masuk ke sanubari orang. Pada saat yang sama, Tuhan sekaligus maha besar dan luas seperti samudera, tidak berujung juga tidak berpangkal seperti angkasa, dan terdiri dari semua warna yang ada di dunia. Dengan perspektif ini, manusia Nusantara akan toleran dengan semua agama. Ini pula yang dilakukan Walisongo dengan wayang, tembang, gending dan dakwah budaya lainnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa konsistensi pesantren terhadap *manhaj al-fikr* Walisongo telah menjadikannya mampu bertahan dari segala deraan dan tantangan zaman. Pesantren dapat bertahan dengan tegar ketika sistem pendidikan yang lain hanya sibuk mengurusi politik dan birokrasi. Demikian pula, pesantren juga tetap hidup dengan moderasi dan toleransinya ketika muncul lembaga Islam lain yang justru mengarahkan peserta didiknya untuk tidak toleran terhadap ummat lain.

SEbagai penerus ajaran pesantren, Madrasah sebagai menawarkan model pendidikan yang berkomitmen untuk melahirkan

manusia yang utuh; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya; kognitif, afektif dan psikomotoriknya, sebagaimana ditemukan dalam teori *al-Ikhwan al-Safa*, dan *al-Qabisi.* Atau seperti yang diidealkan Imam Asy'ari bahwa pendidikan mesti mengintegrasikan *tasdiq bi al-qalb, taqrir bi al-lisan wa 'amal bi al-arkan,* atau seperti rumusan UNESCO *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.*

Dalam hubungannya dengan pesantren, dilihat dari basis paedagogisnilai, pengajaran dan kultur, Madrasah terbagi menjadi tiga model, yakni:

1. Madrasah Pesantren (MP)

   Madrasah Pesantren (MP) adalah model pengelolaan MA yang secara operasional pengelolaannya berada dalam satu sistem manajemen. Artinya, suatu MA tidak hanya secara fisik berada dalam lingkungan pesantren tetapi antara MA dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi dan manajemen yang menyatu (*integreted*).

2. Model Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP)

   Madrasah yang berada di lingkungan Pesantren (MLP) secara substantif memiliki kesamaan dengan model yang pertama, perbedaannya hanyalah terletak pada keberadaan pesantren secara fisik. Bila pada model pertama MA dan pesantren berada dalam satu sistem pengelolaan dan dalam satu kompleks pendidikan, sementara model ini antara MA dan pesantren tidak berada dalam satu sistem manajerial.

3. Model Madrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP)

   Pola Adopsi Sistem Nilai Pesantren (MSNP) Konsep model ketiga ini didasarkan atas asumsi bahwa sistem pendidikan pesantren dengan meteri dan kulturnya dipandang cocok atau

sesuai dengan karakter MA, terutama dalam mewujudkan ciri khas Islam. Sebagaimana diketahui, pada pesantren ada unsurunsur yang secara kultural sejalan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan ciri khas Islam.

Ketiga modeling madrasah secara simbiosis membumikan moderasi beragama yang terintegrasi dalam Kurikulum (intra kurikuler, ektra kurikuler, co kurikuler) dan *hidden curriculum* mereka sehingga lahirlah pribadi yang taat berama, cerdas dan cinta tanah air. Model moderasi Madrasah Pesantren bisa disebut sebagai *Education Portrait of Islam* karena dilakukan dengan empat pendekatan, yakni:

1. *Institutional Identity*

   Cerminan nilai Islam Nusantara yang sangat kentara serta langsung dapat dilihat kasat mata adalah seragam madrasah yang dikenakan guru maupun siswanya dengan pakaian khas nusantara. Pakaian seragam batik merupakan salah satu pakaian khas nusantara yang dipakai setiap hari sabtu dan minggu, selain itu seragam khas kudusan juga diprogramkan setiap hari kamis, yakni dengan memakai iket kepala, sarung batik dan baju putih.

2. *Teaching Materials/References to Javanese*

   Warisan Islam Nusantara lainnya yang tak ternilai harganya adalah munculnya banyak ulama Nusantara beserta maha karyanya yang hingga kini terus menjadi mata air kesadaran untuk beragama secara moderat. Kitab-kitab ulama nusantara banyak ditulis dengan bahasa Jawa agar mudah difahami oleh para santri. Selain itu Bahasa jawa merupakan Bahasa lokal nusantara sehingga juga membawa misi Islam Nusantara.

3. *Activity Assence*

   Beberapa kegiatan yang dapat menstimulus jiwa santri dalam mendalami nilai Islam Nusantara diantaranya penanaman karakter cinta tanah air atau nilai kebangsaan. Islam Nusantara mengajarkan

untuk mencintai tumpah darah tanah kelahiran.Aktualisasi nilai Islam Nusantara di madrasah dilakukan melalui Pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam kegiatan kulikuler, misalnya melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn), Sejarah, Tata Negara, dan lain-lain.

4. Kontra radikalisme melalui penguatan Pancasila

   Strategi kontra radikal dilakukan dengan PAI berbasis penguatan pendidikan Pancasila. Materi ini secara langsung meruntuhkan kritik terdalam kaum radikal atas Pancasila, dan pada saat yang sama ditunjukkan sifat Islami dari Pancasila dan NKRI.

Apa yang dilakukan Madrasah Pesantren dengan 3 modelingnya diatas, telah menorehkan keberhasilan melabuhkan moderasi beragama di Bumi Nusantara. Setidaknya ada tujuh bukti yang dapat diajukan sebagai dalil keberhasilan tersebut. Yakni:

1. Kiai Moderat

   Seorang kiai adalah produk pesantren dan Madrasah. Karena Pendidikan yang diperoleh, sekarang ia menjadi penggerak dalam pembentukan karakter warga pondok pesantren atau yang sering disebut dengan santri. Dalam kegiatan pembelajaran, maka posisi kiai sebagai transformator ilmu, transformator tindakan dan transformator keberagamaan secara utuh. Oleh karena itu di pondok pesantren kiai berperan dan berfungsi sebagai pembimbing, teladan, gerbang ilmu dan pengayom.

2. Literasi Moderat

   Litertasi moderat yang paling nampak adalah wacana Islam Nusantara. Wacana pembela Nusantara ini merupakan konstruk pemikiran yang berpijak pada dinamika budaya lokal Indonesiayang berinteraksi secara terbuka dengan berbagai jenis kelompok masyarakat, mulai yang tradisionalis sampai sosialis-Marxis, dan post-strukturalis-post-modernis.

3. Habitus Moderat

Habitus adalah struktur mental yang menuntun orang untuk berhubungan dengan dunia sosial. Habitus merupakan produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Beberapa habitus moderat yang merupakan bukti keberhasilan Madrasah Pesantren adalah membuminya sholawat nasionalis seperti ya lal wathan dan aswaniyyah, antifanatisme santri, tradisi menulis kitab moderat dan tradisi objektif akademik bahsul masail.

4. Tradisi Moderat

Tiga model madrasah pesantren semuanya memiliki tradisi moderat. Data paling nampak adalah tidak ditemukannya teroris yang berafiliasi pada pesantren model walisongo. 198 pesantren yang terindikasi terpapar radikalisme adalah pesantren"baru" yang bukan model walisongo. Yang perlu dicatat adalah bahwa tradisi, moderasi dan radikalisasi hidup berdampingan dalam sistem adaptif komplek manusia. Antara tradisi yang *tasamuh* danradikalisme yang angkuh sama-sama hidup dalam sistem peradaban modern yang juga bergerak dengan logikanya sendiri. Sekuat apapun kita hendak mengeleminasi sebuah unit sistem, hal itu pasti tidak akan tuntas karena ia akan menjelma kembali dengan wajah baru. Ia akan beradaptasi, belajar dan mereform dirinya bersama lingkungan baru, dan untuk kemudian melahirkan cara baru dan karakter baru. Begitulah seterusnya. Itulah cara kerja system adaptive complex.

5. Penerimaan Azas Tunggal Pancasila

Sebagai representasi ummat Islam, NU adalah ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai azas tunggal. NU menunjukkan sikap yang akomodatif, terutama setelah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama pada 1983 di Situbondo, Sedangkan Muhammadiyyah baru menerima Pancasila pada Muktamar Surakarta tahun 1985. Bagi kaum pesantren,

Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, bukanagama. Oleh karena itu tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.Sila Ketuhanan yang Maha Esa sudah mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Pancasila merupakan falsafah untuk membangun *ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathoniyyah dan ukhuwwah basyariyyah*.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bagi kaum madrasah, Bhinneka Tunggal Ika bukan tidak dipahami sebagai sebuah jargon yang dihapalkan dan diulang, melainkan sebagai sebuah "organisme" yang hidup, berkembang, dan mempengaruhi orang yang dihinggapi. Keragaman bukan pepatah suci yang dihafalkan, tapi benar-benar perintah agama untuk dipraktekkan secara kongkrit dalam kedidupan diatas pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah "teologi" yang terambil dari agama-agama di Indonesia. Pengingkaran terhadap kebhinnekaan sama dengan mengingkari kehidupan, hal itu dan hanya akan membawa bencana bagi kehidupan mereka. Jika mau jujur, terjebaknya Indonesia dalam krisis multi-dimensional beberapa tahun terakhir dan masih terus berlangsung sampai sekarang, salah satu faktor utamanya adalah karena Indonesia pernah menerapkan kebijakan yang mengingkari pluralitas yang dimiliki bangsa. Semasa kebijakan tersebut, kemajemukan direduksi dengan pola penyeragaman dalam berbagai dimensi kehidupan.

7. NKRI Harga mati

NKRI harga mati adalah slogan yang sering digaungkan untuk menyatakan diri bahwa kita menyetujui dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keempat pilarnya. Slogan ini lahir dari Rahim organisasi dibawah badan otonom NU. Kenapa harga mati? Karena NKRI dipahami sebagai bentuk yang

sudah final, tetap, tidak bisa diganggu-gugat, dan harus kita jaga kemerdekaan dan kedaulatannya. Sebab NKRI adalah rumah Bersama untuk mengakomodasi semua khazanah bangsa demi terciptanya keadilan dan kemakmuran yang manusiawi dalam bingkai kesetaraan, solidaritas, dan partisipasi yang dinaungi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai catatan akhir, Moderasi beragama sesungguhnya kunci menuju toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi tidak boleh hanya hadir sebagai diskursus, ceramah, dan khotbah, namun harus sepenuhnya menjadi rujukan dasar dalam tindakan kehidupan konkret mereka. Agaknya kita sepakat bahwa salah satu sebab utama terjadinya proses radikalisasi dan dehumanisasi itu terletak pada kekurangmampuan agama di era kontemporer dalam mengemban misi profetiknya, yaitu mengembangkan fitrah sebagai manusia yang cenderung kepada nilai-nilai perennial agama. Agama-agama di era kontemporer –karena dimuati beban sejarah masa lalu, atau rasionalisme yang berlebihan –telah memenggal misi profetik agama, dan menggantikannya dengan penguatan pada aspek-aspek yang bersifat evangelis, kuantitas, dan formalitas semata.

Oleh karena itu, kita mesti mencari solusi yang benar-benar sistematis dan menyeluruh; suatu penyelesaian yang dapat menghindarkan umat manusia dari perilaku dehumanistik, serta menyelamatkan mereka dan kehidupan dari kehancuran. Kita tidak boleh kehilangan spritualitas beragama sesuai dengan identitas diri kita masing-masing. Kita harus selalu merevolusi mental keberagamaan kita seraya mengeksplorasi apa dan mengapanya, sehingga muncul replika sejarah baru yang lebih damai, adil dan beradab. []

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Abduh, Muhammad. 1993. *Risâlah al-Tawhid*, Kairo: Dar al-Manar.

Abdullah, Amin. 1995. *Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abdullah, Amin. 2000. *Metodologi Studi Islam,* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Abu Rokhmad, 2012. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisongo*.

Adam Schwarz, 1999. *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability,* Washing: Allen & Unwin,

Al-Ash'ari, Abu al-Hasan. Tt. *al-Ibanah 'an Usul al-Diyanah*. Kairo: Idarah al-Thibaah al-Muniriyah.

al-Asymawi, Muhammad Sa'id. 1992. *al-Islâm al-Siyâsi*y, Kairo: Sina li al-Nasyr.

Alford T. Welch dan Pierre Cachia (eds.), 1979. *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Al-Hakim, Su'ad. Tt. *Al-Mu'jam as-Sufiy: al-Hikmat fi Hudud al-Kalimah.* Beirut: Dar an-Nadrah

Ali Muhammad Muhammad Al-Salabi, 2001.*Al Wasathiyyah Fi Al-Qur'an Al-Karim* Cairo: Maktabah at-Tabi'în.

Ally, Ahmad Musthofa dan Abdullah Ally.2008. *Sejarah Pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. tt *Tafsir Ayat Ahkam,* Makkah: Mathba'ah Muhammad 'Ali.

al-Syahrastany, t.t.*Kitab al-Milal wa al-Nihal*, Kairo: Isa al-Baby al-Halaby.

Amstrong, Karen. 1992. *Muhammad: A Western Attemp to Understand Islam,* (London: Gollanez Ltd.

AnikFaridah, 2015. "MembangunKarakterMelalui The Hidden Curriculum", *Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9 (2).

Armahedi Mahzar, 1980, *Islam Militan,* Bandung: Pustaka.

Armstrong, Amatullah. 1995 .*The Mystical Language of Islam.* Malaysia: AS Nordeen

Asrohah,Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.

Azra,Azumardi. 2003. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*,. Jakarta: Logos.

Azyumardi Azra, 2000. *Muslimin Indonesia: Viabilitas Garis Keras*, dalam *Gatra* edisi khusus.

Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition" dalam Leonard Rindei (ed). *The Study of Middle East* 1976. New York: John Wiley & Sons,.

Daradjat, Zakiyah. 2004*. Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Hara Wacana Yogya.

Dawam, Ahmad Ta'arifindan Ainurrafiq, 2005. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Jakarta: Listafariska Putra

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Direktorat Pembinaan SMK & Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017. *Materi Pelatihan: Strategi Literasi Dalam Pembelajaran Di SMK,* Jakarta: Kemendikbud,

Edy A. Efendi (ed.), 1999.*Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat*, Cetakan I, Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Effendi, 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Eka Darmaputera, 1997. *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya,* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Faris, Ahmad Ibnu. 1979. Mu'jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr

Fazlurrahman. 1992. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

H.A. Malik Fadjar, 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Sjadzali,* Jakarta: IPHI dan Paramadina.

Haikal, Husayn. 1990. *al-Hukûmah al-Islâmiyah*, Kairo: Dar al-Ma'arif,.

Hani Hikmatunnisa Dan Ashif AzZafi, 2020. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning", *JIPIS*, 29 (1).

Ibrahim, Sa'd al-Din. (ed.). 1998. *al-Shahwah al-Islâmiyah wa Humum al-Wathan al-'Arabiy*, Amman: Muntadza al-Fikr al-'Arabiy.

Ida Ayu Wimba dkk, 2015. "Sinkretisasi Masa Majapahit Sebagai Dasar untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa", dalam *Prosiding Seminar Nasional; Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Mellinial.*

IDN *Reserach Institute* yang dipublikasikan di Media Online, 19 Januari 2019.

Ihsan dkk, 2016. *Narasi Satu Abad: KHR. Asnawi, Madrasah Qudsiyyah & Hikayat Santri Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Sahila.

Ihsan dkk, 2021. Actualization of Islam Nusantara Values at Madrasah Qudsiyyah Kudus. *Edukasia*, 16 (1)

Ihsan dkk, 2021. The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesi'a Madrasah Since the Passage of the UUSPN, *Educational Studies*, 47 (4).

Ihsan, 2012. Guru Ngaji Wong Kudus, (Semarang: NEED'S Press.

Ihsan, 2018. *Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Berbasis Literasi Pesantren*, Libraria, 6 (1).

Ihsan dkk. 2019. *Kudus Kiblat Bhinneka Tunggal Ika. Kudus,* FKUB.

Ihsan, 2020. Islamic Nationalism based on Islamic Boarding Schools: Study of Madrasas and Islamic Boarding Schools in the North Coast Region of Central Java, *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, 12 (7).

Ihsan, 2020. Kiai As Al-Qudwah Al-Khasanah: The Role Of Kiai In Shaping Religious Culture In Islamic Education Institution, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 17 (2).

Ihsan, 2020. *Madasah Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: LkiS.

Ihsan, Irwan Abdullah, 2020. Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus in Religious Moderation on Indonesian Islamic Boarding Schools*, Proceeding of International Conference on Engineering* (ICONETOS),

Ihsan. 2012. *Psikologi belajar (Tela'ah Pemikiran Imam Al Ghazali).* Semarang: NEED'S Press.

Ihsan. 2020. *Madrasah Berbasis Pesantren*. Jogjakarta: LkiS.

Ihsan. Ahmad Fatah, 2021. Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java, *QIJIS*, 9 (1)

Irwan Abdullah, Muhammad Zain, Hasse J. (Ed.), 2008. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irwan Masduqi, 2011. Berislam secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama, Bandung: Mizan Pustaka.

Iwan Triyuwono, 2000. *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah,* Yogyakarta: LKiS.

Jesse F Dillard, 1991 "Accounting as a critical social science" dalam *Accounting, Auditing, and Accountability Journal,* vol 4.

Joachim Wach, 1925. *The Comparative Study of Religions*, New York: Columbia University Press.

John L Esposito, 1988. *Islam The Straight Path*, New York – Oxford: Oxford University Press.

Kadir, Muslim A. 2011. *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar.

Karcherd, Wolfgang dkk. (Peny.). 1998. *Dinamika Pesantren.* Jakarta: P3M.

Karl R. Popper, 1972. *Conjectures and Refutations*, London: Routledge and Kegan Paul.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Khan, Qamaruddin. 1982. *Political Consept in The Quran*, (Lahore: Islamic Book Foundation.

lapidus, Ira M. 1999.*Sejarah Sosial Ummat Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lihat Azyumardi Azra, 1999. *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lizamudin Ma'mur, 2010. Membangun Budaya Literasi: Meretas Komunitas Global, Jakarta: Diadit Media.

M. Arifin. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

M. Kholid Syeirazi, 2020. *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam* Yogyakarta: Alif.id.

Madjid, Nur Kholish. 1994. *Islam, Iman Dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi,* Jakarta: Paramadina.

Marzuki Wahid, 2001. "Post-Tradisionalisme Islam: Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi 10.

Masdar Hilmy 2013, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," *Journal of Indonesian Islam* 7 (1).

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 58-62.

Masyhuri, A. Aziz. 2004. *Masalah Keagamaan; Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan*. Jakarta: Qultum Media.

Misrawi, Zuhairi. 2016. *Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, Dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mohammad Fahri dan Ahmad Zaenuri, 2019. "Moderasi Beragama di Indonesia," *Intizar* 25 (2).

Mohammad Hashim Kamali, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'ānic Principle of Wasaṭhiyyah*. New York: Oxford University Press.

Muhammad Idlom Dzulqarnain, 2021. Potret Ideal Sikap Moderat Kiai di Era Millenial, *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, 1 (2).

Murata, Sachiko. 1992. *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*. USA: State University of New York,.

Musa, Muhammad Yusuf. 1963. *Nidham al-Hukm fiy al-Islam*. Kairo: dar al-Kitab al-'Arabiy

Muslim A. Kadir, 2003. *Ilmu Islam terapan*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Mustaqim Hasan, 2021, "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin*, 7 (2).

Najmudin dk.k, 2020 "Penanaman Nilai Moderasi Islam Dan Wawasan Kebangsaan Pada Santri Pondok Pesantren Salafi Jami'atul Ikhwan Kabupaten Serang Banten," *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA*. 6(1).

Nasir, Ridlwan *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasir, Ridlwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasrullah, Rahmani Astuti dan M.S. 1998. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Mizan.

Nur Said, 2010. *Jejak Perjuangan Sunan Kudus dalam Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Brillian Media Utama.

Nur Syam, 2005. *Islam pesisir,* Yogjakarta: LKiS.

Nurul H Ma'arif, 2017. *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, Bandung: Mizan Pustaka.

Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Raharjo, Dawam. 1993. "Ensklopedi al-Qur'an: Madinah", dalam: *Jurnal Ulumul Qur'an,*No. (5)

Rihad Wiranto dan Sawariyanto, 2001. *Mengubah Tajug Menjadi Al-Quds*, Yogyakarta: Gatra.

Rosenthal, Erwin I.J. 1961. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, Cambrige: Cambrige University Press

Sa'dddin, Muhammad Munir. 1995 *al-Dirasah fi al-Tarikh al-Tarbiyah 'inda al-Muslimin,* Beirut: al-Maqriniyah.

Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Sanaki, Hujai A. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Sauqi Futaki, 2018. *Konstruksi moderasi (Wasathiyyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam,* Surabaya: UNISDA.

Sawir, Muhammad. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* Vol. 1, no. 1. (6)

Selamet Muljana, 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya negara Islam Nusantara,* Yogjakarta: LkiS.

Shaltut,Mahmud. 1996. *Min Taujihat al-Islam.* Kairo: Da>r al-Qalam.

SJ, Lammens. 1979. *Islam: Belief And Institutions,* London: Methuen Co, Ltd.

Sri Triatri, n.d. Bunga Rampai Psikologi Dari Anak Sampai Usia Lanjut BAB II Perkembangan Pemahaman Bacaan, Jakarta: Gunung Mulia.

Steenbrink, Karel A. 1974. ,*Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Subkhan, 2020. *Mencepit*, Yogyakarta: LKiS

Surur, Abdul Baqi. *Dawlah al-Qur`an*, Kairo: Dar al-Nahdhah.Turabi, Hasan. 1983."The Islamic State" dalam dalam *Voices of Resurgent Islam*, disunting oleh John L. Esposito. New York: Oxford University Press.

Survei *Saeful Mujani Research and Consulting* yang dipublikasikan di Media Cetak Jawa Pos, 5 Juni 2017.

Syamsuddin, Din. 1998. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal *Ulumul Qur`an*

Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, 1978. *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysi.

Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, 1980. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education,* Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Ta'arifin Ainurrafiq Dawam dan Ahmad. 2005. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Listafariska Putra.

Tafsir, Ahmad.1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya.

Usa, Muslih. 1991*. Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Vinacke, 1992. *The Psycholgy of Thinking,* Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc. 285.

Wahid, Abdurrahman. 1998. Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara, dalam *Kompas*.

Watt, W. Montgomery. 1960. *Islamic Political Thought*, Endinburgh: Endinburgh University Press.

Yusuf Qardhawi 2011, *Al-Kalimat Fi Al-Wasathiyah Al-Islamiyah Wa Ma'alimaha*, Cairo:Dar al-Shuruq.

Wawancara dengan Fakhruddin, Kepala MA Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020

Wawancara dengan Ali Yahya, Waka Kurikulum MA Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020

Wawancara dengan Fathur Rohman, penyusun syi`ir *Syaikhona* pada Jumat, 12 Februari 2021

Wawancara dengan Fakhruddin, Kepala MA Qudsiyyah pada hari Selasa, 10 November 2020

Wawancara dengan KH. Fathur Rahman, Kepala *al-Mudirul Khas* Qudsiyyah pada Selasa, 10 November 2020

EPILOG

BELAJAR MODERASI BERAGAMA DARI PARA WALI

KH. Drs. Em. Najib Hasan[1]

Menghubungkan kata moderasi dengan beragama membutuhkan *tashawwur* (penjelasan) tersendiri. Sebab, *idlafah* mengisyaratkan ada hubungan di antara keduanya. Seperti apa hubungan itu? apakah bersifat kausalitas atau korelasional, diantara keduanya mana yang *sabiq* (mendahului) dan *lahiq* (menyusul); ataukah keduanya harus berbarengan?

Kalau mau dijelaskan –semoga semakin jelas, bukannya tambah *mbulet*– maksud judul di atas adalah kita dalam menjalankan agama dilakukan dengan moderat, tidak *tathrif* (kurang) dan tidak tatharruf (*berlebihan*), biasa saja sesuai pilihan dalam *nash* agama, dengan mempertimbangkan aspek sosio kultural dan asas kebutuhan. Dengan pemaknaaan sederhana ini maka keberagamaan kita semakin tertata, dan dengan itu (entah *sabiq, lahiq* atau *mushahib*) perilaku sosio-religius kita menjadi semakin baik.

Dari cara pandang ini, aktivitas keberagamaan kita menggabungkan dua gerakan sekaligus: ke dalam dan ke luar. Gerakan ke dalam berusaha menghadirkan kesadaran beragama dengan penuh keihlasan karena dilakukan sesuai fitrah manusia. Sementara gerakan ke luar mencoba mengekspresikan kesadaran tersebut dalam kehidupan yang lebih manusiawi dan berbudaya.

[1]Ketua Perhimpunan Pemangku Makam Auliya' Se Jawa; Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus

Dengan cara pandang ini, guru utama kita adalah para Wali, utamanya Kangjeng Sunan Kudus, dimana dakwah konsisten dengan makna *harfiyah*-nya yang berarti “mengajak”, bukan “menyuruh”, apalagi “memaksa”. Dakwah atau mengajak, secara teoritik selalu mengasumsikan bahwa yang menjadi pelakunya, pihak yang mengajak *(dâ’i),* secara aktif terlibat dalam tindakan yang dia dakwahkan kepada orang lain. Ibarat seseorang mengajak temannya pergi ke Mal, secara teoritik ia sendiri memang hendak pergi atau sudah berada dalam proses (sedang akan) pergi ke Mal. Berbeda dengan “menyuruh”, maka si pelaku (penyuruh, *âmir*), bisa jadi tidak terlibat dalam pelaksanaan tindakan yang dia suruhkan. Apa artinya? Dakwah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengandaikan adanya basis keperluan yang sejalan –minimal tidak bertentangan– dengan pihak yang hendak diajak, meskipun pada saat itu belum terjadi kesesuaian.

Di sinilah figur wali mengambil peran. Para *Wali* (yang secara *harfiyah* berarti pembela, teman dekat dan pemimpin) benar-benar sosok yang mengajak kita menaiki tangga keberagamaan agar perilaku kita, baik secara pribadi atau sosial, berubah ke arah yang lebih baik. Para wali adalah tokoh yang secara sosial dan kultural mempunyai identifikasi yang kuat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitasnya: masyarakat yang perlu diberdayakan.

Segi lain, berbeda dengan “menyuruh”, mengajak lebih menempatkan kelompok sasaran sebagai kawan yang kurang lebih setara. Hubungan antara yang mengajak dengan yang diajak bersifat konsultatif, bukan instruktif dan subordinatif. Oleh sebab itu, dakwah menuntut hubungan yang bersifat dialogis, di mana yang satu tidak mendikte atau mendominasi terhadap yang lain. Itulah sebabnya, dakwah para wali dilakukan “bi al-hikmah”, dengan kebijakan, *wisdom*.

Goal yang hendak diwujudkan adalah terbentuknya kepribadian luhur *(al-akhlâq al-karîmah)* dari kelompok sasaran, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Kehidupan yang hendak dibangun dengan moderasi beragama adalah kehidupan yang sesuai dengan langgam peradaban dengan manusia sebagai subyek sekaligus obyeknya. Karakter kehidupan yang selalu bergerak dan berubah menjadi keniscayaan untuk dipertimbangkan dalam membangun peradaban. Sedangkan manusia sebagai subyek sekaligus

obyek mengindikasikan kehidupan harus mampu mengakomodasi kebutuhan manusia sebagai makhluk spiritual dan rasional, makhluk yang terdiri dari fisik dan psikis, individual dan sosial, serta terdiri dari beragam etnis, suku, dan sejenisnya.

Atas nama pribadi maupun masyarakat, khususnya masyarakat Kudus, dengan penuh kebanggaan, saya ingin memberikan selamat dan apresiasi atas dikukuhkannya saudara Dr. H. Ihsan, M.Ag sebagai Guru Besar Bidang Ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Untuk itu saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh civitas akademika IAIN Kudus terutama Rektor, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, atas bertambahnya Guru Besar yang dimiliki. Semoga IAIN Kudus semakin kokoh dalam dalam menjalankan tugasnya membangun peradaban umat di masa masa yang akan datang.

Kudus, 12 Maret 2022

KH. Drs. Em. Najib Hasan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Rasa syukur tiada henti senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas karunia dan fadhalNya dengan diberikannya jabatan tertinggi karir sebagai dosen kepada saya. Moment pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan Agam Islam dan sekaligus dengan terbitnya buku sederhana *"Pendidikan Moderasi Beragama Model Madrasah Pesantren"* ini sebagai wujud ekspresi pidato pengukuhan saya saat ini. Sebagai Guru Basar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam, ijinkan saya untuk menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya, sehingga sampailah pada tahap puncak meraih karir tertinggi dalam kualifikasi akademik sebagai Guru Besar (Profesor) di IAIN Kudus.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami kami haturkan dan persembahkan kepada kedua orang tua saya *almarhum Bapak H. Martorasidjan dan Ibu Hj. Srikatun* (*Allahumaghfir lahuma*). Tidak akan ada kata dan kalimat yang mampu memuat, mengurai dan mengungkapkan rasa terimakasih saya kepada beliau berdua. Karena dan sebab beliau berdualah saya bisa hadir di dunia ini dan berdiri di mimbar akademik hari ini. Sosok ayah yang tak lekang oleh panas matahri dan tak lapuk oleh derasnya hujan. Buruh tani di sebuah desa kecil yang tidak memiliki akses jalan raya ke kota, bahkan berada di tengah hamparan persawahan yang relative sulit dijangkau oleh angkutan kota. Kesadaran akan pentingnya pendidikan agama untuk putra-putrinya, beliau selalu *"ngestokke dawuh*" sang guru beliau almarhum Mbah Abu Hasan dan almarhum Mbah Kiai Ustman. Dua sosok inilah yang menjadi orientasi kedua orang tua saya untuk menyekolahkan anaknya ke Madrasah. Pesan singkat beliau "*Sekolah sing tenan, ben ora*

gelo koyo bapak". Kalimat inilah yang kemudian menjadi pegangan dan penyemangat saya dalam belajar, ngaji dan studi.

Pasangan suami istri yang telah pasrah dan menyerah dengan derai air mata, saat melihat anak ke 4 nya ini terkulai lemas sakit selama satu tahun di atas pembaringan, bahkan harus tertatih dan berlatih kembali untuk bisa berjalan karena typus yang dideritanya. Seorang ayah, yang tersentak dan terdiam saat anaknya berkata, "*Bapak, kulo tak kuliah njih*". Sorot mata tajam dan tak percaya dengan perkataan anaknya ini lalu bertanya, "*Terus piye Nang…piye carane nggolek biaya?.* Seorang ayah yang menahan rasa iba dan tak tega saat menyaksikan anak ke 4 nya lama dalam ujian panjang menanti sang buah hatinya. Namun, semua rasa yang dibalut doa saat itu, hari ini berubah manjadi bahagia, Bahgia karena anaknya telah menjawab pertanyaan beliau 31 tahun yang lalu. Anaknya telah berhasil mewujudkan cita dan harapannya. Prestasi guru besar yang diraih anak ke 4 nya adalah fadhal semata dan berkah doa dan restu tulusnya. Namun sayang, beliau telah berpulang kembali menghadap sang Khalik saat putranya meraih harapan seperti yang beliau impikan. *Alllahumaghfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fuanhuma.* Terimakasih juga saya sampaikan kepada almarhum Bapak H. Soekoesno yang telah mensupot dan menyemangati saya selama studi S.2 dan S.3 serta Ibu Mertua H. Suhartatik yang senantiasa mendoakan dan memberikan nasihat-nasihatnya.

Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia; Bapak H. Yaqut Cholil Qoumas yang telah menetapkan dan menerbitkan SK Guru Besar Bidang Keagamaan di internal Kemeterian Agama dan *Alhamdulillah stumma Alhamdulillah* saya adalah salah satu dari 15 orang Guru Besar yang menerima SK Guru Besar tersebut di bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam, Ucapan terimakasih kepada Sekretaris Jendral, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag,. Direktur Jendral Pendidikan Islam; Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, M. T., Bapak Direktur Diktis; Prof. Dr. H. Suyitno, M. Ag., Kasubdit Ketenagaan; Bapak Ruchman Bashori, S.Ag. M. Ag., dan tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim teknis dan administratif subdit ketenagaan Kementerian Agama RI yang telah

membantu kelancaran penetapan Guru Besar Keagamaan di internal kementerian Agama RI.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Kudus Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag. sebagai atasan langsung, sebagai guru, sebagai senior dan teman diskusi yang sangat menyenangkan. Kebersamaan yang tidak pernah terlupakan, apalagi saat-saat sulit dan masa karantina saat belum ada virus covid 19. Terutama, peran dan kebijakan Bapak Rektor yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi sampai menjadi Guru Besar sebagaimana harapan Beliau, yaitu selama kepeminpinan beliau akan ada Guru Besar di IAIN Kudus, sampai tahun 2022 sebanyak 5 orang, ini sesuai janji politik beliau pada saat paparan visi-misi calon Ketua *STAIN* pada tahun 2017. Hingga sampai sekarang sudah ada 3 orang yang menyandang Guru Besar di bawah kepimpinan beliau. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Supaat, M. Pd. yang tak henti-hentinya memberikan saran dan semangat untuk penyelesaian studi S.3 kala itu. Teman diskusi untuk membedah kebuntuan studi yang sempat mampet dan macet. Terimakasih kepada Dr. Nor Hadi,S.E., M.Si., Akt., C.A. teman makan siang bersama, saat harus urunan berbayar demi mempertahankan kelangsungan bersama. Teman yang selalu ada dan bersama dalam menggagas dan mendiskusikan kampus yang maju dan berprestasi. Tentunya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Wakil Rektor, Bapak Prof. Dr. H. Supa'at, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II; Bapak Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., C.A. , almarhum Bapak Dr. H. Karsa Sukarsa, M. Ag, Bapak Kepala Biro; Drs. Adnan, M. Ag, atas kerjasama dan dukungannya selama ini dalam menjalankan tugas bersama-sama menbantu Bapak Rektor. Terima kasih atas sinerginya sehingga program-program penting dalam rangka memajukan kampus bisa terwujud dan terlaksana dengan baik.

Demikian juga ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bupati Kudus; Bapak Dr. H. Hartopo, ST, MM, MH., Ketua DPRD Kab. Kudus; Bapak Masan, SE., MM., Kapolres Kudus; Bapak Wiraga Dimas

Tama, S.I.K, M.Si., Dandim 0722 Kudus; Bapak Indarto, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus; Bapak Ardian, SH, MH., Ketua Pengadilan Negeri; Singgih Wahono, SH.MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus; Drs. H. Suhadi, M. Ag,. Ketua FKUB Jawa Tengah; KH. Taslim PS, M. Si, Ketua NU Cab. Kudus; KH. Drs. Asyrofi Masyitho, Ketua PD Muhammadiyyah Kab. Kudus; Dr. H. Achmad Hilal Majdi, M. Pd., Ketua MUI Kab. Kudus; KH. Ahmad Hamdani, LC., MA.

Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Dekan Fakultas Tarbiyah; Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. H. Masrukhin, M.Pd., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Bapak Dr. Masturin, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.H. Direktur Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si. Para Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Tugas di lingkungan IAIN Kudus, yang telah menjadi *team work* yang solid dalam men-*suport* program Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang senantiasa penuh semangat tak kenal lelah untuk bersama-sama berjuang membesarkan kampus IAIN Kudus menjadi kampus yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Islam Terapan. Terima kasih

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para guru dan sesepuh saya; Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, MA., KH. Najib Hasan, KH. Nur Halim Ma'ruf, KH. Fathurrohman, KH. Saifuddin Luthfi, KH. Noor Hamid, KH. Ahmad Sugiharto, KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Ahmad Asnawi, KH. Yusrul Hana al hafidz, Dr. Abdul Jalil, M.Si. dan semua guru-guru serta kolega di madrasah almamater tempat menimba ilmu selama ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Ucapan terimaksih juga kami sampaikan kepada teman-teman kepala Lembaga, Unit Pelaksanan Teknis (UPT) dan Pusat-pusat di yang berada Lingkungan IAIN Kudus atas dukungannya dalam membesarkan dan memajukan IAIN Kudus. Terima kasih juga kami

sampaiakan kepada tim di bawah koordinasi beliau, para Kabag dan Kasubag di lingkungan IAIN Kudus dan tema-teman tim yang telah membantu dalam menyiapkan persyaratan akademi pengajuan Guru Besar kami: Bapak Zaenal Hafidzin, M.Ag., Ahmad Fatah, M. Ag., Bapak Azwar Annas, M.Pd.I., Bapak Achmad Zuhri, M.Pd. dan tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim teknis dan administratif dari Subbag OKH yang dipimpin oleh Ibu Chofia Nisa, S.E.

Terkhusus, ucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta saya, Istri terkasih; Hesti Ningrum, S.Pt. Perempuan setia yang senantiasa menemani saat sendiri dan sepi, menghibur hati saat hidup penuh uji dan saat penat tiada henti. Terimakasih untuk sang buah hati, yang entah bersembunyi dimana selam 10 tahun lamanya menanti kehadiran mereka; Ayunda Nurya Iksira Hasan, Ananda Faris Syarif Hasan, Adinda Noura Fitrya Hasan dan Adinia Naura Fitrya Hasan. Tak akan ada kesuksesan tanpa dukungan dan kebersamaan istri tercinta. Tak ada semangat yang bertahan dan terus berkobar tanpa suara ceria dan canda tawa mereka di tengah penat perjalanan panjang dalam menempuh studi strata S.2 dan strata S.3. Istri yang dengan setia menemani perjalanan terjal, suka, duka dan nestapa seakan perjalanan panjang ini tak berujung dan tak bertepi. Istri yang yakin, siap dan tulus ihlas saat melihat SK PNS saya tahun 1998 dengan gaji Rp. 248.500, saat itu. Istri yang senantiasa menenangkan saat sedang dirundung kecemasan, istri yang senantia menyejukkan saat didera suasana yang meresahkan. Terimakasih yang tiada tara untuk anak-anakku, anak-anak yang selalu menjadi teman bermain, teman bercenhgkarama dan teman bercanda ria saat penat dan lelah. Kakak-kakak saya, Ibu Srikonah, Ibu Warisih, Bapak H. M. Ali Yahya, M.Pd, Ibu Khumaedah, Ibu Darmasanti, SE, MM, Ibu Ardiani, SH. Dan seluruh keluarga besar Mbah H. Marto rasidjan.

Dan yang paling akhir, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberi kesempatan kepada kami untuk bisa meraih gelar Akademik tertinggi yaitu sebagai Guru Besar. Terima kasih kami sampaikan

kepada teman-teman pengelola IAIN Kudus Press yang telah berkenan menerbitakan buku saya ini. Teriring doa semoga semuanya dicatat sebagai *amal jariyah* dan mendapat *jaza'* dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 12 Maret 2022
Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.
NIP	:	196704041998031001
Tempat & Tanggal Lahir	:	Kudus, 04 April 1967
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina Tingkat I/IV/b
Pendidikan Terakhir/ Universitas	:	S3 Ilmu Keislaman IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012
Jabatan Fungsional	:	Guru Besar/Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama IAIN Kudus
Instansi/Unit Kerja	:	IAIN Kudus
Alamat Kantor	:	Jl. Conge Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus
Nomor Telepon Kantor	:	(0291) 438818
Alamat Rumah	:	Jl. Lambau No. 06 Rt. 03 Rw. 02 Desa Singocandi Kec. Kota Kab. Kudus
Nomor Telepon Rumah	:	-

Nomor HP dan E-mail : 08122517385

ID Scopus : 57218199701

ID Sinta : 6654220

ID Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?user=qD_fYt4AAAAJ&hl=en

B. Riwayat Pendidikan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan/Prodi	Tahun Lulus
1	MI Khoiriyah Bae		1980
2	MTs. Qudsiyyah		1986
3	MA Qudsiyyah		1989
4	IAIN Walisongo Semarang	Pendidikan Agama Islam	1994
5	IAIN Walisongo Semarang	Pendidikan Islam	2001
6	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Ilmu Keislaman	2012

C. Riwayat Jabatan

No.	Nama Jabatan	Tahun
1	Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus	2003-2004
2	Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus	2004-2006
3	Direktur Pascasarjana IAIN Kudus	2017-2018
4	Wakil Rektor III IAIN Kudus, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	2018- 2022

D. Penelitian 5 (lima) tahun terakhir

No.	Judul Penelitian	Tahun
1	Mendokumentasikan Pola Keberagamaan Santri Qudsiyyah Dan Produktivitasnya (PKM Berbasis Riset)	2017
2	Mendokumentasikan Ketahanan Ketuhanan Yang Maha Esa Model Pesantren Di Kudus (PKM Berbasis Riset)	2018
3	Madrasah Berbasis Pesantren (Model Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran Integratif)	2018
4	Madrasah Berbasis Pesantren (Model Penguatan Pendidikan Nilai-nilai Kebangsaan di Kawasan Pantura)	2019
5	Model Pendidikan Moderasi Beragama Pondok Pesantren di Jawa Tengah (Studi Implementasi Praktek Ajaran dan Strategi Dakwah Walisongo)	2021

E. Karya Tulis Ilmiah 5 (lima) tahun terakhir

No.	Judul	Tahun	Penerbit	Link publikasi
1	The contestation of national and religious curricula in indonesia's madrasas since the passage of the uuspn	2021	Educational Studies Routledge Taylor & Francis Group	https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03055698.2021.1958757
2	Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java	2021	Qijis, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/8941
3	Actualization of Islam Nusantara Values at Madrasah Qudsiyyah Kudus	2021	EDUKASIA, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/10182
4	The Politics Of Halal Label: Between Economic Piety And Religious Ambiguity	2020	Al A'RAF, IAIN Surakarta	http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1803

5	Islamic Guidance Model Case Study of New Students who Repeat Class at Madrasah Qudsiyyah Kudus	2020	Konseling Religi	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/Ihsan/pdf
6	Kiai As Al-Qudwah Al-Khasanah: The Role Of Kiai In Shaping Religious Culture In Islamic Education Institution	2020	Al A'RAF, IAIN Surakarta	http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/2995/1078
7	Program Arabic Club dalam Meningkatkan Komunikasi-Produktif Bahasa Arab Santri MTs Qudsiyah Putri	2020	ARABIA, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Arabia/article/view/7460/pdf
8	Islamic Nationalism based on Islamic Boarding Schools: Study of Madrasas and Islamic Boarding Schools in the North Coast Region of Central Java	2020	JARDCS	https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5413
9	Pembentuk Karakter Religius Anak Usia Dini Melalui Guru Laki-laki (Studi Kasus di Kelas Sifir Madrasah Qudsiyyah Kudus)	2020	THUFULA, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/view/7325/pdf
10	Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus in Religious Moderation on Indonesian Islamic Boarding Schools	2020	Proceeding of International Conference on Engineering, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconetos-20/125955752
11	Pesantren-Based Madrasah: Curriculum Implementation Model and Integrative Learning	2019	ADDIN, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/8078/pdf
12	Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Berbasis Literasi Pesantren	2018	LIBRARIA, IAIN Kudus	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/3832/pdf

F. Karya Tulis/Buku

No	Judul	Tahun Terbit	Ket.
1	Psikologi Belajar (Tela'ah Pemikiran Imam Al Ghazali)	2012	978-602-19957-5-4
2	Guru Ngaji Wong Kudus	2012	978-602-19957-6-1
3	Narasi Satu Abad: Khr Asnawi, Maddrasah Qudsiyyah & Hikayat Santri Nusantara	2016	602-69502-2-2
4	Madrasah Berbasis Pesantren : Sebuah Model Penguatan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah	2020	978-623-7177-61-6
5	Kudus Kiblat Bhineka Tunggal Ika	2020	-
6	KHR. Asnawi Kudus; Ahli Da'wah dan Pendiri Nahdlatul Ulama'	2021	978-623-323-023-0

G. Narasumber Kegiatan Ilmiah

No.	Judul Kegiatan	Tahun	Penyelenggara
1	Seminar Nasional "Peran MUI dan Tokoh Masyarakat dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi"	2021	IAIN Kudus, Pemkab. Kudus, MUI
2	Temu Tokoh Nasional dan Literasi Kebangsaan "Distrupsi dan Pandemi: Tantangan bagi Kaum Muda"	2021	MPR, IAIN Kudus
3	Workshop Online "Eksistensi Olahraga Seni Bela Diri di Era Pandemi untuk Memperkuat Imun dan Kesehatan Mental"	2021	IAIN Kudus
4	Webinar Moderasi Beragama "Strategi penguatan Moderasi Beragama dan Lokal Wisdem Terhadap Potensi Desa di Era Covid-19"	2021	IAIN Kudus, Pemdes Wedung
5	Webinar Dialog Lintas Agama "Meningkatkan Semangat Moderasi dalam Beragama bagi Dharma Agama dan Dharma Negara"	2021	Universitas Muria Kudus
6	Seminar Alumni dan Mahasiswa"Pemberdayaan Potensi Alumni Menuju Transformasi UIN Kudus"	2021	IAIN Kudus

7	Menjaga Kualitas Belajar dari Rumah	2021	Kominfo, Pemkab. Kudus
8	Webinar Dialog Interaktif "Peran Teknologi Informasi dalam Pendidikan Karakter"	2021	IAIN Kudus
9	Bedah Buku "Cahaya dari Nusantra Maulana Habib Luthfi Bin Yahya"	2021	Mubarok Food
10	Membangun Eksistensi Alumni Madrasah Qudsiyyah di Semarang	2020	Maqdis
11	Webinar Kebangsaan "Refleksi Filosofis Terhadap Populisme Agama Pasca Reformasi"	2021	SEMA IAIN Kudus
12	Seminar Nasional "Kiprah Santri Bertumbuh Berdaya Berkaya"	2021	DEMA IAIN Kudus
13	Seminar Online "Mewujudkan Mahasiswa Sukses Berorganisasi dan Adaptif"	2021	MENWA IAIN Kudus
14	Tantangan Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Karakter	2021	Kominfo, Pemkab. Kudus
15	Sarasehan Pemberdayaan Potensi Daerah dan Percepatan Moderasi Beragama untuk Indonesia Tangguh Tumbuh	2021	Pemprov. Jawa Tengah, Kanwil Kemenag, IAIN Kudus
16	Diskusi Agama-agama Manusia: Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Kebinekaan	2021	DEMA IAIN Kudus
17	Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Pendidikan di Era Digidal	2021	Yayasan Nusantara Satu Kudus
18	Mewujudkan Mahasiswa Berprestasi Unggul dan Moderat Demi Terciptanya Harmoni Toleransi dan Kebhinekaan dan Berakhlakul Karimah	2021	Dema IAIN Kudus
19	Merajut Intelektual Kader yang Progresif dan Visioner untuk Kemajuan Organisasi	2021	PC IPNU IPPNU Kab. Kudus
20	Podcast Ramadhan Rijalul Anshor	2021	PC Ansor Kab. Kudus

G. Penghargaan/Piagam

No.	Bentuk Penghargaan	Tahun	Pemberi
1	Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalencana Karya Satya XX Tahun	2019	Presiden RI

H. Keanggotaan Organisasi Profesi/Ilmiah

No.	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kudus	2021-2026	Ketua
2	Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Se Jawa Madura	2021-2023	Ketua
3	Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Se Indonesia	2021-2023	Sekretaris
4	MUI Kabupaten Kudus	2018-2023	Ketua 1 Dewan Pimpnan Harian
5	Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Kudus	2015-2020	Wakil Ketua
6	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' Kab. Kudus	2019-2024	Dewan Pakar
7	BPPMNU Az Zahra Kudus	2016-2021	Ketua Umum
8	Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyyah Kudus	2016-2021	Ketua 1
9	BPPMNU Roudlotus Syibyan	2015-2020	Wakil Ketua
10	BPPMNU Mu'allimat Kudus	2020-2025	Sekretaris
11	PCNU Kab. Kudus	2019-2024	A'wan
12	BAZNAZ	2019-2022	Dewan Pengawas UPZ
13	Komite MTs Negeri Kudus	2018-2023	Ketua II

14	Asosiasi Dosen Pergerakan (PP ADP) PB IKA PMII	2021-2026	Departemen Kerjasama dalam Negeri
15	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Kudus	2022	Dewan Pakar

Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.
NIP. 196704041998031001

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.